Pers Mahasiswa Banyak Kehendak

KOMUNIKASI INTELEKTUALITAS MAHASISWA

ParaHyangan

PERGURUAN TINGGI : SIAPA PUNYA ?

Edisi 6/Thn. IV, Desember 1994. Pengganti Ongkos Cetak Rp. 1.5[illegible]

Kami Menyapa

Niat baik ternyata tidak selamanya akan selalu dianggap baik. Paling tidak, hal itu, belum pupus benar dari benak kami. Pada saat penggarapan laporan utama, tepatnya saat penyebaran kuesioner, banyak pihak yang meragukan niat baik kami. Kendati kuesioner —yang ditujukan buat mahasiswa baru angkatan 1994— telah disetujui oleh pembantu rektor III, ternyata 'dihadang' oleh lembaga yang dihidupi 'mahasiswa' sendiri. Dan, anehnya, lembaga yang semestinya mewakili harapan, cita-cita, dan niat baik kami ini yang menguatirkan apa yang kami lakukan. "Kuesioner ini takut merugikan nama baik Unpar," demikian alasan yang dikemukakan kepada kami.

Lalu dengan gegabah: alasan diberikan dengan melakukan analogi dengan kasus ***Monitor***. Tetapi, kenapa misalnya, alasan tidak dilakukan dengan memberi contoh sejumlah media massa terkemuka lainnya. Bukankah ***KOMPAS***, ***FORUM KEADILAN***, ***Pikiran Rakyat***, ***Republika***, untuk menyebut beberapa contoh, sering menyebarkan kuesioner kepada pembacanya? Dan, tentu saja, angket yang disebarkan itu demi kepentingan publik yang lebih luas.

Kami pun, saat menyebarkan kuesioner itu, yang membenak adalah sebuah keinginan: melihat universitas kita lebih maju.

Hidup adalah pilihan atas berbagai kemungkinan, berbagai peluang, demikian nasehat orang bijak. Maka, kami pun tetap menyebarkan angket itu. Dan, hasilnya, dapat anda simak pada salah satu bagian laporan utama edisi ini.

Banyak jalan menuju Roma demi sebuah perbaikan. Untuk semua itu, kami mengerahkan segenap usaha untuk memperbaiki kualitas. Dan, majalah ***ParaHyangan,*** pada akhirnya, edisi ke-6 ini hadir di pangkuan pembaca. Selain itu, kami pun berusaha mengasah pena anggota kami. Semisal saja, mulai dari pengiriman kru kami ke berbagai pelatihan jurnalistik mahasiswa selama rentang tiga-empat bulan ke belakang hingga berbagai langkah lainnya. Semisal, di *training* pers di surat kabar mahasiswa *ISOLA POS* IKIP Bandung (September 1994), pelatihan pers yang diselenggarakan di Badan Penerbit Pers Mahasiswa (Oktober 1994) UGM Yogyakarta, ataupun —di 'rumah' sendiri— di Universitas Parahyangan, 2-6 November 1994. Dan, tidak kurang pula, kami sering bersilaturahmi dengan sejumlah lembaga penerbitan yang bergabung dalam **Forum Pers Mahasiswa Bandung** (**FPMB**). Dengan semua itu, ***ParaHyangan*** memperbaiki dan menggodog diri.

Kendati ***ParaHyangan*** majalah kampus, keseriusan penanganan dan penggarapan yang profesional adalah penting. Persoalannya, kami sadar bahwa penerbitan, bagaimanapun, merupakan 'wajah' dari institusi yang menerbitkan. Artinya, barangkali, Anda pun bisa menebak: dengan menggunakan nama universitas, wajah ***ParaHyangan***, tidak bisa tidak, adalah 'wajah kampus' kita ini.

Maka, dengan segenap keterbatasan dan keterbata-bataan, kami pun hadir. Kritik dan pemakluman atas kekurangan kami dari pembaca adalah oase yang tetap kami nantikan.

Redaksi

Majalah Mahasiswa ParaHyangan. **Pelindung**: Rektor Universitas Katolik Parahyangan. **Pembina**: Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi**: Pasaribu Ari Josuandi C. **Sekretaris Umum**: Nyoman. **Bendahara Umum**: Astrid Mira P. **Pemimpin Perusahaan**: Aditya Annas Azhari. **Litbang**: Aum Muharam, Igi. **Staf Redaksi**: Yenny Itanaya, Edward Panjaitan, Dheasy Suzanti, Henny, Primus, V. Hanny Sulistianingtyas. **Tata Artistik**: Toni R, Jatus. **Alamat Redaksi/Perusahaan**: Jln. Ciumbuleuit 94, Bandung 40141

Redaksi ParaHyangan menerima setiap tulisan ujud kreativitas dan geliat intelektualisme segenap sivitas akademika Universitas Katolik Parahyangan. Naskah diketik rapi 2 spasi, sebanyak-banyaknya 8 halaman. Tulisan yang dimuat bakal diberi imbalan sekedarnya.

Pena Mahasiswa adalah Sejarah

Sejarah pers mahasiswa memang panjang. Dan, sejarah itu akan terus diguratkan. Paling tidak, Majalah ***ParaHyangan*** Universitas Katolik Parahyangan, yang hadir kembali akan menambah semerbak harumnya pers mahasiswa Indonesia.

Semoga ***ParaHyangan*** mampu menggoreskan dirinya sebagai pers mahasiswa yang berwibawa di Bandung. Bagaimanapun, kita semua tidak dapat memungkiri kenyataan sejarah: pers mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kemahasiswaan republik ini.

Selamat buat ***ParaHyangan***.

Rommy Fibri
Sekretaris Jendral PPMI
(Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia)

Kangen *ParaHyangan*

Yth. Redaksi ***ParaHyangan***
di Bandung

Kendati bukan mahasiswa Universitas Parahyangan, saya kerap mendapat majalah ini dari seorang teman. Sekian lama, ***ParaHyangan*** tidak *nongol*. Kemanakah kau? Saya, bagaimanapun, merasakan kangen untuk menyimak lembar demi lembar halaman-halamanmu.

Dan, saya ingin sekali kekangenan ini, diluapkan dengan munculnya majalah ini, meski — misalnya— saya harus membelinya.

Aris Purnomo
Jurusan Sosiologi Fisispol UGM
B-21 Bulak Sumur, Yogyakarta

***ParaHyangan*, Mengapa Pucat?**

Menyimak edisi lima ***ParaHyangan***, kenapa perwajahan yang ditampakkan kerap pucat? Seolah-olah, visualisasinya tidak dikerjakan serius. Oleh karena itu, saya berharap penggarapan visual majalah yang mengatasnamakan universitas kita ini lebih diperhatikan.

Bukankah kemasan sebuah media itu penting? Khususnya untuk menjaring pembaca dan (tak lupa) iklan?

Sekian. Terima kasih atas dimuatnya kritik ini.

Maria Chaterina
FE Universitas Parahyanagan
Jalan Merdeka 30 Bandung

Telepon di Kampus Rusak

Di tengah kebutuhan berkomunikasi yang semakin penting sekarang, telepon menjadi sarana penting. Hanya saja, sialnya, fasilitas umum, seperti telepon misalnya, kenapa tidak pernah dipelihara serius oleh para pemakainya.

Hal itupun terjadi di kampus kita. Sudah sedemikian parahkah ketidakpedulian mahasiswa atas fasilitas telepon? Sebuah contoh, kejadian macam itu dapat kita temui di sebuah fakultas: gagang telopon raib!

Untung saja, Telkom 'berbaik hati' segera memperbaikinya. Lalu, akankah fasilitas penting itu akan di-'rusak' kembali?

Anne
Nama dan alamat ada pada redaksi

Salut

Membidani urusan pers mahasiswa jelas bukan hal gampang. Semua aktivis pers mahasiswa tahu betul makna kalimat ini. Tapi, apa *sih* yang gampang jaman sekarang ini? Untuk tidurpun, nyatanya, banyak orang kini merasa kesulitan. Meski begitu, atas nama lembaga pun pribadi, saya kira cukup sah untuk menyaluti rekan-rekan ***ParaHyangan***. Pasalnya, bukan seberapa hebat sepak terjang mereka (*abis* untuk itu sulit indikatornya, *sih*). Selepas perkenalan kita, banyak kerja sama yang telah dengan cukup baik kita garap. Sebutlah semisal soal 'gerilya' kita membangun Forum Pers Mahasiswa Bandung. Dan, nyata kental warna pertemanan antarkita inilah yang kemudian mengemuka sungguh.

Satu pasal lagi, *Keep struggling till the morning of freedom raising in your peoples minds.*

Andreas Ambar Purwanto
Presidium PPMI
Wilayah Jawa Barat

No.6 Tahun V Desember 1994
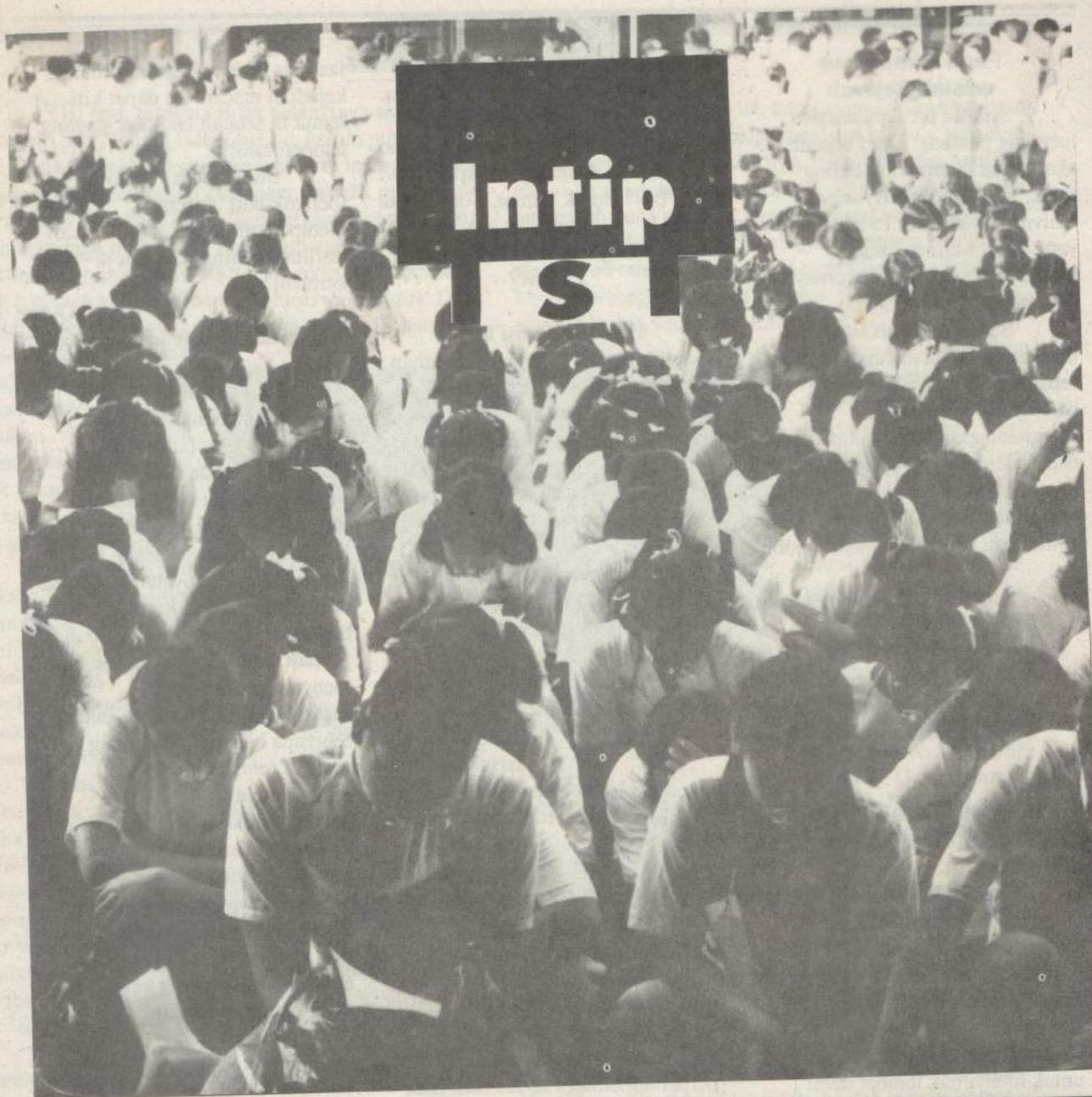
Goresan Utama

Bila Perguruan Tinggi Disorot 7

Mahasiswa: Kemarin, Kini, dan Esok 8

Apa Kata Mereka 9

Kuliah = Tidak Bebas (?) 10

Universitas: Pabrik Buruh Terdidik? 11

"Saya Bukan Penyelamat, Bukan Superman..." 14

Tidak bisa tidak, dunia perguruan tinggi saat ini tengah dininabobokkan oleh predikat-predikat sloganistis macam: agent of change, elite cognitive, dan social agents of counter culture. Predikat seperti itu sarat dengan tanggung jawab moral. Saking beratnya, insan-insan perguruan tinggi dibuat kerdil memikulnya. Bagaimanakah wajah perguran tinggi kita sebenarnya? Masihkah kita melulu liliput-liliput dengan predikat-predikat yang bombastis? Lantas, bagaimanakah cermin dari mahasiswa Unpar? Apakah cermin itu masih mengkilap? Mirror, mirror on the Wall !

Celoteh

Sekedar Catatan Obsesi Buat Kang Gareng 32

Selamat Datang Putra-putri Terbaik? 51

Mimbar

Perguruan Tinggi di Tengah Mitos yang Mencantelinya 18

Mana Benangmu Aryadne? 21

Negara Machiavelis dan Tanah Lima Perak 24

Kebijakan Politik dan Pembangunan Ekonomi 34

Peran Ilmuwan dan Peneliti dalam Era Industrialisasi 39

Ekspresi

Teater Kampus : Alternatif Daya Seni Kita 37

Resensi

Cucu Wisnusarman : Kritik Lewat Pintu Samping 63

Bincang-Bincang

Prof. Ign. Soeharto : "Nilai Mutlak Adalah Ilmu" 58

Rana

Ketika Lalu Lalang Menjadi Potret 30

Peristiwa

Mahitala Menyusuri Citarum 52

Olah Raga Dirgantara: Menuntaskan Mimpi Icarus? 54

KOPMA-ku Terwujud 55

Simfoni Tiada Henti 57

Toleh

Pers Mahasiswa: Kehendak Banyak? 42

Ia yang Mengalir Tiap Masa 43

Pers Mahasiswa Bubar Saja 45

Menggagas Forum Kota 47

Pers Mahasiswa sebagai Pers Alternatif 49

"Pers mahasiswa ibarat air yang akan terus mengalir." Pepatah inilah yang diyakini banyak pegiat pers mahasiswa. Lalu bagaimanakah 'wajah' pers mahasiswa yang lahir dekade 1980 hingga 1990-an ini? Akankah pers mahasiswa era ini dapat memvisualisasikan dirinya. Sejajar dengan pers mahasiswa yang lahir terlebih dahulu (era 1960-an atau 1970-an)?

MUGEN TURBO M4DX4-100 DWB PRO-UP

DYNAMIC WRITE BACK (DWB) CACHE

JUARANYA KOMPUTER 486

MUGEN TURBO M4DX4-100 DWB sudah tidak lagi menemukan tandingan yang setimpal dikelasnya, sehingga dia naik kelas, berkompetisi pada kelas komputer Pentium yang harganya jauh lebih mahal.

Lihatlah hasilnya. Tanpa perlu komentar panjang lebar, angka² hasil nyata dibawah ini akan menjelaskan kepada anda betapa perkasanya MUGEN TURBO M4DX4-100 DWB mengungguli komputer-komputer Pentium.

Dengan investasi yang hanya senilai sebuah komputer 486, anda akan mendapatkan Features yang sangat lengkap dan Power yang sangat tinggi, yang bahkan melebihi Power sebuah komputer Pentium.

Selain itu, semua MUGEN TURBO Series dilengkapi pula dengan garansi 3 tahun, sehingga investasi anda benar-benar menguntungkan dan terlindungi dengan aman. Kamilah pelopor dalam memberikan garansi 3 tahun, yang kemudian diikuti oleh merk² lainnya.

Dengan memiliki MUGEN TURBO anda akan mendapatkan kepuasan dan manfaat optimal dari kehadiran sebuah komputer.

Ready Stock
MUGEN TURBO PENTIUM P5-90
Juaranya Komputer Pentium

	WINDOWS PERFORMANCE WINSTONE 94	DOS PERFORMANCE PC BENCH 8.0 - DOSmark
MUGEN TURBO M4DX4-100 DWB	83.9	1017
HP Vectra VL2 4/100 PC (DX4-100)	80.0	911
Dell Dimension XPS 4100V (DX4-100)	71.7	699
Acer Altos 800 (DX4-100)	70.4	792
ALR Evolution IV 4/100 (DX4-100)	69.5	506
AST Bravo LC 4/100t (DX4-100)	68.0	831
Compaq Prolinea 4/100 (DX4-100)	63.4	743
Acer Power Series 9000 (Pentium 66)	76.2	784
IBM ValuePoint P60/D (Pentium 60)	74.5	949
Gateway 2000 P5-60 (Pentium 60)	71.7	976
Digital DECpc XL 560 (Pentium 60)	70.2	841
Compaq Deskpro 5/60M (Pentium 60)	69.2	849
AST Premmia LX P/60 (Pentium 60)	68.5	903

Windows scale: 60 65 70 75 80 85 (WORST – BEST); DOS scale: 500 600 700 800 900 1000 (WORST – BEST)

* All tested PCs are equipped with 16MB DRAM and at least 500MB Harddisk.
* Winstone™ 94 and PC Bench™ 8.0 are developed by Ziff Davis.
* All products and company names are registered trademarks of their respective holders.
* Sources : PC Magazine Vol. 13 No. 2, Vol. 13 No. 7, Vol. 13 No. 12

MULTICOM SUDIRMAN
Komp. Capitol Plaza A2 No 58
Jl. Jend. Sudirman 91 - 93
Telp. 4202442 - 440420
Bandung

BANDUNG COMPUTER
Jl. Cihampelas No. 83
Telp. 233075 - 233091 - 233148
Bandung

Jam buka : Senin - Sabtu : 08.00 - 18.00
Minggu : 11.00 - 14.00

SPESIFIKASI MUGEN TURBO 486DX4-100 DWB PRO-UP	
Memory	4096 KB
Cache memory	256 KB
Display card	VGA 1024 KB Vesa Local Bus (2048 KB untuk DWB Professional)
I/O	IDE Vesa Local Bus card : floppy & harddisk controller
	2 serial + 1 paralell port
Floppy drive	1.2 MB & 1.44 MB
Keyboard	108 keys

Bila Perguruan Tinggi Disorot

Lho mengapa dalam kesekonyong-konyongan yang terlalu serius kita jadi bicara soal mahasiswa dan perguruan tinggi? Itu pertanyaan menarik sekaligus vital yang semestinya dimunculkan setiap kali sebuah perbincangan terbangun dengan mengambil tema-tema tadi sebagai pokoknya. Cuma, juga entah mengapa, boleh jadi sudah cukup lama juga agaknya kita tak sempat memunculkan pertanyaan macam begitu. Karenanya, mungkin, alinea ini bisa dipinjam buat barang beberapa jenak sebagai bekal perjalanan kita untuk kembali melangsungkan ziarah, yang boleh jadi singkat saja, ke hati nurani kita masing-masing.

Mahasiswa, entah mengapa, selalu saja bisa menjadi pokok perbincangan yang menarik. Mungkin, pada saat beriringan, lewat perbincangan macam begitu mahasiswa menjadi subyek dan obyek terpenting di dalamnya. Memang, di pundak insan perguruan tinggi ini, banyak hal disandangkan. Hingga akibatnya, bukan mustahil kita kehabisan tenaga sendiri untuk melulu mencoba membicarakan satu persatu hal di dalamnya dengan sedikit menuntas.

Tapi, terlepas dari semua itu, masih saja perlu dan pantas dipertanyakan: mengapa hal itu terjadi? Narcisismekah? Lantas, boleh jadi tak kalah pentingnya jika kembali dimunculkan pertanyaan: sebegitu penting dan seberharga apakah mahasiswa di mata masyarakatnya? Hingga mungkin tidak salah bila Noegroho Notosoesanto, mantan aktivis mahasiswa tahun 50-an yang kemudian sempat menjadi Mendikbud, pernah mengisyaratkan bahwa, "Di negara-negara berkembang dimana jumlah intelektualnya masih sedikit, mahasiswa dibutuhkan untuk mengisi peran sosial kemasyarakatan". Dan, seperti yang digoreskan pena sejarah, mahasiswa (Indonesia) bukan kebetulan semata turut memolesi warna kehidupan kebangsaan negeri ini. Mahasiswa menjadi bagian tidak terpisahkan dari degup jantung republik ini di tiap masanya.

Tidak bisa tidak, kita akan terpukau dengan predikat-predikat sloganistis macam *agent of change, control social, agent of culture, dll*. Warisan sejarah itulah yang rupa-rupanya dijadikan simbol monumental penanda keberadaan mahasiswa di republik ini. (Kendati, kenyataan kemudian telah jauh dan amat banyak berubah.) Selepas pemberlakukan konsep NKK/BKK oleh Daoed Joesoep tahun 1978, ada semacam kecenderungan historis yang telah bergeser (baca: digeserkan?), yakni dengan adanya aturan-aturan yang sebegitu ketat diberlakukan kepada mahasiswa. Mulai dari sistem perkuliahan yang menyita ruang perhatian terlalu besar, pun ranjau sangsi-sangsi akademik yang mesti dengan hati-hati dititi oleh mahasiswa. Salah langkah sedikit saja, bisa buntung kaki, ujung-ujungnya cacatlah masa depannya. Sementara kuliah telah menjadi semacam ritus peribadatan yang sudah terlalu sakral untuk tidak diberi perhatian nyaris 100%. Sedang aturan-aturan tadi boleh diibaratkan macam pagar berduri yang mengitari kampus dan lantas menjadikannya sebagai sebuah 'pemukiman suku terasing'. Mahasiswa dan perguruan tinggi, pelan-pelan tapi sangat pasti, telah memutuskan membangun jarak dengan masyarakatnya. Ia seolah diharuskan memilih untuk memposisikan dirinya sebatas penonton yang berdiri di luar lapangan dari hiruk-pikuk, gegap-gempitanya dan penuh 'sorak-sorai'-nya kehidupan di luar pagar kampus.

Namun, pertanyaannya kemudian, akankah "peran-peran gagah" dalam rimba persilatan sosial kemasyarakatan tadi masih akan tetap dipendekari mahasiswa generasi kita? Sementara di saat bersamaan, di tengah situasi sosial yang jelas-jelas masih amat banyak membutuhkan peran sosialnya, banyak mahasiswa berasyik-masyuk dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan, banyak dari kita, kalau mau dan masih mampu berkata jujur, harus merasa sepakat dengan apa yang dikuatirkan J. Drost: banyak perguruan tinggi yang telah menyimpang *the idea of university*, tidak terkecuali mahasiswanya.

Barangkali, meminjam diksi Chairil Anwar, mereka, jangan-jangan, *"Tambah asing dari cinta sekolah rendah"*. Atau, seperti dikuatirkan Dr. Kartini Kartono, mahasiswa banyak yang tidak tahu apa-apa. Malah, dalam pandangan Arbi Sanit, aktivitas yang dijalani mahasiswa kini sudah tidak lagi menunjukkan warna 'kemahasiswaan'-nya.

Maka, tidak kurang-kurangnya kecaman dan kritikpun masih dan terus berbanjiran ditujukan buat mahasiswa. Pun kita, yang tengah menempuh pendidikan tinggi, semestinya merasakan 'kritik macam apa' yang kerap menghujami kita. Boleh jadi kemudian kita mesti geram, sekedar terhenyak dan termangu-mangu, tersipu-sipu, atau malah tertunduk malu menyikapi semua itu.

Mumpung "belum begitu asing benar dengan sekolah rendah", ***ParaHyangan*** edisi kali ini menurunkan laporan utama dengan tema mahasiswa. Tim ***ParaHyangan*** mencoba menggali kisah dari berbagai sumber, Mewawancarai mahasiswa —yang kerap ditautkan dengan adagium "buku, pesta, dan cinta"— mulai yang mengaku diri biasa-biasa saja, hingga para aktivisnya; pengamat pendidikan, pun berbagai pihak yang bertalian dengan dunia pendidikan. Sebagai penunjang liputan, tim ***ParaHyangan*** menurunkan hasil angket. Penyebarannya ditujukan ke mahasiswa baru dari berbagai fakultas di lingkungan Unpar. Dari 125 sebaran, sebanyak 115 responden yang mengembalikannya ke redaksi.

Masihkah insan perguruan tinggi membawa amanat luhur masyarakat? Mungkin..., begitu rumusan pertanyaan yang coba kembali dilemparkan dan hendak diberi jawab bersama-sama kali ini. Agar setidaknya esok masih mungkin terbayangkan di kepala kita bakal terjadinya perubahan demi perubahan atas nama pendewasaan.

Mahasiswa: Kemarin, Kini, dan Esok

Perguruan tinggi, bukan sekedar lembaga inisiasi

Dr. Kartini Kartono, seorang pemerhati pendidikan, kuatir. Menurutnya, banyak mahasiswa yang tidak mengetahui 'siapa' dirinya, meski telah terlanjur kuliah buat beberapa lama. Ketidaktahuan itu berakibat panjang. Misalnya ketidakmampuan mengantisipasi keadaan. "Malahan, tidak jarang ditemui, mahasiswa tidak mengetahui keadaan negeri sendiri. Mahasiswa banyak dininabobokan oleh situasi yang diciptakan untuk demikian, sehingga banyak fenomena yang semestinya melibatkan mahasiswa tidak ditoleh sama sekali", jelasnya dengan prihatin. "Akhirnya, mereka banyak yang suka memilih jalan yang paling mudah untuk mencapai tujuannya," ujar psikolog yang masih aktif menulis kepada ***ParaHyangan***.

Senada dengan Kartini Kartono, dalam sebuah kesempatan, pengamat politik Bob Sugeng Hadiwinata dari Hubungan Internasional FISIP Unpar, masih melihat banyak mahasiswa yang terjebak pada *political thinking* yang bersifat intra-mahasiswa, seputar kampus *tok*. Tidak pernah membicarakan hal yang lebih penting, misalnya isu kemiskinan atau cara memperjuangkan demokrasi.

Kritik macam itu memang wajar terjadi. Kenapa? Sebab, mengedepankan perguruan tinggi di negeri katulistiwa ini, menjadi sebuah hal yang sulit disangkal bila tidak bermuara kepada 'apa' dan 'bagaimana' semestinya mahasiswa. Tidak heran bila mahasiswa tidak melakukan peran sosial politiknya, amat mustahil sorotan atas dirinya tidak berhenti. Namun, bagaimanapun juga, determinasi kekuasaan juga berpengaruh besar dengan situasi kemahasiswaan.

Sebagai misal, semenjak Indonesia mengenyam kemerdekaan, misalnya di tahun 1966, kekuasaan Soekarno rontok karena gerakan mahasiswa. Lantas, kesuksesan itu mengantarkan Orde Baru memgang tampuk kekuasaan negeri ini. Keberhasilan mahasiswa inilah yang kemudian menjadi mitos yang tidak lekang hingga kini. Kendati dibalik kesuksesan mahasiswa tahun 1966 itu, sebagaimana pernah dipaparkan eksponen 1966 Marsilam Simanjutak, peran militer tidak dapat dikesampingkan dalam memberi kekentalan warna gerakan politik pada tahun-tahun itu. Kisah itu berlanjut pada tahun 1974, yakni Malari. Kendati Malari tidak 'sukses' benar dan menyimpan tanda tanya besar tentang keterlibatan mahasiswa dalam pembakaran Proyek Senen, kisah itu tetap menjadi pokok pembicaraan. Maraknya protes mahasiswa atas pelaksanaan Pemilu di 1978, yang kemudian melahirkan NKK/BKK diberlakukan tahun 1978, yang berisi upaya menggembosi peran mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui kemudian, 'tumbal' dari NKK/BKK ini melayang: sejumlah aktivis mahasiswa dibui.

Kisah kemandegan peran mahasiswa pun berhenti untuk beberapa saat. Namun, seperti matahari yang selalu hadir di ufuk timur, gerakan mahasiswa terus mengalir, dan tidak pernah berhenti. Reaksi terhadap NKK/BKK pun, sebenarnya tidak berhenti dan terus berdatangan kendati dalam bentuk yang tidak transparan. Hal itu, misalnya, ditampakkan dengan maraknya kelompok studi di medio 1980-an yang kemudian dilanjutkan dengan maraknya pers mahasiswa. Seiring itu, aksi mahasiswa pun kembali marak, meski tidak dipungkiri 'semangat perlawanannya' masih menyoal intern kampus. Kenaikan SPP atau pencalonan rektor

misalnya. Sebelum pada akhirnya, di tahun di paruh akhir 1989 dan awal 1990-an ini, gerakan mahasiswa melebar ke masalah-masalah sosial politik. Dari masalah tanah, listrik, Pemilu, SDSB, serta buruh. Sampai pada akhirnya, dan belum lepas dari benak kita semua, penghinaan presiden dan pembreidelan pers.

Pendapat dominan yang menempatkan mahasiswa sebagai *elite* yang strategis dalam perubahan sosial politik, bahkan memainkan di sentral kekuasaan, khususnya di negara yang mengenyam kemerdekaan pasca-perang dunia kedua (meminjam istilah Mochtar Lubis, negara-negara ini dengan semena-mena dan sepihak disebut dunia ketiga). Tidak ada satu penguasa di negeri —yang dianggap sedang berkembang ini— mengabaikan posisi mahasiswa. Malahan, tidak kurang, banyak ilmuwan sosial yang 'sibuk' mengkaji kedudukan mahasiswa dengan segenap sepak-terjangnya.

Identitas sosial tersebut memang bergaung keras terdengar. Hanya saja, jika ditelaah lebih jauh, yang dimaksud 'mahasiswa', dalam pandangan Jack Newfield ibarat *prophetic messenger*, adalah komunitas yang berkehendak untuk selalu ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih ideal. Dan jumlah mahasiswa (khususnya) Indonesia yang berkarakter demikian mulai berkurang jumlahnya. Penyebabnya banyak. Selain masalah sosial-ekonomi yang membelokkan orientasi mahasiswa, tidak kurang upaya negara (pemerintah) untuk membuat sejumlah 'pagar', agar mahasiswa sibuk dengan dirinya-sendiri.

Dari hal itu, harus diakui jujur, *agent of change* yang digembar-gemborkan, seperti mantra sakti yang telah membius mahasiswa untuk tidak berbuat apa-apa. Ia cukup menjadi slogan. Mengapa? Jawabnya, tentu saja, amat bergantung kepada Anda, para mahasiswa. Bukankah peran -peran itu bukan disodorkan, melainkan direbut?

TIM LAPORAN UTAMA

Apa Kata Mereka?

Bukan rahasia lagi, duduk di perguruan tinggi, tepatnya menjadi mahasiswa, memiliki sejumlah harapan. Apa yang diharapkan? Belajar berorganisasi, belajar tanggung jawab, atau merajut masa depan adalah contoh. Berikut adalah kehendak yang membenak di kepala mahasiswa baru 1994.

"Berbeda dengan di SMA, di universitas, saya harus berpikiran dewasa," aku Arif Iryansyah dari fakultas paling bungsu di Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Teknik Industri (FTI), saat ditemui *ParaHyangan*.

Mahasiswa sarat beban sloganistis

Kenapa berbeda Rif? "Soalnya di SMA cenderung berkelompok, *ngegank*. Sekarang jauh berbeda. Oleh karenanya, saya masuk himpunan. Tujuannya selain berorganisasi, juga berkeinginan membangun organisasi mahasiswa di FTI bisa maju seperti organisasi mahasiswa lainnya yang ada di Unpar," jawab laki-laki muda ini bersemangat. "Untung saja, teman-teman seangkatan saya, kompak dan bersahabat. Kita punya ikatan kuat untuk mewujudkan itu. Terlebih kami angkatan pertama. Sebagai cikal bakal, kami punya kebanggaan tersendiri. Paling tidak, saya merasakan pertama kali berdirinya himpunan," tuturnya lagi.

Sementara itu, dalam pandangan Wasisto Priagung, mahasiswa dari fakultas MIPA Unpar, masuk perguruan tinggi berkaitan dengan minat. "Saya merasa cocok, kendati fakultas saya masuki baru berdiri," jawab Priagung. Hanya saja, tambahnya kemudian, bila menegok lembaga kemahasiswaan, kami memang jauh tertinggal dibanding dengan fakultas-fakultas lain yang lebih dulu berdiri. Misalnya dalam program penelitian atau pengabdian pada masyarakat jelas belum sepenuhnya terwujud. Sebab himpunan dan senat mahasiswa juga baru berdiri. "Dalam pencarian jati diri," jelasnya diplomatis,"jadi kami untuk sementara ini memberesi lembaga kemahasiswaan di lingkungan terkecil dulu, baru melangkah lebih lebar natinya".

Lain lagi dengan Linda Iramaya, mahasiswa Fakultas

Ekonomi Unpar yang telah mengeyam kuliah lebih dari tiga tahun, dan sekarang duduk di semester tujuh. Baginya, kuliah perlu diimbangi dengan aktivitas, karena banyak manfaatyang dapat diambil. "Jangan belajar *aja*, kalau belajar *aja* suntuk. Monoton,"tutur staf buletin Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Menurutnya, amat merugi bila kuliah, akivitasnya yang cuma berkutat di acara perkuliahan saja. Kurang mendapatkan hasil belajar yang baik dan pengetahuan tambahan. Berdasarkan pengalamannya berbagai aktivitas yang diikutinya di himpunan maupun senat mahasiswa, gadis yang tampak matang ini mengaku, bahwa semua itu sangat membantunya dalam mengembangkan diri. "Dari sana, saya mencoba berdisiplin diri," paparnya,"dan dengan banyak kegiatan kita bisa mengatur waktu.

"Menurut saya, mahasiswa selama kuliah, harus dapat membagi waktunya untuk kuliah. Namun boleh juga aktivitasnya sekali-kali diisi kegiatan yang rekreatif," ujar Veronika. Gadis cantik yang masih duduk di fakultas hukum semester lima ini lebih lanjut menuturkan, bahwa dalam kuliah pun kita harus memprioritaskan waktu untuk menyelesaikan studi, Dengan begitu, menurut gadis yang akrab dipanggil Vero, karena tidak hanya mengurangi beban biaya kuliah saja. "Dengan usia yang muda, selepas kuliah dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman".

Di pihak lain, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia FT Agustin Fajar menilai peraturan di Unpar cukup ketat. "Tampaknya, disiplin ilmu lebih dipentingkan," ujarnya, "maka lembaga kemahasiswa amaupun unit-unit

kagiatannya kurang menonjol. Tidak seperti SMA dulu yang padat dengan acara-acara kesiswaan," tutur Fajar membandingkan semasa SMA-nya. Disinggung soal keberadaan fakultasnya yang baru (Teknik Industri, Red.), Fajar tidak berkecil hati. "Tidak, karena tanpa kehadiran fakultas baru ini, Unpar akan tidak lengkap bukanlah apa-apa", tandasnya, "sebab, sebagai Unpar sebagai perguruan tinggi, sebagai universitas memerlukan keberagaman disiplin ilmu yang wajib dikembangkan". Hal ini dirasakan pula —sebut saja— Ocky. Selain bangga, ia pun rela meninggalkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. "Saya sejak dulu memang bercita-cita ke sini (Unpar, Red.)," ujarnya. "Dan soal status, bagi saya tidak menjamin kualitas tetapi kualitas lulusan tergantung dari orangnya. Dan hal inilah yang mendorong saya amasuk perguruan tinggi. Ya untuk belajar".

Sementara itu bagi Dian, masuk fakultas ekonomi Unpar didasarkan pada keinginan untuk memberi variasi dalam keluarganya. "Masalahnya di keluarga saya semuanya masuk hukum," ungkap gadis ini. "Dan, yang lebih penting lagi, saya dituntut untuk lebih dewasa. Misalnya dalam mengambil keputusan, saya harus lebih mandiri".

Keberbagaian pendapat yang terlontar tersebut, bagaimanapun, mencerminkan keinginan mahasiswa ketika memasuki perguruan tinggi. Kendati, pada saat yang sama, tuntutan yang ditujukan buat mereka dari masyarakat luas tidak sebatas itu saja. Sebab, bukankah, mahasiswa akan mengisi masa depan negeri ini kelak?

TIM LAPORAN UTAMA

Kuliah = Tidak Bebas (?)

Sosok perguruan tinggi identik dengan kebebasan akademis. Ada kesan, kebebasan akademis adalah kebebasan untuk mengaktualisasikan setiap gagasan. Gagasan yang muncul dibiarkan begitu saja berseliweran. Substansi dari setiap gagasan terjamin keabsahannya, manakala berada dalam lingkaran perguruan tinggi. Dan akhirnya semua itu menghilir pada tuntutan kebebasan yang lebih absolut. Kebabasan dalam berperilaku, kebebasan dalam menentukan target kelulusan, sampai dengan kebebasan untuk lepas dari kungkungan sistem yang ada, adalah dampak dari penafsiran yang salah kaprah tentang kebebasan akademis. Bertolak dari fenomena itu, justru 50.44% mahasiswa baru di lingkungan Unpar tidak merasakan kebebasannya setelah memasuki perguruan tinggi. Alasan utama dari pengukungan tersebut lebih terarah pada hambatan internal yang datang dari beban dan tanggung jawab akademis yang dipikul mahasiswa. Hanya 49,56% yang menemukakan kebebasannya di perguruan tinggi. Itu pun, 50,44% yang menyatakan bentuk kebebasannya hanya sebatas bebas untuk bersosialisasi.

Minimnya panafsiran tentang kebebasan akademis di lingkungan mahasiswa baru Unpar, ada indikasi yang terbaca, mahasiswa saat ini kurang mengetahui siapa dirinya. Ketidaktahuan itu akan berdampak panjang, misalnya ketidakmampuan mengantinsipasi keadaan sekitarnya. (red. lihat Mahasiswa, Riwayatmu Kini). Lambat laun, keadaan ini semakin membuat mahasiswa tertidur, yang kemudian mengambil sikap masa bodoh. Karena itu, mahasiswa baru perlu dibekali orientasi tentang fungsi dan peran perguruan tinggi.

Adanya pemahaman tentang orientasi di lembaga perguruan tinggi, selanjutnya akan akan menggiring kita ke arah pemahaman

Universitas; jaminan masa depan?

Universitas: Pabrik Buruh Terdidik?

Ivan Ilich, dalam bukunya yang termahsyur "*Deschooling Society*", pernah mengisyaratkan 'kejahatan' sekolah yang mengurung kebebasan berpikir, sebagaimana yang diperlihatkan lewat praktik-praktik pendidikan formal. Tidak kurang, termaktub pula didalamnya perguruan tinggi. Dan, semua itu berjalan sistematis.

Dalam pandangan pakar pendidikan Dr. Kartini Kartono, kenyataan tersebut memang masih terlalu membaluti dunia pendidikan kita, bahkan tak terluput perguruan tinggi. "Bayangkan, sejak di SMA, banyak anak merasa kebebasannya mulai berkurang. Waktu mereka dihabiskan melulu untuk menyelesaikan soal-soal yang telah diarahkan. Hal tersebut mengakibatkan *free expression*, ruang berekspresi, menjadi kurang," tambah staf pengajar FISIP Unpar kepada ***ParaHyangan***. Akibatnya, ada yang memberontak, atau lantas yang menyalurkan kelebihan 'energi'-nya di jalanan. Ini yang paling ekstrem. "Dan, ujungnya, sekolah menjadi tidak menarik! Jadi, jangan heran apabila pada saat kelulusan, banyak anak SMA yang merasa terlepas dari keterbelengguan". "Misalnya aksi corat-coret di baju", papar ibu yang dikenali pula sebagai psikolog ini memberi contoh, "bahkan, sampai-sampai menceburkan temannya ke kolam".

Sayangnya, saat duduk di universitas hal itu masih saja berlanjut. Mereka tetap dibelenggu oleh sejumlah aturan yang, bisa jadi, tidak ada hubungannya dengan pendidikan yang ditempuhnya", tutur Kartini Kartono.

"Posisi sebagai mahasiswa, terlebih bagi yang baru masuk di perguruan tinggi, telah memberinya status sosial tersendiri dalam masyarakat," demikian Drs. Peter R. Nelwan, MA. Tapi, menurut psikolog yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha ini, hal tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab di samping kebebasan lain yang diterimanya. Hanya saja, kebebasan yang diberikan tidak sepenuhnya kebebasan mutlak yang tiada batas. "Dari hal itu", ujar lelaki kelahiran Minahasa ini, "konsekuensi apapun, misalnya dengan masuk perguruan tinggi,

tentang makna lembaga perguruan tinggi. Di lingkungan mahasiswa baru Unpar, 59,13% menafsirkan perguruan tinggi sebagai ajang pelatihan bagi kehidupan di masyarakat kelak. Sedangkan 13,92%, dengan memasuki perguruan tinggi kelak dapat menjadi jaminan bagi masa depan.

Sikap idealistik dari pemaknaan lembaga perguruan tinggi terejawantah dalam tujuan mahasiswa saat mengikuti perkuliahan. Dengan mengikuti perkuliahan, 81,74% mahasiswa baru di lingkungan Unpar mengharapkan dapat mencapai cita-citanya. Untuk merealisasikan harapan itu, 40,86% merasa perlunya pembekalan di luar kegiatan perkuliahan, misalnya dengan mengikuti institusi kepentingan, organisasi dan lembaga kemahasiswaan. Sebagai tolok ukur, 55,65% menyatakan target kelulusannya 4, 5 tahun sampai dengan 5 tahun.

Dengan mencermati pemaknaan lembaga perguruan tinggi secara tepat, dapat kita pahami peran dan fungsi dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi semata-mata adalah sebuah institusi yang berupaya menggali potensi-potensi kemanusiaan kita secara utuh berikut nilai-nilainya. Perguruan tinggi bukanlah lembaga jaminan terhadap masa depan kita, ataupun pabrik yang meneluarkan produk siap jadi.

sudah harus siap diterimanya."

Pendidikan pada akhirnya (diandaikan akan) membentuk pribadi dan mental. "Benar, semenjak memasuki Universitas Parahyangan, saya merasa harus berpikir dewasa seperti layaknya insan perguruan tinggi," demikian pengakuan —sebut saja— Anne, mahasiswi baru yang berwajah manis ini kepada ***ParaHyangan***.

Cuma, yang menjadi soal berikutnya adalah, benarkah pendidikan tinggi dapat membuat dewasa seseorang sebagaimana yang diucap Anne —yang, boleh jadi, mewakili teman-temannya, dalam membingkai pandangannya terhadap institusi pendidikan yang tengah dititinya. Sebab, pemerhati dan praktisi pendidikan J. Drost, S.J. (1990) mensinyalir bahwa banyak orang muda yang masuk perguruan tinggi tidak didukung oleh kemampuan belajar yang memadai. "Kenyataan lainnya", papar Drost, "banyak perguruan tinggi yang besar uang pangkalnya berbanding lurus dengan ketidakpintaran mahasiswa. Ini gejala mencolok, ada 'pajak atas kebodohan'".

Semua itu melahirkan kekuatiran atas pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi yang menyimpang. Perguruan tinggi menyimpang dari kesemestian *The Idea of University* yang menyimpan banyak keagungan. Dengan demikian, konsep kata dan bangunan fisik universitas tinggal menyisakan mitos belaka. Ia hanya memperagakan dan menjajakan simbol-simbol kesuksesan bagi mereka-mereka yang memasukinya.

Ujung-ujungnya, perguruan tinggi, khususnya di negara berkembang, mengalami krisis. Krisis tersebut sebagai sangat gamblang diilustrasikan James A. Perkins dalam bukunya *Education and the Development of Man* (1970). Krisis yang dihadapi perguruan tinggi itu sebutlah misalnya krisis angka, keuangan, relevansi pendidikan, bahkan krisis terhadap obyektivitas ilmu. Tapi yang lebih penting, setidaknya bagi Perkins juga mungkin buat kita, krisis angka yaitu 'meledaknya' jumlah lulusan SMA yang ingin memasuki universitas. Partisipasi pendidikan tersebut, di satu pihak memang membanggakan. Namun hal itu akan menyisakan persoalan krusial kelak: lulusan perguruan tinggi banyak dibawah standar. Rasio perbandingan dosen dan mahasiswa tak seimbang, sehingga proses pendidikan tidak intens.

Mengapa hal itu terjadi? Bila kita melongok isyarat yang dikemukakan Dietrich Goldschidt (1983) tentang kecenderungan menguatnya kontrol pemerintah (negara) terhadap perguruan tinggi. Dan, anehnya, banyak perguruan tinggi yang berupaya mengusahakan dirinya 'dekat' dengan pemerintah. Di satu sisi, kita bisa dengan cukup intens membaca perkabaran semisal soal campur tangan negara saat pemilihan rektor. Sedang di sisi lain, ada 'obral' gelar doktor honoris causa dan profesor buat para pejabat negara.

Campur tangan ini membawa hasil: kritik bertubi-tubi dialamatkan ke perguruan tinggi; plus, tentang ketidakmandirian mahasiswa karena terbiasa dicekoki dan disuapi. Atau, paling tidak, kekuatiran atas krisis intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi sebagaimana yang kemarin diapungkan Abdurrahman Wahid, Mohamad Sobari, Mudji Sutrisno, Andrik Purwasito, Emha Ainun Nadjib, dan sejumlah intelektual adalah contoh. Setidaknya, hal itu menyiratkan betapa perguruan tinggi sulit memenuhi harapan untuk menjadikan seseorang agar lebih dewasa dan berkemampuan.

Lulusan universitas; dilema mutu dan kuantitas

Titipan harapan yang, boleh jadi, terlalu berlebihan terhadap perguruan tinggi tersebut, agaknya, tidak lahir begitu saja. Sebab, sejarah pendidikan tinggi di Indonesia, pada mulanya (semenjak kolonial Belanda) tidak ditujukan semata-mata untuk 'kepentingan pendidikan', melainkan untuk mencipta *human resources* (sumberdaya manusia, SDM) yang murah dari kalangan *boemi poetera*. Kalau dulu mereka bakal dijadikan carik, juru tulis dan pamong praja bagi pemerintah kolonial, jangan-jangan

sekarang mereka adalah para sarjana yang 'disodorkan' agar jadi baut bagi mesin-mesin industri moderen kita.

Mochtar Buchori, peneliti senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), menjelaskan tentang perbedaan yang signifikan antara 'konsep pendidikan' dan 'konsep pengembangan SDM'. Kedua istilah ini, oleh banyak kalangan, dianggap 'setali tiga wang', tidak berbeda. Tapi sebenarnya tidak.

"Pendidikan adalah kegiatan kultural," demikian papar pakar pendidikan ini, "sedangkan pengembangan SDM dapat dipandang sebagai istilah ekonomi". Kendati konsep di balik kedua istilah tersebut mengacu kepada upaya penggalian potensi yang ada dalam diri manusia. Hanya saja, pendidikan lebih menekankan kepada *basic*, sedangkan pengembangan SDM lebih bersifat praktis dan analitis. Karenanyalah, mungkin, keberadaan universitas tetap harus membangun jarak terhadap pendirian BLK (Balai Latihan Kerja) di banyak tempat.

Dari uraian itulah, bila pendidikan dipandang sebagai sarana untuk menciptakan SDM, harapan itu boleh disebut berlebihan. Ini bagaimanapun akan berujung kepada kekecewaan. Tidak heran bila Tonny D. Widistomo (1990) melihat: apabila semua orang mengandalkan perguruan tinggi sebagai tempat untuk mendapatkan bekal sebelum bekerja, maka itu berarti perguruan tinggi diharapkan menjadi pabrik segala kebutuhan. Perguruan tinggi dipaksa mampu melahirkan ilmuwan yang hebat sekaligus profesional. Itu maunya. Tapi kenyataan menunjukkan lain. Profesionalisme lulusan tidak tercapai. Kehebatan di bidang akademis jauh dari jangkauan. Jadi, patut dicatat baik-baik, terserah mau digarisbawahi atau di-*stabilo*-i, seseorang menjadi mahasiswa dan belajar di perguruan tinggi semestinyalah tidak pertama-tama meniatkan dirinya selepas itu akan sebatas menjadi 'buruh'.

Wajah buram macam begini inilah yang terlanjur pekat melekat dalam praktik pendidikan tinggi kita. Beranjak dari kegelisahan demi kegelisahan yang selalu saja menyeruak di setiap generasinya, termunculkan pertanyaan: bagaimana kita mengubah semua itu?

Ruang kuliah; rutinitas sebuah sistem

Sementara itu, seorang kawan mahasiswa —sebutlah Prasetyo Pribadi— yang meyakini dirinya cukup cerdas, menawarkan sebuah jawaban. Begini: ubahlah dulu sistem sosial dan budaya kita yang kini melulu mengkalkulasi segalanya dalam nilai untung dan rugi, baru kemudian pastilah dunia pendidikan kita bakal berangsur-angsur berubah! Pasalnya sederhana, ujarnya, karena biar bagaimanapun pendidikan harus diakui sebagai sebuah proses sosialisasi dari sebuah sistem kebudayaan. Artinya, ia selalu saja ada di bawah determinasi nilai-nilai sosial yang secara kongkret hidup dalam masyarakatnya. Ia ada untuk mewariskan setiap nilai yang diyakini sebagai baik oleh masyarakat kontemporer bagi generasi berikutnya. Jadi, ubahlah dulu sistem sosial masyarakatnya!

Tapi, seorang kawan mahasiswa dari IKIP Bandung yang enggan disebut jati dirinya, tapi *ngotot* mengatakan dirinya memiliki tradisi pedagogik, menawarkan jawaban lain. Sebaliknya: ubahlah sistem pendidikannya, maka masyarakatnyapun pelan-pelan akan berubah! Alasannya, pendidikan adalah sebentuk investasi futuristik dari sebuah sistem sosial. Artinya, dari sanalah digodok rancangan sosok masyarakat generasi berikut. Hitam, putih atau merahnya masyarakat sepuluh dua puluh tahun ke depan bakal tergantung dari apa yang tengah ditanam di ruang-ruang kelas kita hari ini. "Maka, kalau masih berharap bakal terjadi perubahan sosial, tentu saja ubah dulu sistem pendidikan kita sedari sekarang!", tandasnya dengan semangat.

Kedua versi tawaran jawaban di atas, terlepas mana yang tengah terjalani saat ini, justru menyuguhkan lingkaran setan. Mana yang harus lebih dulu diubah: sistem pendidikan-kah atau sistem sosial masyarakat-nya? Sama saja mempertanyakan: mana yang lebih dulu ayam atau telur? Agaknya, satu-satunya jalan menyelesaikan lingkaran setan adalah (tampaknya) menangkap 'setan'-nya.

Tapi, biar bagaimanapun, dua jawaban di atas amat patut diagendakan sebagai pekerjaan rumah, sembari kalau mungkin (!) kita bisa menangkap 'setan'-nya.

TIM LAPORAN UTAMA

Rektor Universitas Katolik Parahyangan A.P. Sugiarto:

"Saya Bukan Penyelamat, Bukan Superman..."

Tak ada rotan akar pun jadi. Agaknya pepatah ini tepat untuk menggambarkan sosok A.P. Sugiarto. Setidaknya, pemilihan rektor yang baru saja usai menyiratkan demikian. Kendati begitu, nada suaranya masih saja merendah. Pun, sejak ia diberi kepercayaan menjabat sebagai rektor Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), periode 1994-1997.

"Harmonisasi adalah konsep kerja saya", akunya saat ditanya ***ParaHyangan*** *soal prinsip hidupnya. Maka, tak mengherankan saat Unpar "diterpa badai" beberapa waktu lalu, pria yang mengabdikan diri ke Unpar semenjak tahun 1965 mampu merangkul berbagai pihak. Ditangannyalah perpecahan terhindarkan. Namun, toh, ia masih saja mengelak, kalau dianggap sebagai 'penyelamat' Unpar.*

Sambil ditemani tiga ekor anjing choco kesayangannya, bincang-bincang dengan A.P. Sugiarto kian hangat saat secangkir teh dihidangkan. Rentang waktu dua jam lebih tak terasa. ***ParaHyangan*** *mengemas bincang-bincang tersebut*

Saat ini, kebersamaan didengung-dengungkan di Unpar. Adakah niatan tertentu di balik itu semua bagi pengembangan institusi ini?

Masalah kebersamaan hendaknya kita pahami. Mengingat, persaingan kiri kanan di PTS kian ketat. Laju persaingan tetap saja ada. Dari situasi ini, misalnya dengan 15 fakultas dan 30.000 mahasiswa, timbul pertanyaan bagaimana peranan Unpar. Akan dibawa kemana mahasiswa Unpar ? Bisa saja Unpar ini besar dari segi kuantitas. Konsekuensinya, masalah yang kita hadapi akan semakin besar pula. Walaupun Unpar kecil, , yang kita inginkan Unpar tetap *excellent* di tengah kancah persaingan, sehingga kita tetap diperhitungkan. Seandainya Unpar pun kita buat besar dari segi kuantitas, dananya dari mana?! Kalau kita larut dalam persaingan tersebut, kita akan semakin terjebak. Kita tak boleh melupakan, sebagaian besar dana pengembangan di Unpar berasal dari saku mahasiswa. Apa kita tega menghantam mahasiswa kita sendiri! Dari sejarahnya, patut disadari, Unpar punya misi. Kita punya komitmen terhadap orang-orang miskin. Kalau tidak kita pahami bersama, bisa jadi kita akan sewenang-wenang. Jadi kita harus memperhatikan aspek kebersamaan. Persepsi ini sebaiknya disosialisasikan di lingkungan Unpar.

Lantas, upaya apa yang anda lakukan?

Ya, Kita mengadakan pendalaman dan pemahaman bersama sesuai dengan statuta yang berlaku di Unpar.

Konkretnya?

Semua lapisan kita turut libatkan, sehingga misi dan visi kita bisa kita jalankan bersama. Mudah-mudahan dengan cara ini akan lebih memudahkan kita dalam memahami perbedaan yang kita miliki. Misalnya, dalam keimanan kita menjadi saksi dari keimanan kita masing-masing, yang kita sadari memang berbeda. Kita di Unpar ini tidak menyandarkan agama, *iya toh*. Tapi kita tetap menjadi saksi, saksi yang diajarkan oleh iman kita masing-masing. Dari perbedaan ini, justru kita mengambil nilai-nilai positifnya. Norma-norma yang ada tetap kita pelihara. Ini *kan* misi, yang sekaligus menjadi visi kita bersama. Jadi silakan bersaing dalam menjalankan kebaikan.

Kalau begitu perlu ada forum untuk mengkomunikasikannya?

Ya, umpamanya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, yang formil maupun yang tidak. Tidak usah tegang dan terlampau resmi. Yang terpenting adalah jalinan komunikasi interpersonal yang harus kita hidupkan.

Misalnya dengan forum dialog dengan pihak mahasiswa...?

Bisa seperti itu. Kita akan memberikan informasi yang lebih

terbuka ke mahasiswa, melalui SMU. Untuk membentuk suatu perubahan kita perlu proses. Saya ini bukan Napoleon. Jadi jamgan mengharapkan suatu ledakan-ledakan, loncatan-loncatan spektakuler. Tapi bagi saya,yang paling utama adalah stamina, semangat, dan motivasi berdialog ini jangan sampai padam. Upaya dialog yang sehat akan terus saya hidupkan

Terpilihnya A.P. Sugiarto sebagai rektor Unpar, bukan tanpa hambatan. Beberapa kalangan meragukan kepemimpinannya kelak sebagai rektor. Apalagi dengan gelar akademis strata 1. Bagaimana mungkin bapak dari lima putra ini mampu memimpin sidang senat guru besar, yang nota bene sebagian besar bergelar profesor dan doktor! Toh, itu semua bukanlah hambatan yang berarti. Berbekal pengabdian selama 29 tahun, suami dari Maria Theresia Purnamawati, paham betul seluk beluk, bahkan filosofi Unpar. Dengan tempaan pengalaman yang panjang, A.P. Sugiarto menganggap Unpar adalah rumah keduanya. Hal itulah yang memotivasinya untuk lebih banyak berbuat bagi almamaternya.

Kembali ke persoalan pemilihan rektor Unpar, bisa anda ceritakan mekanismenya

Pada intinya begini, Yayasan maupun universitas mencari calon. Tentang bagaimana mencari calon ini, *Wah*, jangan tanya saya. Saya tidak mengerti untuk hal ini. Calon bisa berjumlah banyak, tetapi nantinya hanya tiga yang diturunkan. Nah, bagi universitas, caranya mencari calon, semua anggota senat berhak mencalonkan atau dicalonkan. Terserah siapa saja. Memang lebih diutamakan bagi orang dalam.(di lingkungan Unpar. red). Setelah itu, calon dari anggota senat —dalam amplop tertutup— diserahkan ke Yayasan. Selanjutnya, calon dari Yayasan dan universitas diolah, kemudian diturunkan menjadi hanya tiga calon. Setelah menemukan ketiga calon, senat universitas memberikan pertimbangan tentang kondisi ketiga calon tersebut. Senat universitas tidak memutuskanan. Pertimbangan yang dimaksud harus kualitatif artinya bukan si A dapat suara berapa si B dapat suara berapa, tapi kualitasnya yang

dipertimbangkan. Kualifikasi calon itu begini, bukan mana yang lebih pintar, akan tetapi calon-calon tersebut hendaknya sejalan dengan panggilan jaman. Dengan kata lain, figur siapa yang paling dibutuhkan jaman. Secara pribadi, menilai, jabatan rektor bukan puncak karir kepemimpinan struktural saya. Melainkan, sekali lagi, sebagai panggilan jaman saja. Dengan demikian saya harus mengantisipasi situasi empat tahun yang akan datang. Mungkin, empat tahun mendatang membutuhkan figur pemimpin yang sama sekali tidak sama dengan situasi sekarang.

Kalau begitu, anda dicalonkan sebagai rektor Unpar karena jaman menghendaki figur pemimpin seperti anda?

Barangkali seperti itu, ha..ha..ha..

Seperti yang anda katakan barusan, Yayasan memiliki 3 calon. Apakah sebelum tiga calon resmi itu diajukan, Yayasan meminta pertimbangan dari senat universitas?

Oh, tidak

Jadi calon yang berasal dari Yayasan tidak perlu mendapat pertimbangan dari senat universitas?

Tidak, karena dalam PP 30 yang mengangkat dan memberhentikan rektor adalah Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat universitas.

Jadi anda didukung oleh senat universitas dan Yayasan?

Barangkali ya.

Mekanismenya seperti apa?

Pakai musyawarah.

Apa yang mendorong anda untuk mencalonkan diri sebagai rektor?

Wah, maaf kalau saya sedikit sombong. Saat itu saya ditanya apakah sanggup atau tidak jadi rektor. Sesungguhnya saya tidak terlalu berambisi untuk menjadi rektor. Tapi karena saya diajukan atau dicalonkan. maka saya tidak berani menolaknya. Kalau saya boleh memilih, saya lebih baik jadi pembantu rektor III. Saya ingin membina kaum muda. Itu pilihan saya. Tetapi karena desakan dari berbagai pihak, akhirnya, biarlah saya dicalonkan, dan bukan mencalonkan diri. Obsesi saya, saya hanya ingin memperjuangkan kemajuan universitas ini, apapun jabatan saya. Kasarnya, jadi komandan satpam pun saya mau, yang penting kiprah saya, loyalitas saya untuk berjuang bisa tersalurkan, asal gajinya saja tidak diturunkan, ha..ha..ha..ha. Ya, kalau bisa gajinya lebih besar dari jabatan rektor.

Ditinjau dari misi dan misi yang diemban Unpar, bagaimana anda menjelaskan tentang gaya kepemimpinan anda?

Ya, saya usahakan

konsekuen dengan apa yang telah dimandatkan oleh Yayasan.

Bagaimana dengan peningkatan mutu dosen?

Peningkatan mutu sumber daya manusia memang bukan slogan asal jadi. Hal ini memang mutlak untuk ditelaah lebih jauh. Jadi, sebuah universitas, tanpa peningkatan dosen-dosen akan tidak bermutu. Maka, peningkatan sumber daya manusia, dosen, managerial skill, para pemimpin struktural, dan sebagainya, hendaknya diperhatikan.

Caranya?

Kita coba memotivasinya, misalnya supaya sebelum mengajar dosen-dosen punya persiapan yang baik. Paling tidak, untuk meningkatkan mutu, misalnya dapat ditempuh dengan mengikuti program belajar, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, para dosen hendaknya diberikan kesempatan mengikuti penataran-penataran dan berbagai seminar. Tapi, dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban mengajar. Jadi, diupayakan dengan pengaturan waktu yang baik, dosen-dosen kita mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

Kesejahteraan dosen itu apakah sudah memadai?

Wah, itu relatif. Kalau kita membandingkan dengan universitas lain, mungkin lebih kecil. Bisa jadi, di universitas lain lebih hebat. Tapi bagi saya, sistem yang lebih penting. Jadi bukan bukan gajinya. Meskipun gajinya besar orang juga nggak seneng kalau sistemnya buruk. Sistem juga harus memberikan kesejukan bagi setiap dosen.

Bagi karyawan sendiri, bagaimana kesejahteraannya?

Kesejahteraan tidak hanya soal gaji,melainkan seluruh perlakuan, kesempatan untuk berkembang.

Langkah apa yang anda ambil?

Saya akan menyamakan persepsi saya terhadap situasi konkrit, paling tidak sampai tingkat pembaharu Unpar sekarang. Tidak usah membuat perubahan baru. Tentunya saya mengharapkan masukan dari semua pihak yang ada di Unpar. Saya termasuk tipe orang yang mau maju bersama-sama. Saya ingin jadi figur pimpinan yang kolektif. Saya menyadari kelemahan dan kekurangan saya. Kita harapkan pimpinan kolektif ini tidak terlampau santai dan loyo, melainkan tetap dinamis. Saya tidak bisa melejit sendiri karena saya bukan Superman.

Untuk tahun pertama sepertinya anda gencar melakukan konsolidasi?

Bisa jadi begitu.

Menurut anda, mahasiswa ideal versi Unpar itu seperti apa?

Wah, itu gampang. Mahasiswa yang ideal tentu saja yang bisa memilih diri sendiri untuk jadi orang yang diteladanai dan jadi harapan masyarakat. Secara sederhananya, mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang pintar. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang diharapkan dapat mengangkat tingkat peradaban. Jadi output-nya nanti, minimal menguasai profesi bidang yang digelutinya. Mahasiswa ideal juga harus berorientasi pada kepentingan umum. Sehingga, orang batak jangan terlalu fanatik kebatakannya. Orang Islam jangan terlalu fanatik keislamannya. Disini proses indonesianisasi diperioritaskan. Sehingga, mahasiswa setelah belajar selama lima tahunan lebih bisa jadi orang Indonesia yang benar. Proses Indonesianisasinya berhasil atau tidak, ini menyangkut kepentingan bersama. Mahasiswa Unpar diharapkan mampu menjadi orang pintar, yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing, berorientasi nasional, dan orientasi yang global.

Jadi mahasiswa ideal adalah mahasiswa yang baik dari segi akademis yang sekaligus berorientasi ke depan?

Ya, Kira-kira demikian. Yang penting kita harus memperhatikan prosesnya, selaras dengan kondisi di Unpar. Saya harapkan mahasiswa sudah memahaminmya. Mahasiswa harus sudah mengerti sistem yang berlaku di Unpar. Katakanlah dalam proses mengejar SKS. Kejarlah SKS, namun itu tidak berarti meninggalkan kegiatan lainnya. Dalam hal ini boleh-boleh saja mahasiswa aktif di kopma, misalnya. Bahkan cuti satu tahunpun diperbolehkan, misalnya ingin mendalami bahasa, menguasai keterampilan lainnya, atau ingin bepergian dulu ke luar

negeri. Namun jangan lupa, sistem belajar di perguruan tinggi itu mempunyai target. Ibarat kereta api, kalau anda mau bepergian dari Bandung ke Surabaya jadwal pemberangkatannya jam 08.00, anda jangan datang pukul 08.30. Itu kereta apinya sudah sampai dimana, dan anda tidak bisa berteriak-teriak menyuruh kereta api untuk kembali lagi. Tidak mungkin itu. Begitu pula dengan belajra di perguruan tinggi

Adakah hal-hal khusus dari anda untuk mendorong mahasiswa?

Saya ingin mekanisme yang benar. Antar dosen wali dan mahasiswa misalnya, mereka bisa berdialog tentang apa saja yang menyangkut kepentingan mahasiswa, juga antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Hindari kesenjangan. Janganlah kita menciptakan perkawanan yang ekslusif. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang di rumahnya jadi tumpuan harapan keluarga. Mahasiswa tersebut berasal dari status keluarga, dimana ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Ibunya seorang penjaja kue yang penghasilannya minim. Nah, terhadap mahasiswa seperti ini anda harus menaruh kasihan. Jangan lalu karena dia tiddak ikut kegiatan, anda anggap tidak solider. Tapi bantulah. Katakanlah, anda misalnya brersama rekan-rekan yang lain mengumpulkan uang untuk membantunya. Dari satu orang mengumpulkan Rp 1000, dan rekan anda berjumlah 30, kan cukup untuk anda ajak ikut piknik atau ikut kegiatan. Saya juga ingin menciptakan mekanisme yang rasional. Rasional di sini dapat dicontohkan seperti ini : di Unpar kan tidak ada fakultas nuklir Kapal Terbang, anda jangan tiba-tiba ingin membuka kursus jadi pilot. Kita harus tahu posisi kita sendiri.

Mungkinkah dukungan khusus berbentuk dialog?

Dukungan yang saya maksud dapat berupa tanggapan positif, yakni tanggapan positif terhadap pemikiran mahasiswa. Saya ingin para pembina kemahasiswaan di Unpar ini dapat memahami tugas ini.

Termasuk mahasiswa yang gemar melakukan aksi unjuk rasa?

Mereka boleh saja demo. Mereka boleh ngomong-ngomong sampai berkali-kali, silahkan. Kalau hanya sekedar berbeda pendapat, itu boleh-boleh saja. Sebagai manusia dewasa boleh mempunyai pandangan sendiri-sendiri. Tapi harus melalui aturan yang benar. Anda misalnya, tidak bisa menandatangani sebuah deklarasi atas nama Mahasiswa Unpar. Dari mana anda mendapatkan hak tersebut.

Jadi ada aturan mainnya?

Ya, *dong*. Kalau saudara mengagumi komunisme, silahkan saja, tapi berdiri sendiri. Itu kan kebebasan berpendapat.

Malam kian larut. Tiga ekor anjing choco tertidur pulas. Tanpa terasa tegangan pembicaraan mulai melemah. Di balik bingkai kacamatanya, sosok mantan seminaris yang pernah mengecap pendidikkan seminari di Yogya selama 11 tahun, masih tangkas bicaranya. Apalagi jika berbicara soal pengalaman hidupnya.

Apa prinsip hidup anda?

Saya selalu menerima keadaan saja. Saya tidak agresif. Yang saya rasakan, kalaupun saya sudah merasa putus asa, ada campur tangan Tuhan.

A.P. Sugiarto sempat aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Tahun 1964 - 1965, ia diberi kepercayaan masyarakat Kampung Cibunut sebagai ketua Taruna Karya. Di bidang politik, A.P. Sugiarto termasuk dari beberapa tokoh angkatan 1966. Sejak 1965 - 1967, ia pernah rangkap menjabat sebagai Dewan Mahasiswa Unpar, Ketua Aksi Mahasiswa Komisariat Unpar, dan dipercaya sebagai Presidium KAMI Konsulat Bandung

Bagaimana pesan anda untuk Civitas Akademika Unpar ini?

Saya berharap semua yang terlibat di Unpar baik dosennya, mahasiswanya, petugas BAAK-nya, dan lain-lain bisa membesarkan Unpar ini secara bersama-sama.

Pasaribu Ari, Yenny Itanaya, Aum Muharam

Perguruan Tinggi di Tengah Mitos yang Mencantelinya

Tugas Suprianto

Ada *kejumawaan* perguruan tinggi (baik universitas maupun institut) yang, barangkali, tidak disadari sebagai 'kejumawaan'. Diskursus apapun yang menyoal perguruan tinggi akan menempatkan lembaga ini sebagai institusi suci pengemban *agen of culture, agen of change,* mempunyai otoritas yang tidak dapat dijamah siapapun (sekalipun dari pusat kekuasaan), hingga peran-peran lainnya yang *wah,* adalah misal.

Tetapi mitos-mitos itu akan dapat rontok seketika, dan 'kejumawaan' itupun perlu ditengok ulang, seumpama kita menyodorkan gagasan yang dikedepankan Theodore Schultz, bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia *(human resources)* yang akan menopang pertumbuhan ekonomi negara. Apa yang diungkapkan Schultz ini sebermula pada penelitiannya atas pelaksanaan pendidikan di Amerika Serikat. Schultz pun kemudian membuktikan, bahwasanya banyak negara yang mengenyam kemerdekaan pasca-1945 ternyata terpukau untuk turut mempraktikkannya dalam pelakasanaan pendidikan nasionalnya (tidak terkecuali pelaksanaan pendidikan tingginya).

Agaknya pendapat itupun akan melahirkan (menyisakan?) pertanyaan panjang, sekurang-kurangnya untuk kasus perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, yakni: Masih adakah perguruan tinggi mempunyai otonomi dengan segenap niatan luhurnya seperti yang sering kita dengar dengungannya? *Toh,* pada kenyataannya, mitos tersebut hanya 'berhenti' sebagai sesuatu yang 'menghibur' dan 'melegakan' penghuninya; atau, untuk tidak menyebut, perguruan tinggi lebih banyak berpihak dengan kehendak besar yang ada di luar dirinya. Pasalnya, kita cukup banyak menyaksikan sejumlah kebijakan negara terhadap pendidikan tinggi, mulai dari kehendak menjadikan produk perguruan tinggi sebagai manusia analisis sebagaimana yang tertuang dalam NKK/BKK maupun

model *link & match*-nya Wardiman Djojonegoro.

Mekanisme pelaksanaan pendidikan seperti di singgung di atas, yang kemudian lebih dikenal sebagai teori *Human Capital,* untuk kasus Indonesia, mengalami pelebaran dan tidak berhenti di sana. Para 'penghuni' perguruan tinggi tidak sekedar aset belaka, melainkan telah menjadikan pendidikan (tinggi) sebagai sesuatu yang elitis, sekaligus sebagai seleksi awal yang mempunyai kekuatan untuk 'menjustifikasi' seseorang yang mengenyam pendidikan (dengan disiplin ilmu tertentu misalnya) merupakan tenaga terdidik dan terlatih.

Pendidikan tinggi menjadi *privilege* yang berdampak pada pencapaian stratifikasi sosial tertentu di tengah-tengah masyarakat: simbol formal yang akan menjadikan diri seseorang dengan segenap *social cost* dan *individual cost* yang cukup tinggi.

Dan, dengan cara pandang seorang awam, tulisan yang jauh dari lengkap ini mencoba melihat kecenderungan yang terjadi dalam dunia pendidikan (khususnya perguruan tinggi), terutama setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan. Bagaimana, misalnya, dua wajah yang berseberangan substansinya (yang tidak jarang tarik-menarik sekaligus paradoksal) kerap ditampakkan perguruan tinggi di satu pihak. Sementara itu, di pihak lain, bolehlah untuk disebut sebagai meta-analisis terhadap sejumlah kebijakan yang diberlakukan negara yang ditujukan kepada perguruan tinggi. Termasuk usaha yang telah dilakukan dengan perumusan mitos-mitos (yang kemudian) dicantelkan kepada perguruan tinggi; adanya penahbisan-penahbisan identitas sosial

mahasiswa, termasuk peran sosial politik yang lekat ditempelkan kepada mahasiswa.

Semua itu, pada hakikatnya, berpangkal dari persoalan yang dihadapi negara, khususnya kesulitan perekonomian yang membutuhkan pembenahan segera, sehingga pendidikan (baca: perguruan tinggi) menjadi aset yang patut diperhitungkan keberadaannya tatkala negara berkehendak menyegerakan kemajuan perekonomiannya. Pendidikan telah menjadikan manusia sebagai aset sekaligus investasi sebagaimana bentuk kapital yang lain (modal uang, teknologi, tanah, dan lain-lain); pendidikan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya mengatrol pertumbuhan ekonomi negara.

Tentang Pembangunan

Mitos memang erat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali bernegara. Mitos dapat lahir (baca: dihadirkan) karena peristiwa yang menjadi fakta, tetapi tidak jarang mitos dibangun tanpa harus diberangkatkan dari peristiwa. Dan, pada akhirnya, mitos dapat menjadi kekuatan dahsyat sebagai 'energi' atau kekuatan moral.

Sebagaimana kita mahfumi, tahun-tahun 1966 menjadi bagian tidak terpisahkan untuk menjadi ilham bagi pemerintah untuk menciptakan mitos tentang perguruan tinggi, khususnya tentang dunia kemahasiswaan: para mahasiswa tahun 1966 disebut-sebut sebagai 'pendekar' yang menumbangkan rezim kekuasaan. Mitos tentang mahasiswa 1966 itulah yang kemudian diwariskan dari masa ke masa (hingga kini). Peranan macam itulah yang patut dikerjakan kalangan perguruan tinggi. Kendati, dalam pandangan Marsilam Simanjutak, salah seorang tokoh eksponen 1966, sebenarnya peranan perguruan tinggi (mahasiswa) kecil; yang banyak berperan adalah militer (ABRI).

Hanya saja, persoalannya kemudian adalah, pertautan peranan perguruan tinggi saat tahun 1966 dengan sekarang hanyalah cukup berhenti pada mitos-mitos saja. Soalnya, sebelum 1966 (yang dinamai sepihak menjadi Orde Lama, dan selalu mempunyai konotasi buruk) dan sesudahnya (dinamai Orde Baru yang siap memperbaiki kesalahan Orde Lama) didengung-dengungkan bahwa: antara dua orde itu jauh berbeda. Di dalam kerangka Orde Baru, semuanya harus bahu-membahu membangun. Masa Orde Baru adalah *pembangunan.*

Calon cendikia; banyak mitos yang mencantelinya. Repro.dok. Tempo

Maka, pilihan yang disediakan, termasuk untuk kalangan perguruan tinggi, adalah 'turut serta dalam pembangunan'. Peran macam demikianlah yang disediakan. Kendati, pada saat berbarengan, mitos-mitos tentang perguruan tinggi tetap tidak lupa untuk tetap dicantelkan. Mereka adalah 'harapan bangsa', 'calon pemimpin di masa depan', 'agen moderenisasi', atau 'fungsi kontrol sosial'. Tetapi yang jelas, peranan perguruan tinggi termasuk didalamnya (tentu saja) mahasiswa, adalah menyiapkan diri untuk turut 'menyukseskan pembangunan'. Bila tidak bersetuju dengan kehendak besar yang telah ditentukan negara, reaksi atau cap yang ditempelkan, adalah 'ditunggangi pihak ketiga'.

Dalam posisi demikian, pemerintah selalu berposisi benar. Merekalah yang merumuskan 'skenario' tentang apa dan bagaimana perguruan tinggi. Upaya itu dilakukan pula dalam penunjukkan rektor perguruan tinggi pun sudah dibuat demikian sentralistis: misalnya dipilih presiden (kepala pemerintahan); bahkan, produk yuridis yang mengatur perguruan tinggi sebagaimana dituangkan dalam PP 30 Tahun 1990, usulan pencalonan rektor sebuah universitas atau institut (di)-boleh-(kan) oleh menteri di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kenyataan tersebut melahirkan banyak pendapat yang mengatakan bahwa, posisi perguruan tinggi seperti di atas merupakan bentuk dominasi (hegemonik) dari negara (pemerintah), sehingga perguruan tinggi pun diharuskan tunduk oleh semua kebijakan yang diberlakukan negara. Ilustrasi sederhana menggamblangkan hal itu, misalnya, adanya dualisme pengaturan aktivitas di perguruan tinggi. Di satu sisi, produk yuridis yang diperuntukkan untuk perguruan tinggi (PP 20 Tahun 1990) menyebutkan setiap universitas dan institut mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan aktivitas ilmiah tanpa harus dicampurtangani pihak lain. Namun, di sisi lain, mau tak mau, sejumlah aktvitas ilmiah apapun yang akan dilakukan perguruan tinggi diwajibkan mendapat ijin dari pihak lain di luar dirinya (semacam Ditsospol Depdagri

dan kepolisian). Lembaga ini dapat menentukan laik-tidaknya aktivitas yang akan dijalankan perguruan tinggi, bahkan —tidak jarang— membatalkannya. Alasannya selalu diacukan kepada kehendak besar yang ditetapkan negara: "Negeri ini sedang melaksanakan *pembangunan*, sehingga segala sesuatunya harus mengabdi ke sana (!)".

Dominasi negara yang demikian hegemonik ini, memang terbukti dengan jauhnya kalangan perguruan tinggi dari hiruk-pikuk politik, sehingga fungsi perguruan tinggi tetap sebagai penyedia *human resources* bagi negeri yang membangun ini, *output* perguruan tinggi adalah aset. Horison pemikiran ini sedikit banyak telah membingkai kerangka berpikir di hampir civitas akademika perguruan-perguruan tinggi Indonesia.

Hanya saja, hal yang kerap dilupa, pilihan pendidikan yang diabdikan dan dilekatkan dengan bingkai ekonomi bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dengan sejarah pendidikan tinggi di Indonesia. Sebermula politik etis awal abad XX yang diniatkan untuk menciptakan tenaga kerja murah dari kalangan *boemi poetera* melalui pendidikan dari segala jenjang, pemerintah kolonial Belanda 'salah berhitung'.

Sebab, sebagaimana dipaparkan Raymond Kennedy, seorang pakar politik yang cukup intens mengamati hubungan pendidikan dan politik bahwa: "Pendidikan adalah dinamit." Jadi tidak heran, lanjut pakar politik dan pendidikan sebelum Perang Dunia II ini, banyak negara dapat merebut kemerdekaan setelah sebagian bangsanya mengenyam pendidikan (tinggi). Pendidikan telah memberi kesadaran yang luas bagi bangsa-bangsa yang mengalami kolonialisme akan hakikat kemanusiaan dan makna kemerdekaan. Niatan pemerintah kolonial untuk mencetak tenaga kerja melalui pendidikan ternyata tidak sepenuhnya tercapai. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pendidikan menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial sendiri, utamanya setelah cukup banyak cerdik-cendikia yang mengenyam pendidikan tinggi di negara asal penjajah.

Sebagaimana ditampakkan sejarah, hampir semua negara yang memproklamirkan kemerdekaan dari kolonialisme pada masa-masa 1945-an, lebih banyak dilakukan oleh cerdik pandai (dengan tanpa menafikkan elemen masyarakat lainnya). 'Dinamit' yang meledak tersebut merupakan 'hukum kausalitas'. Jenjang pendidikan turut menentukan kebutuhan batin seseorang; jenjang pendidikan selalu beriringan dengan tuntutan lain. Bagi Indonesia, apa yang digambarkan Kennedy terilustrasi gamblang: negeri zamrud katulistiwa ini mengenyam kemerdekaan setelah sejumlah orang mengenyam pendidikan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Belanda, baik di Hindia Belanda sendiri maupun yang di Negeri Belanda sana.

Artinya, kehendak besar untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari teknokratisasi kalangan perguruan tinggi demi ekonomi dan industrialisasi, sedang praktik pendidikan lebih banyak pada 'penciptaan slogan-slogan gagah', tidak bisa tidak, akan melahirkan 'dinamit' yang siap 'meledak' di kemudian hari.

Penulis mantan Pemimpin Umum Surat Kabar Mahasiswa ISOLA POS IKIP Bandung.

Mana Benangmu Aryadne?

B. Arief Sidharta

Setiap orang mempunyai pelbagai kebutuhan, kepentingan, nilai dan harapan yang ingin diwujudkan. Dalam usaha untuk mewujudkannya, tidak jarang terjadi konflik. Untuk mencegah terjadinya konflik dan untuk menyelesaikan konfik jika sudah terjadi, di dalam masyarakat melalui pelbagai cara terbentuk pelbagai kaidah prilaku.

Kepatuhan dan penegakan kaidah-kaidah itu tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas masing-masing warga masyarakat. Sebab jika diserahkan pada kemauan bebas masing-masing, yang kuatlah yang selalu menang. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada orang yang dapat menjalani kehidupannya secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Sebab, orang yang kuat pun pada suatu saat akan menjadi lemah atau sakit dan akan selalu ada yang lebih kuat.

Karena itu, di dalam masyarakat terbentuk kaidah-kaidah hukum yang kepatuhan dan penegakannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas warga masyarakat, melainkan terorganisasi secara institusional.

Pembagian Fungsi

Untuk menyelasaikan konflik-konflik antar warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dibentuklah lembaga atau badan pengadilan. Fungsi pokok pengadilan adalah menyelesaikan konflik-konflik secara objektif-imparsial (tidak memihak) dan adil manusiawi berdasarkan kaidah hukum. Pengemban fungsi peradilan ini disebut hakim.

Pada umumnya, dalam perkara perdata yang dapat mengajukan konflik (perkara) kepada hakim adalah pihak yang terlibat sendiri dalam konflik itu, sedangkan dalam perkara pidana adalah jaksa sebagai wakil negara. Dalam perkara perdata, para pihak dapat diwakili oleh advokad, dalam perkara pidana maka pihak yang diperkarakan secara pidana oleh jaksa dapat didampingi oleh advokad sebagai pembelanya.

Dengan demikian, dalam pengorganisasian penyelesaian konflik secara formal itu terdapat pembagian tugas atau fungsi. Pembagian fungsi itu dengan sendirinya dan memang dimaksudkan untuk memunculkan pengawasan melekat (*built-in control*; pengawasan internal atau sistemik), yang terarah untuk menjamin dan memungkinkan hakim menjatuhkan keputusan secara objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
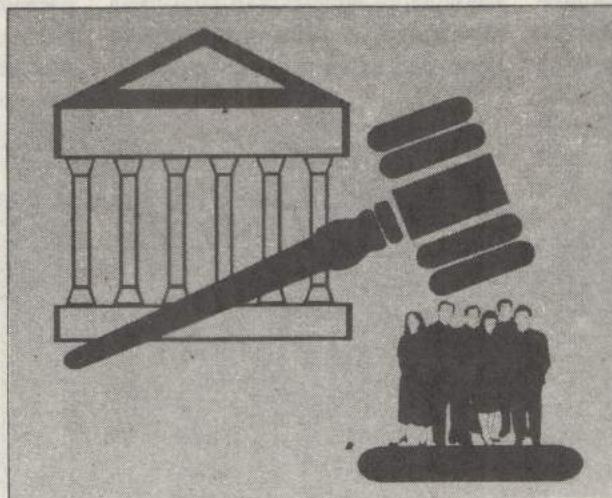
Penyimpangan

Namun, di dalam praktek dapat saja terjadi 'kerjasama' yang tidak sehat antara hakim, jaksa dan advokad, yang dengan sendirinya menyebabkan pengawasan melekat itu tidak berfungsi dan keputusan objektif-imparsial yang adil manusiawi pun menjadi kabur. Jika hal ini terjadi, jaminan perlindungan hukum dan ketentraman hidup para warga masyarakat akan hilang.

Misalnya, di dalam masyarakat dapat saja terjadi, seorang bernama Artosdwit memiliki sebidang tanah seluas 2000 m2 dengan bangunan berupa sebuah rumah tempat tinggal biasa, yang mempunyai sebuah kamar pavilliun yang melekat pada salah satu sisi rumah tersebut. Kemudian Artosdwit menjual setengah dari tanahnya (1000 m2) dengan bangunan rumah tinggal tersebut yang terletak di atas bagian tanah yang dijualnya kepada Kumahatuh, yang langsung menghuni rumah tersebut. Kemudian Artosdwit menjual sisa tanahnya (1000 m2) kepada Asalwang.

Karena marasa telah membeli tanah dengan paviliun dan rumah yang ada di atas tanah yang dijual Artosdwit kepada Kumahatuh dan Asalwang, maka Asalwang langsung mengisi paviliun Lalu, Kumahatuh menggugat Artosdwit dan Asalawang secara perdata atas dasar ingkar janji. Tetapi,kemudian atas nasihat advokadnya, Kumahatuh

mengeluarkan barang-barang Asalwang dari paviliun itu.

Atas tindakan ini, Asalawang mengadukan Kumahatuh secara pidana ke polisi dan perkara pidana ini jatuh ke tangan jaksa Sikatwang. Lalu, Kumahatuh menghubungi advokad Aturduit, yang mengatakan kepada Kumahatuh bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan polisi, Kumahatuh dapat dikenakan penahanan sementara. Namun Aturduit dapat mengatur agar hal itu tidak terjadi. Untuk itu ia perlu uang dan Kumahatuh memberinya uang untuk 'mengatur' hal tersebut

Setelah mempelajari berkas perkara, Jaksa Sikatwang menghubungi Kumahatuh dan menyarankan agar jangan menggunakan advokad, karena ia dapat membantu untuk menghasilkan keputusan hakim yang menguntungkan Kumahatuh. Jaksa Sikatwang menjelaskan kepada Kumahatuh, ia dapat mengusahakan agar perkara itu ditangani Hakim Timbanguang, teman baik jaksa Sikatwan. Imbalannya adalah uang yang seharusnya dikeluarkan Kumahatuh jika ia menggunakan advokad.

Hanya untuk mengatur agar perkara itu dapat jatuh ke tangan Hakim Timbanguang, maka Sikatwang memerlukan sejumlah uang. Sebab, menurut Sikatwang ada tiga hakim yang menginginkan perkara Kumahatuh, karena mereka sedang membangun rumah baru. Dalam kecemasan dan kebingungan, Kumahatuh menyetujui usul Sikatwang dan memberikan uang yang diperlukan oleh Sikatwang.

Selama berjalannya pemeriksaan, Jaksa Sikatwang beberapa kali meminta uang kepada Kumahatuh untuk keperluan ini dan itu, namun hanya sebagian saja yang dipenuhi Kumahatuh. Namun, setelah proses pemeriksaan yang berlangsung lebih dai setahun itu selasai, Kumahatuh dikagetkan dengan *requisitor* yang menuntut hukuman penjara satu tahun,yang oleh Kumahatuh dirasakan sebagai ancaman kehancuran kehidupan rumah tangganya.

Jika terjadi situasi yang digambarkan tadi, akan tampak jelas bahwa Kumahatuh sungguh-sungguh berada dalam situasi yang tersudut dan dilematis. Kepada siapa ia harus mengadu? Begitu ia mengadu, ia segera terlibat perkara pidana yang kedua, yakni fitnah yang akan lebih menyudutkannya.

Sebab, tentu saja jaksa Sikatwang yang menerima uang dari Kumahatuh berdasarkan janji akan membantunya, berlangsung secara lisan dan tanpa kehadiran saksi, sehingga Kumahatuh tidak akan mungkin membuktikannya di pengadilan. Meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Sikawang dan advokad Aturduit pun, tidak akan dapat dilakukannya.

Sementara itu, sejak pemeriksaan oleh polisi dan selama berjalannya pemeridksaan oleh jaksa dan di pengadilan, Kumahatuh sudah harus mengalami penderitaan yang cukup berat. Selain harus mengeluarkan banyak uang sehubungan dengan perkaranya itu, pekerjaan sehari-harinya untuk menghidupi keluarga dengan sendirinya terganggu. Sebab, ia tentu harus membagi waktu, perhatian dan energinya yang ditambah pula dengan rasa dihantui oleh kekhawatiran dan kehilangan tumpuan harapan. Istriya pun mangalami stres berat.

Merupakan Kejahatan

Jika yang mengalami situasi seperti Kumahatuh adalah penjahat biasa, misalnya penyelundup, maka 'pemerasan' atau 'permintaan uang suap' dan penjatuhan hukuman berat sekalipun adalah suatu risiko yang telah diperhitungkannya sejak dari permulaan ketika ia melakukan perbuatan melanggar aturan hukum pidana. Penjahat itu sudah dengan niat jahat berusaha mengutungkan atau memuaskan dirinya sendiri dengan merugikan atau mence-lakakan, bahkan membinasakan orang lain. Apa yang diterimanya setimpal dengan kejahatannya.

Tentu saja perbuatan pemerasan terhadap siapa pun (juga terhadap penjahat) oleh pejabat, lebih-lebih oleh penegak hukum seperti polisi dan jaksa atau hakim dan advokad, tetap merupakan perbuatan yang salah dan bahkan merupakan keja-hatan tersendiri, yang juga harus dihukum. Pemerasan demikian oleh penegak hukum akan mengaburkan garis pembeda antara

Wajah pengadilan; seringkali terpuruk. Repro.dok. Tempo

penjahat dan penegak hukum, antara kejahatan dan keadilan, antara salah dan benar.

Dalam hubungan ini perlu selalu diingat, sesungguhnya kejahatan seperti penyakit menular, tetapi jika kejahatan itu dilakukan oleh penegak hukum maka yang akan terjadi adalah epidemi. Lois D. Brandeis dalam *Olmstead Case* (1928).

Tetapi masalahnya menjadi sama sekali lain, jika hal itu menimpa warga masyarakat biasa yang bukan penjahat yang tidak mempunyai niat jahat seperti yang digambarkan dalam contoh hipotetik di atas. Jika hal yang dialami Kumahatuh itu bukanlah hal yang dalam hakikatnya sama dapat juga dialami oleh warga masyarakat lain dalam situasi konkret lain.

Misalnya, pengendara mobil yang dengan tidak sengaja menabrak pejalan kaki atau kendaraan lain yang mengakibatkan kecelakaan atau kematian, yang kasusnya kemudian jatuh ke tangan jaksa-jaksa seperti Sikatwang dan hakim-hakim yang bisa diatur dan yang bisa 'mengatur' seperti Timbangwang.

Orang-orang yang mengalami nasib seperti Kumahatuh atau pengendara mobil itu adalah orang-orang yang terlempar ke dalam situasi seperti Theseus dalam mitologi Yunani, yang harus dimasukan ke dalam labirin sebagai korban persembahan bagi dewa Minotaurus (yang sesungguhnya tidak ada). Gua labirin itu adalah gua dengan lorong yang banyak dan berliku-liku, sehingga orang yang masuk kedalamnya tidak mungkin lagi menemukan jalan keluar.

Hanya dengan pertolongan orang ketiga saja, orang yang masuk ke dalam gua labirin dapat keluar dengan selamat. Demikianlah Theseus dapat keluar lagi dari gua labirin, karena pada saat ia masuk labirin ia diberi segulung benang yang kuat oleh Aryadne yang selalu menentang setiap ketidakadilan dan kelaliman serta ketidakjujuran oleh siapapun. Termasuk oleh bapaknya sendiri, yakni raja Minos yang demi mempertahankan kekuasaannya, menciptakan gua labirin dan menebarkan cerita tentang penghuninya berupa dewa Minotaurus yang setiap tahun menuntut sajian korban berupa seorang pemuda.

Benang kusut Ariadne; sandiwara pengadilan. Repro: Forum Keadilan

Bukanlah hal yang mustahi pula orang-orang yang berada dalam situasi seperti Kumahatuh atau pengendara mobil tadi, akan didatangi Aryadne-Aryadne gadungan atau serigala-serigala yang bertopeng Aryadne yang menawarkan benang yang sebenarnya tidak bermutu dengan imbalan yang 'aduhai'.

Jika keadaan seperti itu terjadi, maka hukum bergeser menjadi sekedar alat untuk mewujudkan kekuasaan dan kerakusan dengan mengabikan, bahkan menindas nilai-nilai dan martabat manusia. Warga masyarakat biasa akan sulit melihat perbedaan antara pengadilan dalam pengadilan dan bursa dagang. Proses peradilan dalam pengadilan-pengadilan akan menjadi proses tawar menawar untuk menntukan harga dengan kemerdekaan dan keadilan sbagai sekadar barang komoditas bisa saja.

Orang-orang seperti jaksa Sikatwang atau hakim Timbangwang, adalah orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan karena itu mungkin tidak pernah bertanya pada dirinya, bagaimana jika perilakunya itu diketahui oleh isteri (suami) dan anak-anaknya. Orang-orang ini, jika ada, adalah orang-orang yang tidak takut bahkan apa yang dialami oleh 'korban'-nya, juga dapat dialami anak-anaknya atau dirinya sendiri pada waktu ia tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan lagi, tanpa adanya dan tegaknya hukum dan peradilan yang berlaku secara adil objektif-imparsial dan manusiawi.

Mafia Peradilan

Masalahnya sekarang adalah bagaimana kadaan kehidupan hukum dan praktek peradilan di pengadilan-pengadilan di Indonesia ada saat ini? Untuk menjawabnya, berangkali diperlukan penelitian sosiologis. Hanya saja, pada pertengahan tahun delapan puluhan di koran-koran diberitakan praktek-praktek 'mafia peradilan'.

Pemberitaan itu cukup besar, sehingga Ali Said yang pada waktu itu menjabat Jaksa Agung sempat mengatakan "muak, muak, muak sekali" berkenaan dengan pembe-

ritaan itu. Tidak terlalu jelas, apakah "muak, muak, muak sekali"-nya Ali Said itu ditujukan kepada istilah 'mafia peradilan' atau pada pemberitaannya di koran-koran atau pada praktek 'mafia peradilan'-nya. Yang jelas, surat kabar pernah memberitakan tentang hakim ditusuk guntin, hakm yan dilempar sepetu susai pembacaan vonis, dan tahun 1993 ini peristiwa 'kipas-kipas uang' di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam peristiwa-peristiwa itu, jelas terjadi pelecehan terhadap pengadilan dan hukum. Tetapi pertanyaannya adalah: siapa yang sebenarnya melakukan pelecehan itu? Penusuk hakim, pelempar sepatu, pengipas-pengipas uang, jaksa, advokad, atau hakimnya? Di tahun 1989, Ali Said yang pada saat itu menjabat Ketua Mahkamah Agung, mengatakan bahwa suara-suara sum-bang terhadap pe-ngadilan masih ada. Dalam tahun 1990, Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono mengatakan bahwa integitas penegak hukum belum bisa diharapkan.

Di penghujung tahun 1992, Purwoto S. Gandasubrata (Ketua Mahakamah Agung) mengatakan, "Hukum tidak lagi menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia. Kewibawaan hukum yang mestinya berlaku dalam negara hukum, masih jauh dari kenyataan". Dipertengahan tahun 1993 ini, seorang pejuang tanpa pamrih, Solihin GP pun mengatakan bahwa, bangsa Indonesia 'sakit' akibat tidak konsistennya menegakkan hukum, dan hambatan pembangunan saat ini justru akibat adanya labilitas hukum. Tetapi, sebagaimana kata Longfellow, *"Let the dead past bury its dead"*.

Yang lebih penting di tengah memasuki tahap era tinggal landas dengan era hukumnya dalam kerangka PJPT II, seluruh warga Indonesia dan para pemimpinnya harus berjuang keras untuk memelihara dan meningkatkan mutu peradilan yang memberikan pengayoman secara adil. Sebab seperti dikatakan oleh Henry Sidgwich, dalam menentukan derajat kedudukan suatu bangsa dalam peradaban politik, tidak ada batu ujian yang lebih menentukan selain dari derajat keadilan, sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum, dalam kenyatan sungguh-sungguh diwujudkan dalam penyelenggaraan peradilan.

Mafia peradilan: pelecehan hati nurani. Repro: Forum Keadilan

Jika keadilan, peradilan dan kehidupan hukum pada umumnya diabaikan, segala usaha pembangungan selama empat atau lima Pelita yang lalu akan sia-sia dan akan menguap begitu saja dengan berjalannya waktu, yang aka menyebabkan merajalelanya ketidak adilan nasional. Dan, demikian dikatakan oleh Gladstone, ketidakadilan nasiaonal adalah jalan yang paling pasti menuju kehancuran nasional. Untuk menumbuhkan kehidupan hukum yang sehat dan mewujudkan peradilan yang memberikan pengayoman bagi para warga masyarakat, para pemimpin bangsa, khususnya yang bertanggung-jawab untuk bidang hukum dan peradilan, harus elalu berusaha keras memelihara dan meningkatkan akhlak para pengemban profesi dan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan adovokad).

Cetusan Doa dan Harapan

Semoga di tengah pergeseran nilai masa yang diterpa badai komersialisme dan konsumtivisme, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Adil selalu menganugerahkan rakyat dan kekuatan iman kepada Purwoto Gandasubrata, Oetoyo Oesman, Singgih, Harjono Tjitrosubono serta para hakim, jaksa, polisi dan advokad sehingga beliau-beliau selalu tegar dan selalu memiliki nurani yang jernih dalam memperjuangkan tegaknya hukum dan peradilan yang adil sesuai dengan sumpah jabatannya di Republik Indonesia yang telah dilahirkan lewat perjuangan berat dan penuh pengorbanan. Tergantung pada cara masing-masing mengemban dan menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki mereka, maka nama-nama di atas serta Adnan Buyung Nasution dan para pendahulu serta pengganti mereka akan terukir dalam sejarah bangsa dan umat manusia, dengan tinta emas atau dengan lumpur. Sebab, seperti yang diingatkan oleh Henry Longfellow dalam *Palm of Life*:

Kehidupan orang besar menjadi teladan kita
Kita dapat membuat kehidupan kita menjadi agung
Dan, berlalu
Kita tinggalkan di bela kang kita
Jejak-jejak tapak kaki pada pasir waktu.

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unika Parahyangan

Negara Machiavelis dan Tanah Lima Perak

Mendiskusikan tentang negara, bagaimanapun, bakal berujung pada banyak aspek. Satu di antaranya, negara sebagai alat kelas kapitalis untuk mempertahankan kekuasannya sebagai elit penguasa modal dengan menyediakan prakondisi serta kondisi bagi akumulasi modal *(capital accumulation)*, serta mendaur ulang *(reproduksi)* struktur kapitalisme. Hingga ujung-ujungnya, harus dikatakan negara nyata-nyatalah tunduk di bawah modal *(capital)*. Meski patut juga untuk tetap dilantangkan bahwa ia tak tunduk kepada pemodal *(capitalist)* tertentu.

Modal adalah sosok hasil konsolidasi kekayaan ekonomi lewat kegiatan produksi dan distribusi. Hubungan-hubungan sosial dalam kegiatan produksi ada di bawah operasi modal *(capital operation)*. Hubungan itu terbangun dengan mendasarkan diri pada kontradiksi antara pemodal yang mengeruk nilai lebih *(surplus value)* dan buruh-pekerja yang mencipta nilai tersebut. Dan jenis produksi yang dioperasikan modal itu kemudian dikenali sebagai produksi barang dagangan *(commodity production)*.

Modal kini dikenali dengan wataknya yang tidak lagi menggubrisi soal batas-batas negeri, kebangsaan, agama, dan ras. Modal dengan mudah bisa dipindah-pindahkan dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu merasa rikuh. Konsekuensinya, ia tak mementingkan apa kebangsaannya. Adalah kebohongan belaka kalau lantas ada yang menjenis-jeniskannya menjadi modal Indonesia dan modal Amerika, misalnya. Modal itu sekuler, tak perduli soal agama. Kepentingannya di mana-mana selalu sama: dikonsolidasikan untuk terus-menerus mengeruk untung dan diakumulasikan lagi. Modal pun tak mengenal warna kulit. Sepanjang sukses mengeruk untung, hitam, putih atau merah bukanlah soal penting.

Andreas Ambar Purwanto

Negara sebagai alat (baca: panitia) bagi pemodal sudah pasti tunduk di bawah kerja logika modal. Itu tesis utama di sini. Karena kerja modallah yang membiayai hidup negara, ia harus takluk di bawah kekuasaan modal. Sebutlah Indonesia kita sebagai misal. Di era Soeharto, bisa saja kita berkata: Idonesia telah berusaha membatasi ruang gerak modal asing sedari tahun 70-an untuk lalu mengoperasikan

modal domestik (swasta dan negara). Tapi, nyatalah bahwa perkembangan situasi ekonomi internasional di awal 80-an —yang diwarnai oleh resesi dan membumbungnya harga minyak dunia— telah memaksa kita untuk lebur dalam logika struktural akumulasi modal dengan membuka ruang gerak modal asing. Bahkan belakangan ini, sebutlah PP (Peraturan Pemerintah) No. 17/1992 dan PP No. 20/1994 secara hukum membuat undangan terbuka bagi modal asing seluas-luasnya. (untuk soal ini bakal diurai lebih terinci pada bagian berikutnya)

Kenyataan itu menunjukkan bahwa negara nyata-nyata tunduk di bawah logika modal. Jika tidak modal asing, maka modal domestik yang diutamakan. Modal domestik, seberapa dan sebagaimanapun tetap saja modal namanya. Mengapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat negara selalu menguntungkan golongan pemodal dan malah menekan upah buruh, jawabannya tak lain digara-garai beroperasinya negara di bawah logika penimbunan modal. Pun, karena negara tetap harus dikatakan sebagai alat pemodal secara keseluruhan.

Meski diakui atau tidak kenyataan bahwa negara bekerja di bawah prinsip akumulasi modal, di Indonesia, lembaga negara berkembang dalam lingkungan sejarah modal yang khas. Barang beberapa jenak mungkin sah bila kita bongkar-bongkar kembali arsip-arsip lama kita soal itu. Ketika republik ini terbentuk di tahun 1945, terlihat jelas tak adanya pemodal domestik yang cukup tangguh untuk mengimbangi dominasi modal asing (Belanda, Inggris dan Amerika Serikat). Sungguhpun kemudian-kemudian, lewat Program Benteng di awal tahun 50-an sebagai misal, modal asing yang bercokol di sini sempat ditolak dan dikangkangi aset-asetnya oleh sentimen nasionalisme Indone-

sia (alasannya: demi pertumbuhan modal domestik), basis material kehidupan bernegara tetap dicocok hidungnya oleh kerja modal.

Pertumbuhan basis material hidup kenegaraan yang khas di Indonesia saat itu melulu dikarenakan ketidakmampuan pemodal domestik untuk menjadi golongan penguasa dalam perekonomian Indonesia. Maka, kedudukan negara — melalui penggenjotan slogan nasionalisme ekonomi— sangat penting dalam perekonomian. Bisa kita cermati lagi itu semua lewat Program Benteng yang sempat disebut di atas — sebuah program yang diniatkan untuk membentuk golongan pemodal domestik yang tangguh. Tapi, belakangan program ini dengan banyak alasan secara umum dinyatakan gagal.

Sejak paruh kedua 1950-an, selepas genjotan nasionalisme ekonomi yang sempat "gagal" tadi, muncul dorongan kuat bagi negara dengan segenap aparatnya untuk memilih dan memutuskan pilihan-pilihan taktis yang memungkinkannya memiliki bangun basis ekonomi yang kuat. Maka kemudian diputuskan untuk merebut aset-aset investasi asing yang sempat terbengkalai saat situasi sosial politik waktu itu masih diwarnai oleh ketidakpastian kekuasaan. Di antaranya adalah perkebunan-perkebunan, pabrik-pabrik dan ladang-ladang minyak milik Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Jangan tanya mengapa kemudian "perampasan-perampasan" ini dilunakkan menjadi "nasionalisasi" perusahaan asing.

Sebenarnya, apa yang bisa dipetik dari "nasionalisasi" itu? Pertama, negara mengambil alih perusahaan asing itu untuk kemudian dijadikan perusahaan negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Pemilik-pemilik modal Belanda, Inggris dan Amerika Serikat harus enyah dari sini tanpa sempat mengemasi apa-apa. Kedua, modal yang telah lama mereka akumulasikan itu tidak ikut-ikutan hengkang. Tapi, dialihtangankan kepemilikannya menjadi modal negara. Ketiga, sesungguhnyalah negara dapat dengan mudah berlaku semena-mena menghantam pemilik modal asing, dan dengan serta-merta mengkangkanginya.

Petani Indonesia: Merdeka tapi bingung?

Sesudah 'nasionalisasi', negara ibarat mendapat durian runtuh, sekonyong-konyong menyuatlah sebentuk fenomena baru. Yakni, mengedepannya aparatus-aparatus negara —terkhusus pimpinan Angkatan Darat (AD)— sebagai aktor-aktor penting dan utama dalam perekonomian nasional. Sedangkan, para pemodal swasta tidak dan belum dapat berbuat banyak secara mandiri untuk menjadi pelakon di pentas struktur ekonomi nasional. Periode sejarah ini menegaskan kembali hubungan negara dan modal.

Keberadaan negara dengan aparatus-apatusnya yang punya previllege tersendiri dalam sistem ekonomi macam beginilah yang melahirkan apa yang kemudian bisa kita namai sebagai *politico-beauraucrat*. Mungkin, memang karena sulit mengkonsentrasikan diri pada dua pekerjaan berat sekaligus — menjadi administrator publik sekaligus pengusaha— yang terjadi berikutnya mereka tidak dengan tiba-tiba saja menyibuki dirinya dengan urusan-urusan bisnis. Tapi, mereka memilih menjadi 'penjaja jasa baik' dengan menyediakan koneksi, lisensi, konsesi, proteksi, kredit, subsidi, kontrak-kontrak, monopoli atau oligopoli kepada keluarga maupun kelompok politik dan ekonomi tertentu untuk bisa punya keabsahan mencampurtangani hiruk-pikuknya sistem ekonomi kita. (Patut dijangan-jangani bila ternyata kondisi inilah asal-muasal berjangkitnya endemi korupsi akut dalam masyarakat kita hingga kini) Masih cukup was-was keuntungan besar tak bisa segera ditangguk kelompok-kelompok ekonomi tadi, negara agaknya tetap merasa perlu memberlakukan ketentuan upah buruh yang rendah.

Hubungan birokrat-politik dengan pengusaha-pengusaha yang 'dijasa-baikinya' boleh diibaratkan mata uang dengan kedua sisinya. Saling melengkapi. Birokrat-politik dengan pengaruh dan kewenangan jabatannya, "berbaik hati" menyalurkan berbagai fasilitas negara untuk menciptakan kelompok pengusaha-pengusaha baru (umumnya keluarga dan kelompok politiknya) dan menghidupkan ruang gerak pengusaha klien (umumnya pemodal Cina) untuk tampil menguasai perekonomian nasional. Negara mengatur konflik kelas-kelas pengusaha untuk tidak saling berbenturan secara terbuka. Negara juga berusaha menutup konflik antara kelas pengusaha dengan kelas pekerja.

Dalam hubungan yang khusus antara modal dan negara itulah yang memungkinkan hadirnya *negara yang represif* di Indonesia. Represi diperlukan untuk menumbuhkan dan mengamankan kepentingan-kepentingan pengusaha, birokrat politik, dan kepentingan kelanjutan koruptif. Para pengusaha yang tumbuh di bawah Orde Baru --terutama pengusaha besar yang berkutat di sekitar penguasa negara-- menikmati keuntungan-keuntungan bisnis di atas landasan politik yang represif.

Negara, dengan demikian, menjadi arena yang tertutup bagi perjuangan demokrasi. MPR dan DPR sudah dikonsolidasikan sebagai

aparat negara yang loyal bagi politik represif. Begitu juga lembaga-lembaga negara lainnya, seperti aparat perundang-undangan, MA (Mahkamah Agung) dan pengadilan tetap dikonsolidasikan sebagai penunjang politik represif. Bahkan partai-partai politik dan pewadahtunggalan organisasi-organisasi massa yang terkotak-kotak, sudah tertundukkan di bawah sistem politik yang represif.

Negara dan Tanah

Dengan meletakkannya dalam lingkungan sosial yang berkepemaknaan konkret --bukan dalam khayalan indah kemilau di alam surgawi-- negara konkret hadir tak hanya secara ideologis, tapi juga secara fisik. Maka, sekarang perlu dan sudah saatnya, agaknya, menarik sebuah garis keterkaitan hubungan antara negara dan persoalan tanah di Indonesia.

Begitu juga tanah. Jelas, kata tanah bukan hanya konsep. Tapi, benar-benar konkret secara fisik. Ia bukan semata tempat bagi para petani memadukan setiap tetesan keringat, bekal warisan pengetahuannya pun bibit serta pupuk yang baik untuk kemudian bisa memetik hasil-hasil panenan. Kini, tanah telah mengalami elaborasi fungsi secara signifikan. Sebutlah, untuk perumahan *(real estate)*, hutan produksi kayu, pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, untuk jalan tol, rel kereta api, pelabuhan udara, terminal bus dan peti kemas, kawasan industri, lapangan-lapangan golf, stadion sepakbola, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan hiburan, taman-taman rekreasi dan pariwisata. Pun, hampir terlupa, pencetakan sawah secara besar-besaran oleh konglomerat. Singkatnya, siapa sih yang sekarang berani berkata: kami tak butuh tanah!

Tanah Jawa —gara-gara banyak gunung berapi sempat digembar-gemborkan sebagai tanah paling subur di dunia— telah menjadi "medan pertarungan" yang diperebutkan tiap jengkal tanahnya oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Apa yang melatari semua itu? Bagaimana sejarahnya?

Boleh jadi, kita perlu membongkar-bongkar catatan kuliah sejarah kita untuk sekedar bercerita soal itu. Karena sejarah perebutan tanah nyatanya punya riwayat yang lumayan panjang. Tak tanggung-tanggung, sekitar 4 abad ke belakang. Adalah meluasnya wilayah kerja modal dagang *(merchant capital)* sejak abad ke-15 yang lantas telah memungkinkan terjadinya prototip globalisasi ekonomi perdagangan. Berkat tersedianya teknologi perkapalan sederhana, para penjelajah dunia dari Eropa menemukan "dunia baru" yang terbelakang.

Beberapa benua 'baru', seperti Afrika, Asia, Australia, dan Amerika berhasil terlayari dan terjelajahi tak kurang berangkatdari rasa ingin tahu dan niat mereka 'melebarkan sayap'. Para pedagang Eropa, yang sekaligus penjelajah itu, melihat peluang dagang mendirikan kantong-kantong perdagangan dunia di benua-benua yang mereka temukan. Betapa tidak, di manalah gudangnya nyaris semua hasil bumi yang tengah menjadi komoditi primodana perdagangan saat itu. Pada awal abad ke-17 di Nusantara (Kepulauan Indonesia) berdiri sebuah persekongkolan dagang Belanda, yakni VOC *(Vereenigde Oost-Indische Compagnie)*-- yang kemudian lebih akrab disebut 'kompeni'.

VOC adalah pelopor penguasaan tanah secara besar-besaran di Nusantara. (Maaf kalau lompatan ide di sini terasa tergopoh-gopoh. Maklumlah, ini semata diniatkan untuk sedikit memperpendek uraian historis yang nyatanya memang tidak pendek ini; pen.) Melalui bantuan kekuatan militernya, VOC dengan mudah menaklukkan satu persatu kerajaan-kerajaan kecil di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku. Kemudian, VOC dan cikal bakal negara kolonialnya mempersatukan wilayah-wilayah penaklukannya ke dalam wilayah yang dinamainya sendiri sebagai Hindia Belanda. Sebagai kekuatan militer sekaligus ekonomi, VOC jelas sekonyong-konyong memiliki 'keabsahan' untuk menguasai tanah-tanah di Nusantara melulu untuk keuntungan ekonomi mereka. Bandingkan sebelumnya, penguasaan tanah berada di tangan para tuan tanah dan bangsawan lokal yang menarik upeti secara paksa *(forced delivery)* dari petani. Sejak kedatangan VOC, keberadaan mereka pelan-pelan tersingkir dan tertundukkan. Para petani yang semula menggarap lahan-lahan garapan beralih ke penarikan upeti jenis baru --berupa rempah-rempah yang kemudian diekspor ke pasar Eropa--kepada tuan yang baru pula: VOC. Meski begitu, tidak sepenuhnya penguasaan tanah berada di tangan VOC. Karena, para bangsawan pun diberi 'jatah' kekuasaan untuk menguasai tanah.

Sesudah VOC bangkrut, gara-gara korupsi dan pajak tinggi yang dikenakan kerajaan Belanda untuk membiayai perangnya melawan Perancis, yang kemudian menguras habis cadangan dananya,

Cuma ranting kayu, bukan stik golf

perkembangan ekonomi di tanah jajahan berjalan di bawah kolonialisme baru. VOC dibubarkan, Hindia Belanda kemudian ditetapkan sebagai propinsi seberang laut yang dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Fenomena perubahan ujud kekuasaan ini membawa pengaruh secara struktural yang cukup signifikan bagi pendayagunaan tanah di Hindia Belanda. Berikutnya, tanah diproduktifkan jauh lebih intensif. Tahun 1825 berdirilah NHM *(Nederlandsche Handel Maatschappij)*, yang memperlakukan tanah jajahan sebagai aset perusahaan negara. NHM inilah yang kemudian bertindak sebagai agen tunggal dalam ekspor-impor, menggantikan peran kepedagangan VOC. Tapi, pada tahun 1830 di bawah Gubernur Jenderal Van Den Bosch diterapkan Sistem Tanam Paksa *(Cultuur Stelsel)*, yang baru berakhir tahun 1870. Ringkasnya, Sistem Tanam Paksa dipraktikkan macam begini: para petani di Jawa dipaksa menanam tanaman tertentu bagi kepentingan modal negara kolonial Belanda.

Hasil yang dipetik dari Tanam Paksa adalah berkembang dan mekarnya kekuasaan modal, baik di Belanda maupun di tanah jajahan. Selanjutnya, setelah Ekonomi Tanam Paksa dirubuhkan —gara-gara banyak kritik mengalir mengomentarinya, terutama dari kalangan kaum sosialis demokrat di Volkstraad— tahun 1870 dikeluarkanlah UU Agraria, menyusul kemudian tahun 1871 UU Persewaan Tanah. Kedua undang-undang, kurang-lebih, memberikan peluang yuridis, yang secara tidak langsung merupakan bentuk ajakan halus bagi kehadiran investor asing di propinsi seberang laut itu — mengambil ruang yang kosong setelah terjadi perubahan kebijakan soal penyertaan modal negara dalam kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Sejak itulah di Jawa --yang ditunjang oleh kehadiran *Javasche Bank*-- berbangkitan pemodal-pemodal swasta asing dan negara kolonial untuk menggarap terutama sektor perkebunan, seperti tebu, teh, coklat, dan kelapa. Inilah tahap pertama penanaman modal-modal asing yang menghancurkan hubungan penarikan upeti untuk kemudian ditelan ke dalam hubungan kerja-upahan. Dengan hadirnya modal-modal produktif, hadir pulalah buruh-upahan —yakni buruh-tani.

Negara kolonial sebagai alat kekuasaan modal, terutama kekuasaan modal para investor Belanda, karenanya mau tak mau harus menyusun perangkatnya untuk menyediakan dan melindungi penguasaan tanah bagi pertumbuhan modal-modal perkebunan miliki mereka. Penguasaan tanah ini jelas lantas saja memunculkan sengketa dengan para penggarap lahan-lahan pertanian. Karena, biar bagaimanapun, mode produksi macam begini —dengan penyertaan modal sebagai variabel vital atas proses produksi— adalah hal sama sekali asing bagi masyarakat agraris di sini saat itu. Contoh kasus yang bisa jadi paling menarik adalah pemberontakan petani Banten menentang undang-undang penguasaan tanah oleh pihak kolonialis.

Kembali melompat agak jauh dari centang-perenangnya sejarah, agaknya baru setelah hampir 50 tahun selepas peluncuran dua undang-undang yang disebut di atas, baru berhasil ditemui kembali patok-patok sejarah yang cukup signifikan untuk menjelaskan perubahan sosial yang termunculkan gara-gara pengaruh keterlibatan modal yang besar dalam sistem ekonomi. Barulah pada dekade ke-2 abad ke-20 ini mulai muncul perjuangan dan perlawanan ekonomi antikolonial. Sebutlah semisal dengan kehadiran Serikat Islam (SI) sebagai bentuk konsolidasi kekuatan modal dagang kelompok pemodal dan produsen pribumi untuk bertarung dengan pemodal-pemodal Belanda dan keturunan Cina. Begitu juga dengan Hendrik Sneevliet (seorang Belanda yang lumayan progresif) yang turut tergerak untuk merasa perlu mendirikan Perkumpulan Sosial Demokrat *(Indische Sociaal Democratische Vereeniging)* untuk berjuang menentang kolonialisme dengan argumen-argumen analisis ekonomi-politik sebagai basis ideologi perlawanannya. Sedang, buruh-tani dan buruh kereta api yang tergabung dalam serikat-serikat buruh pun belakangan mulai terbiasa dan membiasakan diri melancarkan aksi pemogokan.

Kembali ke soal tanah, keberadaannya di dalam sistem ekonomi kapitalisme telah mengalami elaborasi eksistensi. Tanah, pada gilirannya, tak lagi sebatas bagian aset modal, tapi juga beranjak menjadi komoditas. Dalam fungsinya sebagai *space* untuk menggarap lahan perkebunan, kawasan industri, hutan produksi kayu dan tanaman industri, serta properti, tanah telah menjadi aset modal. Sedang lewat jual-beli dan sewa-menyewa, tanah telah menjadi komoditas (barang dagangan).

Lewat perkembangan baru yang terjadi dalam hubungan antara tanah dan modal di atas, keabsahan alasan pemanfaatan tanah secara produktifpun lantas diperkenalkan dengan dua konsep. Pemilikan dan penguasaan. Pemilikan sifatnya tetap, dan penguasaan dibatasi waktu. Penguasaan juga dapat meluas sepanjang ada tanah-tanah lain yang dikuasainya. Di bawah kerja modal, konsep penguasaan lebih penting ketimbang pemilikan. Lewat konsep penguasaan tanah, dimungkinkanlah untuk menjadikan tanah sebagai bagian dari modal yang juga mengalami proses produksi, distribusi, investasi dan akumulasi.

Kemerdekaan dan keberdaulatan dari kolonialisme lewat pembentukan negara RI nyatanyalah tidak malah menghentikan "nafsu" dan sengketa-sengketa penguasaan atas tanah. Bahkan di bawah Orde Baru kasus-kasus penguasaan tanah telah mengakibatkan timbulnya konflik-konflik yang meluas seturut dengan lonjakan garik angka penanaman modal di berbagai sektor industri. Tapi, pada umumnya garis besar konfliknya terjadi antara pemilik, penghuni dan penggarap tanah di satu pihak dengan para pemodal dan pemerintah yang ditunjang oleh aparat koersi di pihak lain. Maka, dalam kasus yang lebih luas, boleh dibilang: masalah tanah telah

menghadapkan negara dengan segenap persoalan yang tidak kunjung usai. Negara mempunyai kepentingan dengan modal. Itu pasti. Dan, tanah, mau tidak mau, harus dianggap sebagai aset (modal). Hingga, adalah kewajaran sebenarnya kalau lantas akhir-akhir ini isu pertanahan amat pekat mewarnai perbincangan publik. Karena, biar bagaimanapun, adalah telah menjadi watak masyarakat kapitalistis yang tak bakal beringsut sedikitpun untuk sekedar menjaga keutuhan modalnya.

Dari entah berapa banyak kasus tanah yang banyak terjadi di pedesaan, beberapa yang sempat terangkat dalam pemeberitaan tiga-empat tahun belakangan ini, mungkin dideretkan cukup panjang di sini. Kasus penggusuran penduduk Cijayanti dan Rancamaya (Bogor), Cimacan (Cianjur), Saguling (Bandung), Jatiwangi (Majalengka), Gunung Badega (Garut), Cimerak (Ciamis), Kedungombo (Boyolali), Karang Alun (Cilacap), Blangguan (Situbondo), Nipah (Sampang-Madura), Sumber Klampok (Bali), Pulau Panggung dan Gunung Balak (Lampung Utara), Sugapa (Tapanuli Utara), dan Sei Lepan (Langkat). Sedangkan kasus-kasus sengketa tanah di perkotaan seperti kasus Kacapiring, Cihaurgeulis, Sukajadi dan Lingkar Selatan (Bandung); Kampung Sawah, Kampung Melayu, Pluit, Koja dan Bendungan Hilir (Jakarta); Kraton Solo (Solo), dan sebagainya.

Kasus-kasus yang disertai penggusuran penduduk berlangsung melulu digara-garai keterlibatan aparat birokrasi negara. Pemerintah Daerah memutuskan penggusuran penduduk untuk proyek pembangunan gedung, jalan, kawasan industri, lapangan golf, bendungan atau apapun, tanpa menggunakan mekanisme jual-beli biasa. Melainkan lewat mekanisme "ganti rugi". (Padahal, di manapun dan dalam situasi macam apapun, nyaris tak ada orang yang meniatkan dirinya merugi) Nilai ganti ruginya bisa bermacam-macam. Ada yang mendapat 400.000 rupiah per meter persegi seperti di Kelurahan Koja Jakarta Utara, hingga yang hanya 200 rupiah seperti di Cicadas dan Cilangkap (Purwakarta). Lebih 'jahanam' dari itu, ada yang hanya diberi 30 rupiah di Cimacan. Atau mau yang jauh lebih dasyhat 'kebiadabannya', cuma 5 perak permeter persegi di Way Hui dan Jatimulyo (Lampung Selatan). Mekanisme birokrasi 'ganti rugi' harus dengan sangat lantang dikatakan merrupakan jalan pintas untuk makin mengefisienkan pemanfaatan modal. Caranya mudah saja: lakukan 'pemurahan' harga tanah yang akan dikuasai untuk itu pastikan lebih dulu bahwa kita ada di pihak yang secara ekonomi dan politik jauh lebih kuat daripadapara pemilik tanah. "Agak 'macchiavelis' sedikit tak apalah, cuma soal kecil kok," jangan-jangan anggapan macam begitulah yang bekerja di kepala para aparat birokrasi pun para pemodal saat semua itu terjadi.

Buruh Indonesia: Tak punya modal, silakan minggir!

Tanah-tanah *erpach* (tanah-tanah terlantar bekas perkebunan Belanda) bila didaftar sebagai salah satu 'biang kerok' utama sengketa agraria. Tanah-tanah itu sering diklaim sebagai "tanah negara". Kendati banyak tanah-tanah itu yang sudah digarap puluhan tahun oleh para penggarapnya, mereka-mereka itu selalu saja nyaris gagal (atau dimustahilkan?) memiliki tanah tersebut. Menempuhi jalur birokrasi hukum dan agraria bagi mereka mungkin sama menyakitkannya dengan membentur-benturkan kepala ke dinding batu. Sama sekali tak gampang, dan kerap dipersulit, sekalipun tanah tersebut adalah warisan keluarga mereka turun-temurun entah dari berapa generasi sebelumnya.

Kepemilikan tanah yang sah sekarang ini harus mempunyai SHM (Sertifikat Hak Milik). Itulah satu-satunya peluang mendapatkan peluang diperlakukan sederajat di mata hukum, meski kerap disadari sekecil apa artinya itu nyatanya kemudian. Tapi untuk sekedar memperoleh selembar kertas itupun, agaknya banyak kekecewaan yang harus peroleh. Berangkat dari niatan untuk mencoba menjadi warga negara yang baik, banyak orang lantas malah frustrasi. Mereka yang telah mengurus sertifikat ternyata harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Entah berapa kali harus mondar-mandir ke kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang artinya pula sama dengan harus melewati banyak meja birokrasi. Mengurus sertifikat kemudian malah sama artinya dengan mengeluarkan 'uang pelicin untuk menyogok petugas atau penjabat yang bertugas untuk mengurus sertifikat.

Masih seberbelit-belit begitu pun tak lantas tuntas kemungkinan ancaman pencaplokan hak milik dengan seenaknya oleh negara. Pembatalan amar Mahkamah Agung RI atas kasasi para warga Kedung Ombo, baru-baru ini, mestinya sudah cukup membuat kita paham seberapa machiavelis watak negara di sini.

Penulis adalah pegiat Keluarga Aktivis Universitas Padjadjaran (KAU), Bandung.

Ketika Lalu-Lalang Menjadi Potret

Cermin negara dapat ditunjukkan dari berlalu- lintasnya. Di sanalah peradaban sebuah bangsa dapat diukur. Lalu, jika kemudian, lalu lintas centang-perenang, seperti itukah Indonesia? Lalu lalang angkutan publik di kota-kota besar kita memang berjalan dengan segenap kebergegasannya. Lengkingan klakson dan penumpang yang selalu berjejal di tengah raungan mesin merupakan keseharian. Pun ialah arogansi dari suasana yang serba bertekanan. Tidak luput pula, sumpah serapah menjadi tatanan: menjadi kepatutan dari sebuah nilai. Jika peradaban kita diukur dari lalu lintas yang centang-perenang di jalanan, kepada siapakah kita mencari inti persoalan? Bukankah itu wajah kita juga?

*Foto : **ParaHyangan***
Teks : Aum Muharam
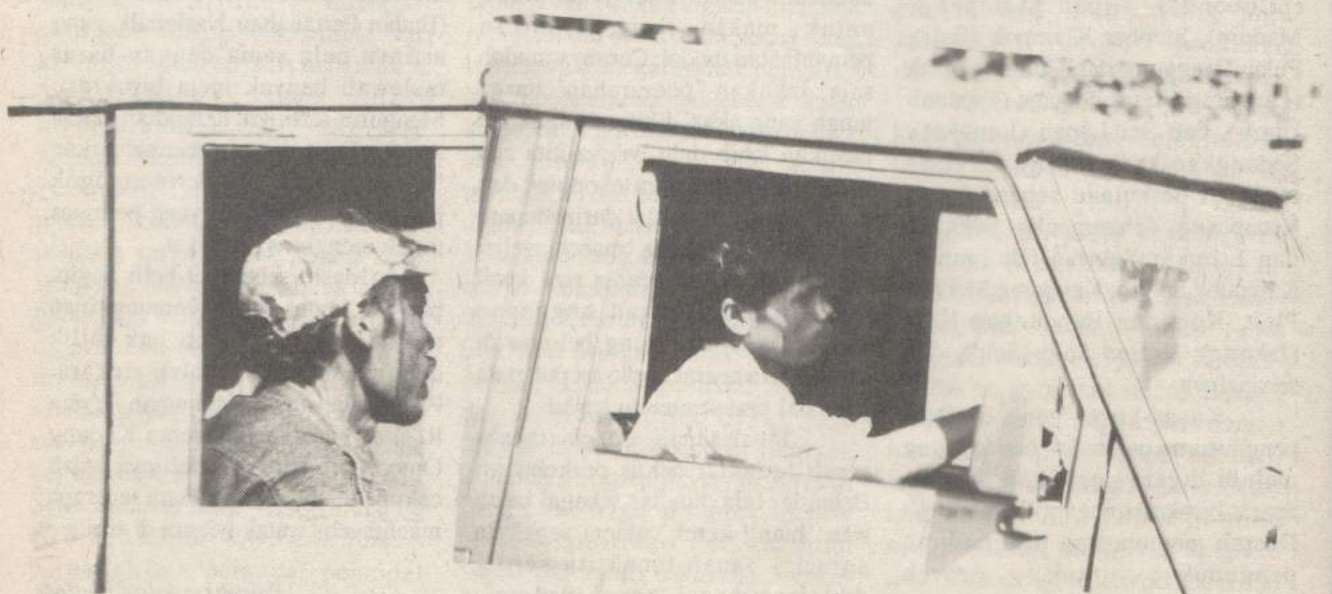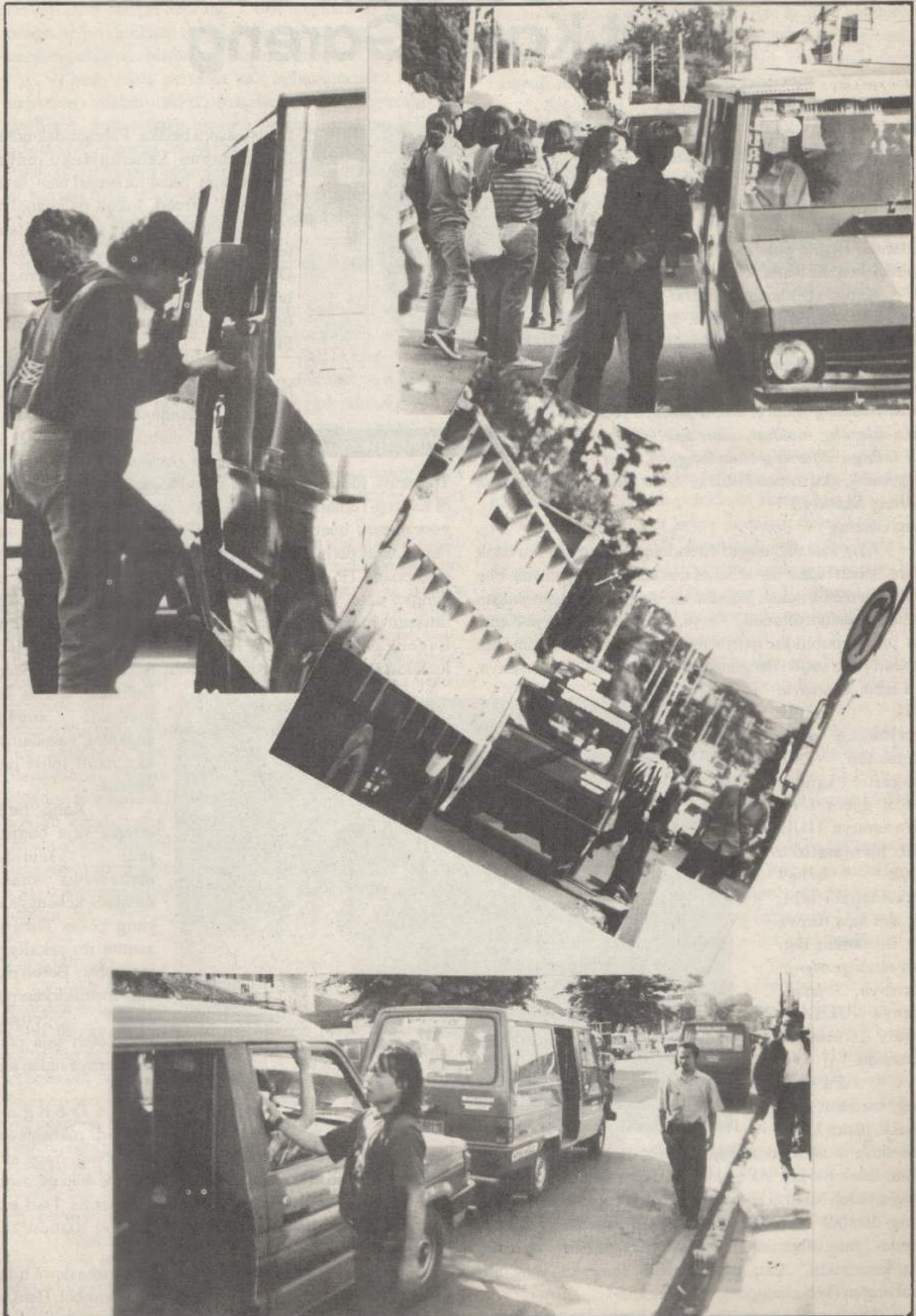
Sekedar Catatan Obsesi buat Kang Gareng

D*ear* Kang Gareng,

Dengan segala hormat dan permaafan, baru kali ini saya sempat menulis buat Kang Gareng. Aku yakin Kakang dalam keadaan baik-baik selalu di Karang Tumaritis. Begitu pula aku haturkan salam sejahtera buat Ki Semar, Petruk, dan Bagong.

Aum Muharam

Kang, saat menulis surat ini, aku ditemani alunan musik Dalbo. Syair lagu *"Huru-Hara"* merangsang aku untuk bicara. Tergiang benar di benakku salah satu lirik yang berbunyi begini: ***"... apa jadinya jika mulut dilarang bicara, ...apa jadinya jika mata dilarang melihat,...dan apa jadinya jika telinga dilarang mendengar".*** Dan, iseng-iseng, aku menambahkan: ***"Apa jadinya jika aku pun dilarang kentut (!)".***

Kang Gareng,

Aku, saat ini, tengah dirundung ketakutan. Aku takut bicara. Sebab bicara harus bebas dan bertanggung jawab. Pun ketika aku menuangkan gagasan ini, aku ngeri jangan-jangan mulut dan otakku dibreidel. Oh ya, perlu dicatat pula ya Kang, saat ini, Republikku hanya membutuhkan omongan dan gagasan yang sesuai dengan stabilitas nasional. Maksudnya, atau lebih tegasnya, tidak untuk meretakkan pilar kekuasaan. Aku mengerti, sangat m e n g e r t i, bahwasanya UUD telah menjaminku untuk bebas berpendapat. Tapi, *kok*, aku lupa bahwa saat ini jaman lagi edan alias *gendeng*. Buktinya, bisa-bisanya UUD di bawah telapak kekuasaan.

P a d a h a l Kang, menurut akal sehatku, justru UUD semestinya di atas kekuasaan. Lantas, aku pun dicap tidak *manut*, tidak *nurut*. Aku akui, memang aku warga yang sering dituduh bisanya hanya pintar mengkritik. Kritikku pun sering disebut destruktif. Sekali lagi, padahal menurut 'mereka', yang dibutuhkan di jaman edan ini hanyalah kritik yang "konstruktif". Atau, katakanlah di-"alias"-kan yang bisa membangun (keberlanggengan kekuasaan).

Ah, jangan-janga, itu semua hanya legitimasi dari halusinasiku belaka. Paling tidak untuk menghimpun keberanianku untuk mengatakan 'benar itu benar' dan 'salah itu salah'. Freud, tokoh psikoanalisa yang termahsyur itu, pernah bilang tentang adanya *obsessional neorosis*. Dan, jangan-jangan, saya memang terkena *obsessinal neorosis*. Eh, ngomong-ngomong, Kakang kenal Freud kan?

Kang, kabar lain pun, aku haturkan. Saat ini, aku masih berstatus sebagai mahasiswa. Terbersit kebanggaan: statusku ini nanti akan berguna bagi pembangunan di Karang Tumaritis. Idealnya, aku mau membangun sistem pemerintah di Karang Tumaritis jadi baik. Aku ingin menciptakan *clean government* buat para carik di Tumaritis. Hasilnya, kang Petruk *ndak* perlu capek-capek menyogok aparat hanya untuk membuat KTP. Ki Semar *ndak* perlu mengurus surat tanah dengan calo yang bekerjasama dengan birokrat hingga urusannya menjadi panjang lebar. Begitu pula dengan Kang Bagong. Kang Bagong *ndak* perlu capek-capek lagi melakukan aksi ganti rugi gusuran tanah yang timpang. Bolehlah, semua itu, menjadi angan-anganku, seandainya aku nanti lulus jadi sarjana.

Kang, terus terang saja bagiku jadi seorang mahasiswa sudah menjadi kebanggaan yang besar. Dibalik semua itu sekaligus jadi beban. Beban jika aku memikirkannya. *Toh*, dengan berceloteh saja pun, sebenarnya sudah jadi beban.

D e n g a n menjadi mahasiswa, saat ini aku *ndak* perlu lagi *ngangon* kambing. Yang aku 'angon' lebih abstrak dan sedikit moderen: ide atau gagasan. Aku tidak lagi seperti teman-teman di Tumaritis. Dari situ saja sudah merupakan kehormatan yang disodorkan kepadaku.

Soalnya Kang, jaman sekarang jadi mahasiswa tidak lebih dari status. Intelektualitas itu hanyalah simbol. Bahkan telah menjadi jargon agar memperoleh potongan harga pada

saat nonton pagelaran wayang kulit, ataupun dangdutan. Karena itu, aku semakin tersanjung dan terbuai dengan status itu. Keintelektualan itu sangat diperlukan bagi peningkatan derajat seorang. Coba seandainya Ki Semar mengecap pendidikkan tinggi, *haqul yakin* beliau kelak bakal menjadi pahlawan pembangunan bagi masyarakat Tumaritis.

Kang, mula pertama kali kebanggaanku menjadi mahasiswa adalah otakku kelak akan dibekali segerombolan idealisme. Semangatku tumbuh begitu tinggi, seolah-olah dirasuki oleh segenap nilai-nilai kecendikiawanan. Tumpukan buku-buku telah aku lahap habis. Dari diktat kuliah, *fotocopy*an, sampai buku-buku referensi lainnya. Tujuanku satu, agar bekal ilmuku sanggup mengatakan sebuah kebenaran, terlebih akan didukung lingkungan perguruan tinggi yang telah dianggap sebagai lembaga suci dari moralitas kebebasan berpikir ilmiah.

Tak terpikir olehku bahwa suatu saat akan ada konsep *link and match*, ternyata cenderung pragmatis. *Dus* sama sekali tidak terbesit olehku bahwa — suatu saat— jebolan universitas identik dengan *output* produk dari suatu pabrik. Bahkan aku tidak pernah sedikit pun berpraduga bahwa universitas hari-hari ini berubah menjadi menara gading. Yang aku pikir saat itu adalah aku dapat bebas merdeka melayangkan segenap daya nalarku. Aku bebas untuk bicara banyak hal, mulai dari politik kelas kambing sampai dengan politik kelas elit.

Dengan menghilangkan praduga yang bukan-bukan, aku pompa semangatku. Aku pun mulai mengidolakan Plato, Socrates, Phytagoras, bahkan sampai Stephen King. Bagiku mereka bisa begitu karena dibesarkan oleh moralitas kebebasan berpikir. Otak mereka tidak terpenjara oleh suatu sistem. Mental mereka tidak terpola. Mereka menjunjung tinggi keutuhan dari sebuah ide. Ide yang sama sekali terhindar dari intrik kepentingan dan kekuasaan. Ide yang sama sekali tidak terbatas dan dibatasi. Begitu terpengaruhnya aku, sehingga aku harus seperti mereka. Dan, aku berpendapat, bahwa lembaga pendidikan tinggilah yang sanggup menggodok itu semua. Lembaga pendidikkan tinggi adalah candi yang sakral dimana para empu banyak bersemayam. Saking semangatnya, aku pernah berkhayal bagaimana mempertemukan Mpu Tantular dengan Stephen King dalam sebuah seminar, yang membahas tentang gerakan *woman libs*.

Kang Gareng,

Jika aku boleh mengutarakan pendapat, bagiku lembaga pendidikan tinggi mengandung nilai moral yang patut dijaga kenetralannya. Ide-ide bebas berkeliaran kemanapun perginya. Setiap individu, dalam kerangka kebebasan berpikir ilmiah, berhak untuk mengeluarkan segenap preposisi, predesposisi, konsep,
argumentasi logis, aksi, dan bahkan reaksi. Setiap individu berhak berdiri pada titik manapun. Setiap individu tidak berhak untuk menuding 'bodoh' terhadap individu yang lain. Adalah hak setiap orang untuk mengakumulasi potensi yang ada pada dirinya.

Sayangnya Kang, setelah aku ikuti setiap mata kuliah, yang aku dapati adalah kekuasaan dengan 'jubah kecendikiawanan'. Aku seakan-akan menelan pil pahit yang dicekoki ke dalam mulutku. Jika aku tidak rajin menghapal, maka aku akan diberi nilai D bahkan E. Sebuah gagasan dalam kebiasaan hapalan melulu sama sekali tidak diakui. Nilai-nilai berpikir telah terkotaki menjadi *multiple choice*. Para pendidik seakan-akan menjadi penguasa dengan tongkat komando yang siap ditudingkan. Bahkan para pendidik siap menjadi eksekutor yang menghakimi setiap gagasan yang muncul. Gagasan yang ada di dalam otak siap dipermak menjadi sebuah sistem mekanik yang responsif dan adaptif.

Sekali lagi, bagiku sebuah lembaga pendidikan tinggi adalah kumpulan para pendidik. Aku tidak ingin membedakan mana itu penyelengara pendidikan dan mana itu para pendidik. Bagiku sama saja mereka adalah pendidik.

Sebagai seorang pendidik, tentunya kearifan sangat diperlukan. Seorang pendidik hendaknya bertindak tidak saja sebagai seorang sohib yang bisa diajak dialog bahkan berdebat secara terbuka sebagaimana layaknya Socrates dengan murid-muridnya, tetapi juga dapat bertindak sebagai seorang empu yang mampu menempa dan menggodok seorang murid menjadi pendekar pembela kebenaran. Seorang pendidik tidak boleh bertindak sebagai penguasa. Seorang pendidik hanyalah seorang wasit yang menjaga aturan sebuah pertandingan, bukan sebagai hakim yang mengeksekusi. Ini solusi yang aku tawarkan Kang.

Di samping kegetiran ilmu telah berubah menjadi simbol kekuasaan, aku pun tertimpa oleh kegetiran dari para pendidik yang menjadi pelaksana kekuasaan yang otoriter. Tidak ada lagi mimbar bebas di dalam ruang kuliah. Tidak ada debat ketika SK kenaikan uang SKS dan SPP diberlakukan. Semua itu tidak diperlukan semangat uji logika. Berdebat dengan seorang pendidik dapat diartikan menggoyang otoritas kekuasaan keilmuan yang dimilikinya. Itu berarti suksesi, bahkan subversif

Sepertinya lembaga ini telah menjadi kumpulan dari para penguasa, dan aku pun hanya menjadi jelata. Idealismeku untuk mengkoreksi ketidakbenaran tiba-tiba pupus. Aku tidak mampu lagi mengatakan sebuah kebenaran. Yang aku jumpai hanyalah serangkaian ketakutan akan diskors jika aku menggelar mimbar bebas, tidak lulus jika aku tidak menghapal diktat perkuliahan, bahkan tidak bisa banyak duit jika aku punya IPK di bawah rata-rata

Aku tidak ingin menuntut. Sebab, pada kenyataannya, aku memang tidak bisa menuntut. Aku hanya berharap suatu saat ada perubahan. Suatu saat ada timbang-dialog yang sehat. Ada pula diskusi dan debat yang harmonis. Dan aku masih percaya bahwa pilar demokarsi masih bisa ditegakkan di jagad pendidikkan.

Kang, mungkin dalam kesempatan ini aku tidak banyak mengaitkannya dengan demokrasi, politik, budaya, sosial, dan ekonomi. Terus terang aku sanggup tak sanggup memberikan semua solusinya secara konseptual dan tersistematis. Aku bukanlah mahaguru, seperti halnya para empu yang siap dibaca sebagaimana sebuah kitab. Aku hanyalah siswa dengan predikat "maha".

Kang, ingin sekali aku berceloteh banyak. Berbagi rasa dan pikir tentang banyak hal. Aku sudah lelah. Dan perutku pun mulai mulas dikejar rasa takut. Takut jangan-jangan aku tidak boleh lagi ke toilet di kampus tercinta ini.

Damai selalu di Tumaritis.

Sincerely,
Aum Muharam

Kebijakan Politik dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang berhasil didesain oleh pemerintah Orde Baru selama dua dekade ini, memang merupakan sebuah prestasi yang khas untuk sebuah negara berkembang. Dari perspektif politik kita melihat bahwa kebijakan politik yang menekankan pada stabilitas nasional, secara gemilang telah meredam konflik-konflik sosial politik yang mengancam persatuan nasional. Akibat dari semua ini, bukan saja pembangunan ekonomi yang relatif berhasil, tetapi juga memberi peluang kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan dinamika internal organisasi yang lebih sehat, serta untuk lebih memfokuskan pada usaha-usaha yang menyangkut kepentingan rakyat yang sifatnya mendesak.

Dalam kaitan ini, paling tidak dua aspek yang perlu disimak. **Pertama,** kebijakan politik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi selama dua dekade lebih, telah mampu mengembangkan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 20 kali lipat. Ini adalah merupakan konsekuensi logis dari diberikannya peluang besar kepada kelompok-kelompok pengusaha dan pemilik modal untuk tampil secara solid seperti yang terjadi sekarang. Kemungkinan ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak pemerintah pada tahun 1980-an berusaha memerangi ekonomi biaya tinggi dan menggalakkan perekonomian berorientasi ekspor. Malah dengan maksud pemerintah untuk

Happy Bone Zulkarnain

mengalihkan sebagian kegiatan yang sekarang ini dikelola negara ke tangan swasta dapat ditafsirkan akan semakin memperkokoh kekuatan kelompok ini. Dalam analisa Richard Robinson (*Indonesia, The Rise of Capital, 1986*) peran mereka yang krusial ini sudah mulai tampak sejak awal berdirinya Orde Baru.

Kedua, sekalipun laju tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, karena adanya perbedaan-perbedaan besar dari kelompok-kelompok masyarakat dalam merespon peluang-peluang ekonomi, pertumbuhan itu sendiri secara inheren membawa ketimpangan sosial ekonomi yang besar. Keadaan ini pada gilirannya mendorong tampilnya isu-isu keadilan secara lebih eksplisit. Tambahan lagi, sejauh ekonomi biaya tinggi yang akan terus diperangi oleh pemerintah melalui mekanisme pasar yang semakin longgar, ketimpangan sosial ekonomi itu akan tetap besar.

Demikian pula masalah keadilan akan tetap bahkan semakin dipersoalkan rakyat banyak begitu tingkat kesadaran dan aspirasi mereka meningkat, sebagai konsekuensinya. Kasus-kasus keberanian petani untuk memperjuangkan nasibnya ke DPR karena perlakuan aparat desa yang tidak adil serta aksi-aksi mahasiswa dalam masalah sengketa tanah menunjukkan betapa pada satu sisi masalah keadilan akan mengundang simpati kelompok-kelompok masyarakat, dan betapa rakyat semakin sadar akan hak-haknya.

Dalam situasi seperti ini, ditambah lagi tidak adanya perbedaan substantif-ideologis diantara orsospol serta semakin kritisnya kekuatan-kekuatan di masyarakat, hampir dapat dipastikan bahwa masalah keadilan dan pemerataan akan mengundang keterlibatan yang lebih vokal dari banyak kelompok di masyarakat. Kendatipun demikian, mengingat sebagian besar organisasi kemasyarakatan di negeri kita tidak berdiri secara otonom dari pengendalian efektif negara, melainkan terjalin dalam ikatan korporatisasi, maka sistem yang ada nampaknya

Paradok: Pemukiman kumuh karib gedung pencakar langit

tidak akan mampu menciptakan pluralisme politik.

Namun demikian, dengan "gong" keterbukaan dan tantangan pemerintah kepada intelektual negeri ini untuk memperbaiki ketimpangan-ketimpangan yang ada, setidak-tidaknya kita sedang menuju *intellectual pluralism*. Di mana keragaman pemikiran bukan lagi hal yang tabu, dan pemikiran-pemikiran reflektis kritis akan tumbuh subur, sekalipun itu berbeda dengan elit penguasa.

Sikap Mental

Hampir dapat dipastikan dengan isu keterbukaan yang belakangan ini sering dilontarkan oleh presiden dan sebagian kekuatan masyarakat, keterlibatan mereka ini akan semakin aktif dan vokal dalam proses-proses pembangunan. Dapat diidentifikasi bahwa keterlibatan masyarakat akan bertumpu pada dua permasalahan dasar. Pertama, karena momentum pembangunan dan kesinambungan-nya harus tetap dipertahankan, sedangkan sumber-sumber negara untuk menanggung beban ini tidak memadai, mau tidak mau sektor swasta dalam hal ini pengusaha dan pemilik modal, perannya akan semakin krusial. Ini bisa ditafsirkan ketergantungan pemerintah pada sektor swasta akan semakin besar. Dalam konstelasi seperti ini bargaining power kelompok ini pada negara akan semakin meningkat lagi, dan sebagai konsekuensinya pemerintah harus siap 'berbagi kekuasaan' dengan mereka.

Kedua, laju pertumbuhan yang akan digalakkan memlalui pemberlakuan mekanisme pasar yang lebih intensif akan membawa dampak ketimpangan ekonomi yang tidak sedikit, mengingat adanya perbedaan yang bukan saja substansial tetapi juga gradual dalam kapasitas sebagian besar kelompok masyarakat dalam merespon terhadap peluang yang tercipta karena mekanisme pasar tersebut. Dihadapkan dengan ketimpangan pasar ini, tampaknya kelompok lain di masyarakat akan menjadikan isu keadilan dan pemerataan sebagai tema utama dalam diskursus politik mereka.

Beranjak dari keterlibatan kekuatan-kekuatan di masyarakat pada kedua permasalahan di atas, konflik-konflik yang terjadi sebagai akibat perbenturan kepentingan tampaknya juga akan bersumber pada dua permasalahan dasar tersebut. Sehubungan dengan memperbesar "kue nasional" yang menjadi target pertumbuhan ekonomi, konflik-konflik tersebut akan ditimbulkan oleh perbedaan pandangan dalam strategi mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut.

Sektor informal: Cagar alam ekonomi pribumi

Misalnya saja, strategi mekanisme pasar yang akan diterapkan lebih longgar untuk memperbaiki perekonomian belakangan ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini bisa dimengerti karena masalah pemerataan dan keadilan akan sulit di atasi melalui strategi ini. Kemudian mengenai pemerataan dan keadilan, konflik dapat terjadi karena adanya keengganan dari pihak pengusaha dan pemilik modal untuk menerima alternatif yang menjurus pada pemerataan, baik yang disodorkan oleh pemerintah maupun kelompok lain di masyarakat.

Tampaknya kalau kita jadikan patokan kasus kesediaan para pengusaha kuat untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada koperasi, terobosan NU untuk mengadakan dialog nasional —beberapa tahun lalu— dengan pengusaha dan nyaris tidak ada perbedaan ideologis diantara kekuatan-kekuatan politik, maka konflik-konflik yang terjadi akan sampai pada tahap konflik intelektual.

Konflik-konflik intelektual ini tampak akan semakin intensif lagi dalam era keterbukaan. Karena sejauh keterbukaan itu sendiri dimengerti sebagai iklim dimana terjadi suatu mekanisme dialog diantara berbagai pihak. Karenanya, perbedaan pandangan sebagai akibat pikiran reflektis dan kritis harus ditanggapi secara arif dan wajar. Tentu saja, disini negara dituntut untuk menyalurkan dan mengkoordinasi keragaman pemikiran di masyarakat itu secara kreatif untuk melakukan inovasi politik.

Sekiranya benar konflik-konflik itu terjadi pada taraf intelektual, maka dalam diskursus politik nasional diperlukan suatu sikap yang mengakui dan mengutamakan pertimbangan akal dalam memecahkan masalah dan bukannya dengan perasaan atau kekerasaan. Ini berarti rasionalisasi harus

menjadi pilihan etis yang bersifat apriori bagi semua pihak. Sekalipun begitu dalam menggunakan pertimbangan akal ini, secara psikologis kita akan selalu lebih siap untuk membenarkan diri daripada mempermasalahkan diri, dan cenderung mencari alasan yang mendukung dan membenarkan.

Karena itu barangkali relevan pikiran Karl Popper diingat di sini (1965), yaitu, bahwa kecenderungan itu harus dipagari oleh suatu sikap etis yang berani untuk memfalsifikasikan. Sikap etis seperti ini sangat diperlukan mengingat kelompok-kelompok di masyarakat tidak mempersoalkan lagi tujuan dari semua proses-proses pembangunan nasional. Masalahnya kemudian dipandang dari sikap etis tersebut hanyalah keberanian dari semua pihak untuk merumuskan kekurangan-kekurangan dan menyingkirkannya melalui kebijakan politik dan usaha-usaha praktis lainnya. Dan ini menuntut keterbukaan untuk merumuskan keadaan yang tidak ideal ketimbang yang ideal, yang salah dan keliru daripada yang benar. Untuk kemudian harus menjadi tantangan bagi semua pihak untuk mencari kebenaran secara bersama-sama dengan cara menyingkirkan yang tidak ideal dan salah serta keliru itu.

Kebijakan Politik

Dapat dikatakan bahwa sejauh kelompok-kelompok di masyarakat tidak lagi mempersoalkan tujuan akhir dari pembangunan nasional, dipandang dari sikap etis di atas yang harus dilakukan bukan lagi mempersoalkan Pancasila, melainkan mengurangi kekeliruan-kekeliruan dan kekurangan-kekurangan pada arah kebijakan sekarang. Ini berarti perlunya kritik yang terus menerus dan memeras pikiran mencari jalan keluar dan terobosan sehingga dengan itu kekeliruan bisa dikurangi.

Di samping itu, orientasi politik harus bersifat *piecemeal engineering*. Artinya, yang harus diubah oleh suatu kebijakan politik adalah kondisi dan situasi yang paling memenderitakan rakyat banyak (kekurangan, kemiskinan, penderitaan fisik dan lain-lain). Dengan demikian titik pangkal semua pikiran dalam diskursus politik adalah keadaan yang negatif di tengah masyarakat.

Pada saat ini persoalan yang memenderitakan rakyat banyak adalah semakin melebarnya ketimpangan (disparitas) pendapatan. Karena itu, pemecahan secara teknis ekonomis sangat diperlukan melalui perencanaan, kebijakan dan program-program yang kongkret. Gagasan yang sudah muncul, tetapi tidak pernah terwujud sampai saat ini, adalah alih saham nasional. Program ini sama dengan program *landreform* untuk sektor pertanian.

Meskipun demikian, dukungan secara politik sangat diperlukan, terutama dalam memecahkan dilema keterkaitan yang tidak menguntungkan antara dunia bisnis dan birokrasi, atau memecahkan masalah korporatisme yang sedang meruyak saat ini.

Penulis dosen FISIP-UNPAR, Ketua Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) Jawa Barat. Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), dan kolomnis di media massa.
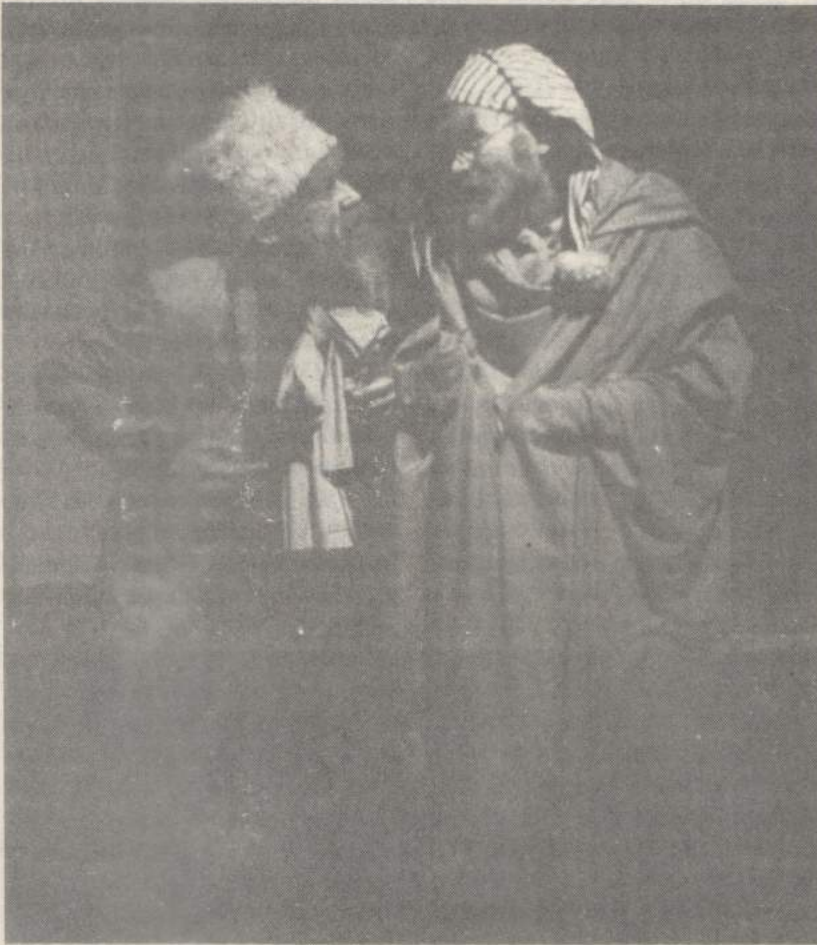
Teater Kampus: Alternatif Daya Seni Kita?

Dheasy Suzanti

Mahasiswi FH-Unpar, penikmat teater kampus

Introdusir

Embun masih melekat di dedaunan. Di sebuah pagi yang dalam dingin dan kegelisahan. kampus masih diam dan temboknya masih basah akibat embun yang mendekapnya tadi malam. ku buru angka 7:00, untuk menyelesaikan teaterku pagi ini.

satu langkah lagi pintu itu, sempat pula kulihat dosenku membetulkan letak OHP. tapi ada jerat yang menggenggam tanganku. Ku pikir tukang koran menyusulku ke kampus karena aku kesiangan membaca seluruh headline-*nya. ada bau temanku, yang baru saja datang dari dingin lewat tetesan embun untuk sengaja mengajakku bicara.*

dalam tangga-tangga tingkat dua kampus, kita bicara:

"tahukah kau bahwa beberapa saat lagi embun akan pergi bersama hentakan sepatu yang menjejal ruangan-ruangan kampus kita. ribut, binggar dan panas. setiap orang sibuk dengan proyek masa depan, mengisi format untuk keegoisan. dan tidak lagi ada orang yang peduli kampus kita panas, dingin atau sejuk? mereka menutup semua masalah yang tidak penting bagi hidup mereka. orang lain baginya berada di luar individunya. Itulah yang terjadi pada teater kampus kita".

aku terlelap dalam kebinggungan sementara temanku telah pergi dalam udara yang panas dan hentakan sepatu yang bermerek.

Kampus memang bukan dikhususkan sebagai ajang berkesenian. Tetapi kenyataan yang tidak disangkal, daya seni lahir dan telah ada sejak kita menangis untuk pertama kalinya. Malam kesenian, malam keluarga, malam apresiasi, pentas seni, atau apalah namannya menjadi pertanda bahwa sesungguhnya seni selalu dicari. Ia menjadi kebutuhan.

Persoalannya sSekarang, mungkinkah dan bagaimanakah teater dapat menjadi alternatif untuk mengisi kebutuhan akan seni. Tidaklah berlebihan bila Agustinus Rachmat Widianto, LPh, OSC sewaktu menjabat Pjs. Rektor di sebuah kesempatan kepada mahasiswa baru, di tahun 1993, berujar, "Jadilah kalian ilmuwan sekaligus seniman". Sebuah anjuran yang patut dicermati. Mengapa?

Seni memerlukan rangsangan intelektual. Dan teater hanya adalah salah satu dari sekian alternatif dalam berkesenian.

Mengdepankan teater kampus sebagai seni, tampaknya dapat memberi ruang berekspresi bagi kita. Alhasil, hal itu memberi bekal yang memadai untuk menelusuri ilmu pada titik hakekatnya. Walaupun istilah 'teater kampus' terlalu sombong, angkuh.

Dengan beranggotakan

mahasiswa, teater kampus praktis akan memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Kelebihan itu misalnya piliahn tema yang lebih kaya, namun kemungkinan bereksplorasi yang tidak barangkali akan berhadapan

dengan sejumlah hambatan dibanding dengan teater profesional (di luar kampus).

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, misalnya kegiatan yang dilakukan di kampus — termasuk teater— yang bersifat ekstra selalu berhadapan dengan kepandaian kita mencuri kesempatan diantara kuliah, tugas, dan pratikum. Di saat yang sama, hanya segelitir orang saja yang memiliki kemampuan seperti itu. Jauh untuk dikatakan untuk mewakili populasi mahasiswasecara menyeluruh. Apalagi 'rezim disiplin kampus' selalu bertekad mempersiapkan manusia super untuk siap ditempatkan pada Repelita (entah keberapa) yang akan lepas landas.

Menyoal kembali teater kampus, bagaimanapun, akan kembali pada persepsi mahasiswa itu sendiri. Bagaimana seorang mahasiswa memandang teater sebagai wilayah kesenian yang asyik untuk diselami. Sebagaimana kecenderungan yang bisa kita jumpai di setiap kampus dimanapun, persepsi mahasiswa terhadap teater bukan persepsi kolektif, melainkan persepsi individu. Hal ini bukan karena mahasiswa tidak berpengetahuan, tidak sadar bahwa dirinya menjalani hidup seperti memainkan teater diri.

Terlebih lagi media massa tidak emnyediakan ruang yang cukup bagi jurnalisme teater. Penerbitan kampus berlaku serupa. Tidak ayal lagi, semua itu melengkapi matinya aktivitas teater kampus. Apalagi membentuk sebuah gelanggang teater dengan segelitir persepsi individu, seperti yang terjadi pada nasib teater kampus di Universitas Parahyangan. Kendati demikian, kita agaknya masih bisa menyemangati: "Hiduplah bagi kematiannya".

Teater: Medium

Seni untuk seni *(art of art)* yang kerap dikumandangkan, dalam banyak sisi, bagi teater boleh dibilang terlalu sempit. Bagaimana tidak, teater sebagai seni sebenarnya hanyalah mediator. Ekspresinyalah yang memiliki misi keangungan. Dan, di balik semua itu, teater juga merupakan kerja intelektual.

Sejarah telah mencatat, banyak pergolakan dan perubahan sosial di muka bumi ini diberangkatkan dari semangat yang dihembuskan teater. Berpijak dari hal itu, tidak heran bila pertunjukan teater dibatalkan. Sebagai wilayah kesenian, teater memungkinkan memberi rangsangan masyarakat lewat simbol yang diekspresikannya. Sisi inilah yang menyebabkan kesenian (baca: teater) sering dipandangan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Barangkali hal ini pula yang membuat negara binggung apabila dirasakan ekspresi itu bertentangan dengan kehendaknya.

Di pihak lain, teater merupakan medium berbagai bentuk komunikasi. Radhar Panca Dahana (dalam sebuah tulisannya *"Tuba Politik pada Teater"*, 1994) mengungkapkan bahwa teater berurusan dengan dimensi kekinian, yang lewat variasi simbol, idiom, dan bentuk-bentuk teaterikal lainnya akan lebih mendekatkan pada gagasan publiknya. Pendapat ini semakin memperjelas fungsi seni teater yaitu berupa penyampai atau *"a public medium of communication"*.

Namun, hal ini bukan berarti, dan ini patut kita garisbawahi, bahwa alternatif untuk memilih teater bagi pengisian daya seni bukan karena universitas kita tidak memiliki fakultas seni (sastra), tetapi lebih ditekankan pada kemampuan teater sebagai seni dalam mengembangan kemampuan komunikasi kepada publik. Dan hal ini penting untuk melatih ketajaman intelektual.

Peran Ilmuwan dan Peneliti dalam Era Industrialisasi

Andreas Parestu

Peneliti, profesi yang selama ini dipandang sebagai lahan kering akan mempunyai prospek pengembangan karier yang sangat baik. Setidaknya, hal itu dapat kita simak gejala-gejala yang telah diungkapkan di atas, bahwa dalam sistem manajemen profesional yang telah siap terjun ke pasar global harus memiliki perangkat kemampuan teknologi baik itu *hardware* dan *software*-nya. Berarti peran ilmuwan dalam melakukan langkah-langkah penelitian tentunya harus mengarah pada inovasi dan rekayasa yang memberikan peluang pasar.

Lebih jauh dari itu peran peneliti dan ilmuwan hendaknya tidak terpaku pada menara gading saja. Hasil-hasil penelitian serta rekayasa inovatif teknologi tentunya mampu memberikan proyeksi pembukaan lahan baru suatu produksi, penyerapan pasar, perhitungan *break event point*, serta peluang-peluang paskatren suatu produk. Alhasil, hal ini memberi arti meningkatkan pendapatan perkapita. Di samping itu, aspek lingkungan yang cenderung menjadi dampak produksi sebenarnya memiliki kedudukan yang cukup bergengsi bagi peneliti dan ilmuwan. Sebab dengan pilihan ini, otomatis dengan mengacu pada konsep *ecotechnology* tersebut rekayasa teknologi dan lingkungan menjadi titik strategis.

Dalam tabel di atas kita dapat lihat saat dunia masih dicekam perang dingin, pembiayaan R&D lebih terakumulasi pada bidang militer (25% dari total keseluruhan). Angka tersebut cukup besar. Prediksi dari data tersebut, terlebih di tengah perubahan politik dunia secara global, sudah pasti prosentase dana R&D tersebut akan mengalami transformasi yang radikal pula. Penelitian nantinya akan tersebar secara merata, meskipun terjadi akumulasi pada bebeesional harus dirintis sedini mungkin sejak di bangku kuliah. Kerjasama pelatihan ini sangat penting. Sebab jika swasta dipaksa sendiri melakukan penelitian tentu sangat mahal sekali ditambah sejauh mana aset peneliti dan ilmuwan pada suatu perusahaan siap melakukan serangkaian rekayasa dan inovasi suatu produk?

Tabel berikut memperlihatkan aspek pembiayaan penelitian dan jumlah ilmuwan yang terjun ke dalam dunia penelitian terlihat perbandingan angka-angka pada negara maju. Negara berkembang seperti Asia (Indonesia termasuk di dalamnya) hanya 1,6 % dari prosentase total. Jumlah peneliti sebesar 9,4 % dari stok peneliti dunia menunjukkan betapa menimnya minat untuk terjun ke dunia penelitian. Keadaan ini bisa dipahami karena jumlah dana penelitian sangat minim sekali, selain itu fase peradaban di negara berkembang masih dalam fase agraris yang serba kekurangan.

Pembiayaan R & D di bidang pertanian untuk seluruh dunia hanya 3 %. Prosentase jumlah ilmuwan di negara berkembang sebesar 12,6 % sangat tidak seimbang dengan akumulaasi 87,4 % ilmuwan di negara maju. Dari data di atas dapat kita perkirakan bahwa untuk suatu negara industri sangat dibutuhkan tenaga profesional dalam bidang

Wilayah	Pembiayaan dalam Milyar $ US	Persentase dari seluruh dunia	Jumlah (ilmuwan) engin R&D dalam ribuan	Persentase dari seluruh dunia
NEGARA BERKEMBANG	2.77	2.9	286	12.6
1. Afrika (termasuk Afrika Selatan)	0.30	0.3	28	1.2
2. Asia (tidak termasuk Jepang)	1.57	1.6	214	9.4
3. Amerika Latin	0.90	0.9	46	2.0
NEGARA MAJU	93.65	97.1	1.990	87.4
1. Eropa Timur (termasuk USSR)	29.51	30.6	730	32.0
2. Eropa Barat (termasuk Turki dan Israel)	21.42	22.2	387	17.0
3. Amerika Utara	33.72	35.0	548	24.1
4. Lain (termasuk Jepang dan Australia)	9.01	9.3	325	14.3
Jumlah	96.42	100.0	2.279	100.0

Tabel 8. Distribusi Global Pembiayaan R&D dan Jumlah Peneliti Dunia - Jan Annerstredt (1979

Tabel Distribusi Global Pembiayaan R&D dan Jumlah Peneliti Dunia - Jan Annerstredt (1979)

Program	Persentase
Militer	24
Penelitian Dasar	15
Dirgantara	8
Energi	8
Kesehatan	7
Pemrosesan informasi	5
Angkutan	5
Pengamanan terhadap pencemaran lingkungan	5
Pertanian	3
Lain-lain	20
Total	100

Tabel Pembiayaan Riset & Pengembangan Dunia - Collin Norman (1979)

penelitian. Proyeksi dengan Indonesia tentunya dimasa-masa mendatang peranan itu harus banyak diisi dengan kemampuan lokal Ilmuwan dan Peneliti kita.

Dari tabel yang disajikan oleh

JUMLAH ILMUWAN DAN TEKNISI

		Jumlah Ilmuwan dan Teknisi		Jumlah Ilmuwan dan Teknisi yang Terlibat dalam Kegiatan R&D		Jumlah Teknisi Per 100 Ilmuwan dan Insinyur	
		Per 10 000 Penduduk	Per 10000 Tenaga Kerja	Per 10000 Penduduk	Per 10000 Tenaga Kerja	Seluruh Sektor	Kegiatan R&D
India	(1979)	11,56	21,00	0,42	0,67	17,4	8,5
Indonesia	(1976)	7,32	13,77	0,58	1,07		7,0
Thailand	(1975)	4,80	9,06	1,44	2,72	23,0	
Korea Selatan	(1978)	24,41	40,54	5,28	7,11	13,5	4,9

Sumber: World Bank, *World Development Report 1991*. Kakazu, H., "Industrial Technology Capabilities and Policies in Selected Asian Developing Countries", *ADB Economic Staff Papers*, no. 46 (June 1990).

Tabel Jumlah Ilmu[illegible]an & Teknisi - World Bank, World Devevelopment Report [illegible] (Kakazu,

World Bank, kita dapat melihat pada tahun 70-an kondisi jumlah ilmuwan Indonesia untuk per 1000 jumlah penduduk hanya 7,32 persen berarti berada di bawah India dan Korea Selatan. Jumlah tersebut lebih terakumulasi pada negara Korea Selatan secar mencolok. Meskipun dari perbandingan jumlah kita lebih besar dari Thailand, namun dari kuantitas penelitian yang dilakukan oleh Ilmuwan Indonesia (),58) berada di bawah Thailand (1,44). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan yang dilandasi faktor-faktor tertentu dalam pengembangan rekayasa melalui penelitian di Indonesia sangat kurang.

Strategi untuk meningkatkan peran peneliti dan ilmuwan seperti yang diungkapkan Dr. Anwar Nasution (1992) dapat ditempuh dengan dua mekanisme; yaitu mekanisme Pasar dengan meningkatnya pengakuan dunia dan nasional atas *Individual Property Right* maka mendorong kita untuk melihat peluang seperti integrasi pasar komoditi, keuangan dan pasar tenaga kerja nasional yang lebih erat dengan pasar dunia; sekaligus membuka peluang alih teknologi melalui mekanisme pasar. Mekanisme yang ditempuh dengan pembelian hak cipta, paten, merk, resep, bibit unggul maupun bantuan teknis tenaga asing. Alih teknologi melalui penanaman modal , asing, perusahaan patungan, lisensi, subkontrak, proyek *turn key*, dan kontrak manajemen.

Selain itu jalur mekanisme non-pasar dapat ditempuh dengan program wajib belajar, investasi individu melalui program penyekolahan ke luar negeri (meniru Jepang), program penerjemahan buku-buku teknologi untuk lembaga-lembaga pendidikan, meningkatkan sarana laboratorium dan pusat-pusat penelitian dan pengembangan. Selain itu potensi lokal dengan keberadaan swasta dan perguruan tinggi semakin dirangsang ke arah kerjasama yang saling menguntungkan. Polemik panjang selama ini antara dunia usaha dan perguruan tinggi adalah tentang tenaga æsiap pakai dan siap latih dimana akhirnya dunia usaha tidak bisa semata-mata menggenjot dunia perguruan tinggi menjadi sapi perah untuk menghasilkan tenaga siap pakai. Perlu dipahami bahwa dana untuk *training* semacam itu sudah sepantasanya menjadi beban swasta. Selain itu dana perguruan tinggi sangat terbatas. Tanpa pengertian dan peran swasta yang rasional sangat susah untuk mendorong potensi lokal ini berkembang.

Sebuah Epilog tentang Etika Penelitian

Pada prinsipnya terdapat dua metode kasar untuk mengukur penguasaan serta kemampuan teknologi suatu bangsa dan membandingkannya dengan kemajuan teknologi bangsa lain. model tersebut:

The Total Factor Productivity Approach

Lebih menekankan bagaimana efisiensi dan efektifitas yang dicapai dari prosedur *input* dan *output* sehingga diharapkan produksi akan memberikan kontribusi pada kemajuan teknologi. Kelemahan pendekatan ini sering mengabaikan kontribusi variabel lainnya (kebijakan perdagangan, kredit, tingkat suku bunga, kurs devisa, pajak, harga input dan skala ekonomi) pada peningkatan produksi dan produktivitas.

Revealed Comparative Advantage

Metode ini menggambarkan

daya saing relatif satu atau sekelompok komoditi yang diproduksi oleh suatu negara di pasar dunia. Jika suatu negara tidak mengunakan teknologi tepat guna dalam memproduksi komoditi tersebut, maka tidak mungkin negara tersebut bersaing di pasar dunia. Kelemahan metode ini bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi sematamelainkan juga faktor manajemen, dan politik negara yang bersangkutan.

Sekarang tergantung kita ingin melihat dari sisi perbandingan yang mana. Namun semua pemikiran di atas hanya kuantitas yang menjadi tolok ukurnya. Sementara di sisi lain kita tidak pernah berpaling pada kualitas mental yang dihasilkan oleh suatu kemajuan teknologi tertentu. Dan untuk hal ini mungkin belum ada metodenya, yang ada hanya filsafat keilmuan yang terkadang terlupakan. Pemikiran-pemikiran futorolog seperti Alvin Toffler tentang model peradaban yang diuraikannya, serta Charles Jenks melalui diagramnya peradabannya, Thomas Khun (fisikawan) dalam *Teori Paradigma*-nya, tentunya tidak akan melarutkan kita begitu saja terhadap kemegahan suatu ilmu. Saya masih percaya dengan apa yang diungkapkan Descretes, filsuf Yunani (1596-1650) memandang manusia sebagai *ens rationalis* atau mahluk berpikir. Teori tersebut lebih menekankan pada pentingnya kesadaran akal sebagai pangkal peradaban. Pemikian tersebut menunjukkan bahwa suatu peradaban membutuhkan para pemikir yang bijak dan relevan terhadap jamannya. Peneliti-peneliti dalam multidisiplin ilmu merupakan *ens rationalis*, namun bukan cuma sebagai manusia berpikir saja. Peradaban yang mau maju mengharuskan orang berpijak pada fajar budinya.
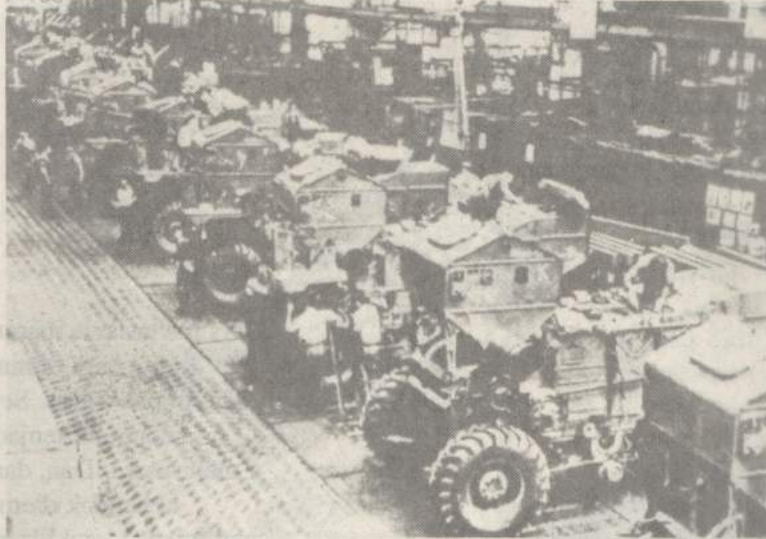
Albert Enstein, fisikawan besar dalam pesannya kepada mahasiswa di *California Institute of Technology* tentang hakekat nilai dan ilmu cukup baik untuk menjadi bahan renungan buat kita (mahasiswa) para calon ilmuwan dan intelektual.

Ia memberikan ilustrasi tentang pria muda yang baru saja menikahi istrinya yang tidak terlalu cantik. Lalu orang muda itu ditanya apakah dia merasa bahagia atau tidak? Dia menjawab," Jika saya ingin mengatakan yang sebenarnya, maka saya harus berdusta". Kemudian beliau memberikan gambaran lain tentang orang Indian yang dianggap tidak beradap, jika dibandingkan dengan manusia barat. Namun di sisi lain terdapat makna yang cukup mengesankan dan ironis. ternyata anak-anak di seluruh dunia yang beradab itu senang sekali bermain meniru-niru Indian. Ironis bukan? Pada akhir pesannya, beliau mengatakan bahwa kita tidak cukup hanya memahami ilmu untuk meningkatkan kehidupan manusia. perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya justru merupakan penekanan minat utama dari semua iktiar teknis. Perhatian kepada masalah besar yang tak kunjung terpecahkan dari penempatan kerja dan pemerataan benda. Semua itu bertujuan agar buah cipta dari pemikiran kita akan menghasilkan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan. Janganlah kau lupakan hal ini di tengah tumpukkan diagram dan persamaan, demikian ungkap Enstein mengakhiri sambutannya.
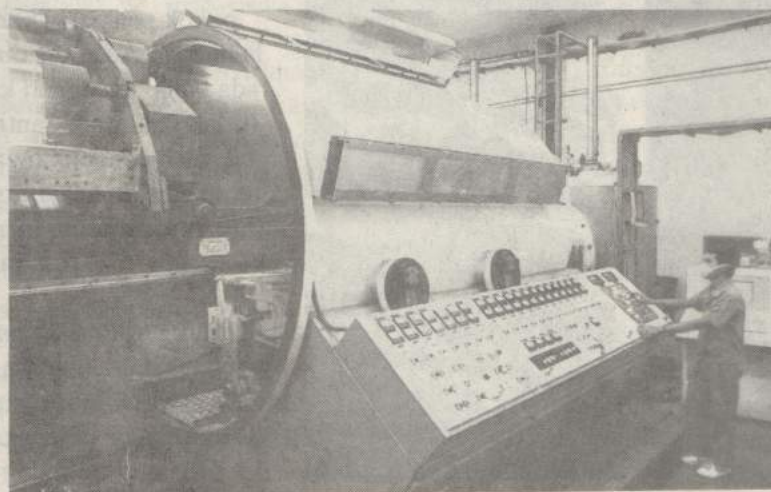
Hal ini juga mengingatkan seluruh insan calon intelektual, dan para peneliti, bahwa kita tidak boleh terbius dengan arus global yang terkadang pincang jika tidak dimbangi dengan etika keilmuan.

Bukankah yang kita cari sebenarnya sintesis antara ketajaman analisis barat ala Enstein dengan kearifan Sang Budha dari Timur?

Penulis adalah Mahasiswa FT-Unpar

Pers Mahasiswa: Kehendak Banyak?

Sebelum tintamu menjadi darah
kata-kata akan tetap tinggal bunyi;
kebisingan lain di tengah hingar-bingar dunia

Saini KM

Pers mahasiswa ibarat legenda yang terus hidup bagi dunia kemahasiswaan. Ia menyimpan mitos. Sejarahnya yang tidak sebentar menjadi insipirasi gerakan mahasiswa. Dan, dari sanalah, sejumlah kehendak diembankan kepada pers mahasiswa: terakhir, misalnya, ia diharap dapat menjadi "pers alternatif". Sementara itu, di saat yang sama, kendala eksternal dan internal bertumpuk di hadapannya. Saking bertumpuknya, kendala-kendala itu ibarat "gajah besar bengkak di depan mata" sehingga lupa bahwa ada "kuman yang jauh dan mestinya tampak menjadi tidak tampak."

Alhasil, kendala internal sering menjadi pokok persoalan yang tidak pernah habis-habisnya: Ada pers mahasiswa hidup subur, ada yang "menggali kubur" sendiri, bahkan (tidak jarang) di-"antar"-kan ke alam kubur oleh pengelolanya sendiri. Di samping, tentu saja, kendala eksternal. Jalin kelindan itulah yang kerap menjadi pokok persoalan pers mahasiswa hingga kini.

Untuk itu, *ParaHyangan* mengajak Anda, pembaca, untuk melongok pasang surut pers mahasiswa di Indonesia, dan kiprahnya kini. Dan, sebagai pelengkap, kami menurunkan tulisan pendukung soal pers mahasiswa.
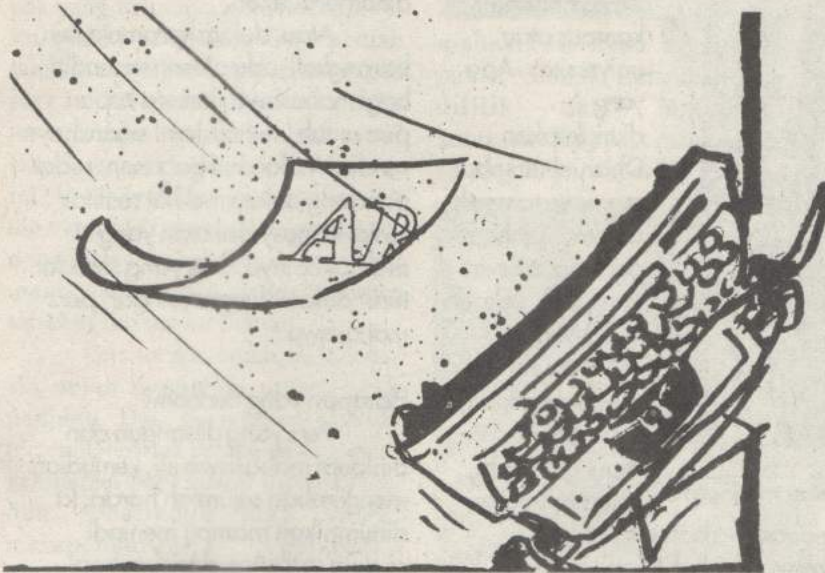
Ia yang Mengalir Tiap Masa

"Pers mahasiswa ibarat air yang akan terus mengalir." Pepatah inilah yang diyakini banyak pegiat pers mahasiswa. Dan, boleh dibilang, kalimat bijak yang pernah dilontarkan Amir Effendi Siregar, aktivis pers mahasiswa tahun 1970-an, menjadi benar adanya. Setidak-tidaknya, semenjak tahun 1920 hingga paruh 1990 ini, pers mahasiswa telah mengisi 'ruang' kehidupan kemahasiswaan Indonesia. Terlepas kemudian semisal soal bobot yang dikandungnya. Pun kualitas, kuantitas, cakupan isi, serta sebaran yang dijangkaunya.

Kehadiran pers mahasiswa, dalam banyak sisi, semestinyalah dapat dipandang sebagai sebuah kewajaran. Sebab, sebagaimana yang dituturkan pengamat sosial yang dikenali pula sebagai sastrawan *mbeling* Darmanto Jatman, bahwa amat sulit membayangkan kehadiran sebuah kampus dalam masyarakat kalau tidak ada saluran bagi mahasiswa untuk menjelaskan buah pikirannya tentang masyarakatnya. Dan, pers mahasiswa, adalah sebentuk kesaksian, sebab mahasiswa pun ingin menjadi anak zaman(!). Malahan, dalam konteks yang lebih melebar, seperti kesaksian sejarahwan Noegroho Notosoesanto, mantan pegiat pers mahasiswa yang pernah dipercaya menjadi Ketua IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) tahun 1950-an, pers mahasiswa di negara-negara berkembang turut mengambil peran dalam persoalan-persoalan nasional, karena di sanalah salah satunya mereka mulai mengisi peran intelegensia sejak awal, sejak mulai menuntut ilmu.

Riuh Rendah oleh Mitos dan Legenda

Dijalankannya konsep NKK/BKK di tahun 1978 harus dibayar mahal bagi kehidupan pers mahasiswa. Banyak pers mahasiswa —kerap menjadi corong dan medium bagi ide-ide mahasiswa— dibreidel. Pemberlakuan konsep itu, memang pada akhirnya, mencipta ruang yang tidak nyaman bagi kehidupan kemahasiswaan Indonesia. Organisasi mahasiswa ibarat macan ompong. Dan dari hal itu, pers mahasiswa pun terkena getahnya. Mahasiswa kembali suntuk menjadi 'penikmat' *textbook*. Diakui atau tidak, Depdikbud sendiri menganggap NKK/BKK melencengkan arah pengembangan kemahasiswaan, terbukti dengan semakin tidak pedulinya mahasiswaterhadap organisasi mahasiswa, sehingga SK 0457/U/1990 (dikenal SMPT) digulirkan.

Di tengah pemberlakuan NKK/BKK itu, banyak mahasiswa yang mencari penyaluran dan menata dirinya melalui pers mahasiswa (yang sebagian dibangun lewat kelompok studi). Ini terjadi pertengahan tahun 1980-an. Kehendak untuk menyemarakan kehidupan kemahasiswaan ini berkaitan erat dengan mitos yang telah menjadi bangun kesejarahan pers mahasiswa.

Soekarno, jauh sebelum menjadi *founding fathers* dan memproklamasikan republik ini, mempunyai media yang dinamai *Fikiran Ra'jat*. Atau, contoh yang kerap dijadikan acuan, direpresentasikan oleh pers mahasiswa yang terbit di Bandung: *Mahasiswa Indonesia Edisi Jawa Barat* yang dikomandani Rahman Tolleng. Tidak kurang pula koran mahasiswa ini turut 'berjasa' mengantarkan Orde Baru memegang tampuk kekuasaan seusai Orde Lama.

Riuh rendah mitos dan legenda tersebut memang tidak berlebihan ditujukan buat pers mahasiswa. Pasalnya: hampir semua tokoh-tokoh mahasiswa, yang kemudian mengedepan sebagai pemimpin, dilahirkan dan digodok dalam pers mahasiswa. Dari pers mahasiswa, untuk menyebut beberapa nama, ada Noegroho Notosoesanto (Mantan Mendikbud), Sarwono Kusumaatmaja (Menteri KLH),

menyebut beberapa nama, ada Noegroho Notosoesanto (Mantan Mendikbud), Sarwono Kusumaatmaja (Menteri KLH), Prof. Kusnaka (guru besar Unpad), Saneto Yuliman (kritikus seni dari ITB, alm.), Prof. Koesnadi Harjasoemantri (mantan Rektor UGM), Enggartiasto Lukito (Ketua REI), atau Parakitri (sosiolog, *KOMPAS*), pun Fadel Muhamad (pengusaha). Dan, di sana pula, mahasiswa amat berkemungkinan mengembangkan keintelektualannya. Bahkan, sosiolog Dhaniel Dhakidae memandang pers mahasiswa sebagai 'cagar alam kebebasan pers', sehingga ide apapun yang berasal dari mahasiswa dapat ditampung.

Masa depan pers mahasiswa: Optimis dan meringis?!

Melongok kesemarakan pers mahasiswa lima-enam tahun ke belakang, terkhusus dengan terbitnya kembali pers mahasiswa di hampir semua perguruan tinggi, menjadi isyarat yang patut dicermati. Bagi Yus Ariyanto dari Majalah Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, *faktum*, masa keemasan pers mahasiswa yang mampu menjadi sarana pengucapan mahasiswa dalam bidang sosial politik telah bergeser. "Retorika profesionalisme ilmu yang digembar-gemborkan telah berakibat pada pers mahasiswa yang cenderung spesifik pada disiplin keilmuan," papar penikmat seni ini memberi ilustrasi.

Sementara itu, menurut Dhaniel Dhakidae, sebagaimana dikutip *faktum* (VII/1992), perkembangan pers mahasiswa amat bergantung pada perkembangan kampus atau universitas. Apa yang diungkapkan Dhaniel tersebut memang tampak dalam 'wajah' pers mahasiswa yang lahir dekade 1980 hingga 1990-an ini. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri pula, sejumlah pers mahasiswa banyak yang menyadari hal itu, sehingga berupaya melepaskan anggapan itu dalam memvisualisasikan dirinya. Hanya saja, untuk bergerak jauh agar sejajar dengan pers mahasiswa yang lahir terlebih dahulu (era 1960-an atau 1970-an) masih sulit.

Tampaknya sejarah yang begitu mewaris itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan pers mahasiswa sekarang ini. Kendati, tidak bisa tidak, harus diakui niatan untuk mengembalikan mitos pers mahasiswa —dalam banyak sisi— berhadapan dengan kendala eksternal maupun internal. Bahkan, bisa jadi, mitos dan legenda tersebut menjadi "beban kesejarahan" yang tidak mudah dipikul.

Hanya saja, persoalan yang menyisa dari semua itu adalah dunia kemahasiswaan Indonesia, selalu 'menghadirkan' pers mahasiswa sebagai pilihan aktivitas. Seolah-olah, realitas masa lalu yang menjadikan dirinya dengan segala beban yang mesti dipikulnya menjadi dinomorduakan.

Atau, dalam kacamata lain, barangkali, ada alasan tersendiri bagi mahasiswa dari era kapan pun untuk 'menuliskan' sejarahnya sendiri. Mulai dari gagasan, sudut pandang dalam melihat realitas sosial kemasyarakatan yang melingkupinya, pun yang sekedar turut dalam 'hingar-bingar' pers mahasiswa.

Harapan yang Berlebih?

Pers yang dibangun dan dihidupi mahasiswa ini, kemudian mengemban sejumlah harap. Ia dimimpikan mampu menjadi corong artikulasi dari wacana-wacana besar di luar dirinya. Jagat kemahasiswaanpun menempatkannya sebagai 'terompet', yang akan mempernyaring keberadaan dirinya. Keinginan yang demikian ini, sayangnya tidak dikaitkan dengan kondisi obyektif yang membalutinya; kondisi yang bersebab-akibat denagn kehidupan dan kelanggengan pers mahasiswa (produk yuridis, birokrasi kampus, pun iklim kemahasiswaan yang dibangun.)

Majalah ParaHyangan tengah mengeja sejarah

Tyas, Dheasy, Yeni, Edo, Ari

Toleh

Pers Mahasiswa Bubar Saja!

Ringgas P. Simanjuntak

Kalau memang sekarang ini ada yang namanya pers mahasiswa, itu berarti pers mahasiswa pernah lahir. Lalu seperti apa masa depan pers mahasiswa ini? Akankah dia terus berkembang atau malah mati? Bagaimana keberadaanya sekarang ini? Itulah beberapa pertanyaan yang dihadapi oleh pers mahasiswa di Indonesia dewasa ini. Dan dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tulisan ini dibuat.

Pers secara umum, di Indonesia, telah menjalani proses yang panjang. Dari perjalanan historis tersebut, terlihat betapa pasang surut kehidupan pers sangat dipengaruhi, dan sebaliknya juga sangat mempengaruhi, dinamika masyarakat dimana pers lahir, tumbuh, atau bahkan mati.

Pers yang murni dikelola oleh pribumi baru mulai muncul pada awal abad ke-20 ini. Pada awal perkembangan ini, kepentingan perniagaan sangat mendominasi wajah pers pribumi. Fungsi sosial pers, pada waktu itu, baru sampai pada taraf menjual tulisan atau menyalin dari "pers putih", yaitu pers yang dikelola oleh non-pribumi. Situasi ini mulai berubah ketika mingguan Soenda Berita terbit untuk pertama kalinya pada bulan Pebruari 1903 di Cianjur yang diikuti oleh lahirnya terbitan-terbitan pribumi lainnya seperti *Poetri Hindia, Medan Prijaji, Soeloeh Keadilan, Bintang Betawi*, dan lain-lain. Penerbitan ini memainkan peranan yang sama sekali baru dalam pers Indonesia, untuk per6tama kalinya yaitu sebagai pembentuk pendapat umum, alat memperjuangkan hak dan keadilan dan menyalakan keberanian melawan kolonialisme.

Sejak saat itulah pers memainkan peranan penting dalam menanamkan kesadaran dikalangan pribumi untuk menentang penjajahan sampai akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Meskipun cikal bakal pers mahasiswa telah muncul sejak jaman Kolonial Belanda, tetapi jika ditilik dari jumlah dan kontinuitasnya pers mahasiswa yang sesunguhnya dapat dikatakan baru mulai setelah kemerdekaan. Pada usia Republik Indonesia yang masih muda itu terbuka peluang yang sangat besar bagi pemuda dan mahasiswa untuk membuat media massa sendirinya.

Setelah beroleh pengakuan kedaulatan secara internasional, kehidupan politik Indonesia dengan cepat cenderung menuju sistem liberal. Pada masa demokrasi liberal ini, pers Indonesia memperoleh kebebasan yang paling besar yang pernah dicatat dalam sejarahnya. Mass media dengan leluasa menjadi saluran penyampaian aspirasi politik masyarakat, dan menampilkan kenyataan yang berkembang di masyarakat, nyaris tanpa sensor sama sekali.

Pada masa demokrasi liberal ini pula, pers mahasiswa mencapai puncak perkembangannya. Dari segi jumlah hampir setiap dewan mahasiswa perguruan tinggi yang ada pada waktu itu memiliki surat kabarnya sendiri, selain itu ada juga pers mahasiswa yang dikelola oleh organisasi mahasiswa ekstra kampus dan penerbitan-penerbitan tingkat fakultas. Pers mahasiswa Indonesia pada waktu itu juga telah mampu membangun jalinan kerja sama dengan pers mahasiswa luar negeri. Singkatnya pada zaman demokrasi liberal, pers mahasiswa menikmati kebebasan untuk melakkan aktivitas dan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya bahkan sampai pada tingkat internasional. Diakhir masa demokrasi liberal inilah lahir IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) sebagai organisasi independen yang menghimpun seluruh pers mahasiswa yang ada pada waktu itu.

Tetapi karena sistem politik pada masa itu belum.mapan dan tidak mengakar secara kultural, pers liberal kala itu justru menimbulkan kekacauan. Dekrit presiden 5 Juli 1959 menandai pergeseran di papan panggung politik Indonesia dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin dengan Soekarno sebagai sutradara sekaligus aktor utama. Semua konsep politik kala itu datang dan Soekarno dan setiap pidato-pidatonya menjadi pegangan dan kebijaksanaan yang harus dianut oleh seluruh aktivitas politik di negara ini. Pada waktu itu, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap kegiatan pers. Pers yang dapat hidup adalah pers yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan partai-

partai politik yang nota bene tunduk kepada otoritas presiden.

Sementara itu pers mahasiswa yang tidak menyatakan diri sebagai pengusung aliran politik tertentu yang diijinkan pemerintah, tidak diberi tempat untuk berkembang. Maka pers mahasiswa segera memasuki masa surut, dan ini masih diperburuk oleh perpecahan yang timbul di dalam dan antar-organisasi pers mahasiswa, karena diantara pengelolanya ada yang secara pribadi berorientasi kepada aliran politik tertentu, sementara sebagian yang lain ingin mempertahankan independensi surat kabarya. Akibatnya pers mahasiswa terperosok dan tidak sedikit yang tidak sanggup untuk bangkit kembali alias mati.

Demokrasi Soekarno dalam kehidupan politik Indonesia berkurang dengan segera sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang sekaligus menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin. IPMI pada waktu itu terlibat secara aktif dalam melenyapkan sistem demokrasi terpimpin secara politis. Hal ini dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai Biro Penerangan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Penerbitan pers mahasiswa waktu itu secara jelas bermaksud membongkar seluruh keburukan dari sistem tersebut. Lalu, langgam politik bergeser dari otoritarian menuju suatu langgam politik yang memiliki kecenderungan liberal. Kecenderungan ini dapat diamati dari kebebasan setiap organisasi politik dan media massa dalam menyuarakan aspirasi politiknya, kecuali —tentu saja— bagi kekuatan komunis dan organisasi yang berhaluan kiri lainnya dan media massa yang menjadi simpatisannya. Tetapi udara kebebasan hanya dapat dihirup pers dalam waktu singkat.

Pemilu tahun 1971 memunculkan Golkar dengan ABRI sebagai kekuatan utamanya, sebagai pemenang dalam memperoleh 238 kursi dari 360 kursi yang diperebutkan. Kemenangan Golkar yang diikuti dengan terbentuknya format politik Orde Baru yang memiliki komitmen tinggi pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, secara efektif membalikkan kecenderungan politik dan kehidupan pers ke arah otoritarianisme. Khusus bagi dunia komunikasi massa, otoritarianisme ini tercermin dari pemberangusan massal terhadap surat-surat kabar terkemuka, setelah peristiwa Malari tahun 1974, seperti: *Indonesia Raya, Pedoman, Harian Kami*, dll. Dan untuk pers mahasiswa Orde Baru menerapkan konsep *back to campus* bagi setiap bentuk kegiatan kemahasiswaan, termasuk pers mahasiswa. Jadi pers mahasiswa dibiarkan tetap hidup tetapi sebagai subsistem dari pendidikan perguruan tinggi.

Meskipun telah "dikandangkan" dan tergantung secara finansial kepada pimpinan perguruan tinggi, ternyata surat kabar mahasiswa tetap mampu dan berani menyajikan pemberitaan yang syarat dengan kritik terhadap kebijaksanaan pembangunan dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Malahan, tidak jarang, mereka melakukannya lebih keras dan lebih tajam dari pers umum. Ketika pada awal tahun 1978 beberapa surat kabar seperti *KOMPAS, Sinar Harapan, Merdeka, Indonesia Times, Sinar Pagi, Pelita*, dll dilarang terbit, pers mahasiswa dengan segara mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh harian-harian umum tersebut dengan isi pemberitaan yang sangat keras. Oplah pers mahasiswa pada waktu itu, mencapoai puncaknya dan dibaca oleh banyak orang sebelum akhirnya dibreidel juga.

Sejak saat itu, pers umum maupun pers mahasiswa mengalami pasang surut. Meski beberapa kali perundang-undangan yang mengatur kehidupan pers, undang-undang tentang pers untuk pers umum, dan undang-undang pendidikan, pun sejumlah aturan kegiatan kemahasiswaan untuk pers mahasiswa mengalami perubahan. Tetapi hal itu tidak pernah berhasil melepaskan pers, umum maupun mahasiswa, dari sub-ordinasinya kepada stabilitas ekonomi-politik yang menjadi komitmen Orde Baru.

Untuk kepentingan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi inilah dirancang sistem pendidikan tinggi yang sekarang diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia. Perampingan satuan kredit semester, pemendekan masa studi, pengetatan birokrasi, depolitisasi kampus, dan sebagainya membuat banyak kalangan tidak dapat tidak melihat perguruan tinggi sebagai lembaga yang menjamin kepentingan industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, yaitu tetap tersedianya suplay tenaga kerja profesional dan yang terus menerus memapankan status quo, karena mematikan kesadaran politik, dan sikap kritis civitas akademika di dalamnya.

Kondisi ini lebih dari pada apa yang terjadi di masa lampau, memberikan beban yang semakin

berat bagi pers mahasiswa. Pada tataran konsep perguruan tinggi dewasa ini semakin bergerak ke kutub yang secara diametral bertentangan dengan misi dan visi pers mahasiswa. Jika perguruan tinggi beroperasi untuk mempertahankan status quo, pers mahasiswa sebaliknya membawa pesan-pesan yang membangkitkan kesadarab kritis dan terus menerus memperbaharui realitas. Padahal sistem pendidikan tinggi memiliki sumber daya, legitimasi dan segala macam hal yang diperlukannya untuk mencapaiu maksud-maksudnya, sementara pers mahasiswa?

Pada tataran teknis, kesulitan pers mahasiswa menjadi semakin jelas lagi. Pers mahasiswa, secara berkelakar, sering disebut terbit secara berkala,"kadang kala terbit kadang kala tidak". Waktu, dana, keterampilan, dan manajerial adalah masalah klasik yang dihadapi oleh kebanyakan pers mahasiswa dan kendala-kendala ini, yan erat kaitannya dengan karakteristik perguruan tinggi itu sendiri, membuat pers mahasiswa sulit untuk terbit secara tidak "berkala" dan bahkan mati kehabisan nafas.

Untuk menjawab tantangan-tantangan itu, pers mahasiswa pertama sekali harus memetakan posisi, kapasitas, dan peluang yang ada di sekitarnya. Hal ini penting , agar pers mahasiswa tidak terjebak untuk menjadi sernsasional dan bombatis akan tetapi secara konsisten membangun dan terus memperkuat basis untuk menjalankan misi pencerahan dan pengekspresian potensi intelektualitasnya. Ini berarti pers mahasiswa harus menekankan pada dua aspek yaitu sebagai aktivitas yang mendinamisasi kampus sebagai komunitas ilmiah dan sebagai sarana aktalisasi akal budi, perasaan dan kreativitas mahasiswa, jika tidak bubar saja!

*Penulis mahasiswa Teknik FIsika ITB. Mantan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mahasiswa ITB, **Boulevard.***

Menggagas Forum Kota

Adang Durahman

Seperti yang kita sudah maklumi, pers mahasiswa Indonesia memiliki akar sejarah yang tidak sebentar. Keberadaan pers mahasiswa seiring dan melekat dalam sejarah kemahasiswaan di Indonesia. ***Berkala Jong Java*** (1914), ***Indonesia Merdeka*** (1923), ***Gadjah Mada*** (1945-1950), ***Academi*** (1950-1966), atau juga pada ***Mahasiswa Indonesia*** (1966-1974) adalah sedikit contoh dari banyak pers mahasiswa yang disebut-sebut banyak memberi andil dalam lembar sejarah kehidupan bangsa ini.

Kebermaknaan pers mahasiswa dalam kilas balik sejarah tidak lepas dari memiliki nuansa dan aurora tersendiri. Pada pra-proklamasi misalnya, pers mahasiswa Indonesia bervisikan penyadaran rasa kebangsaa nasional sehingga tumbuh rasa percaya diri serta harkat martabat bangsa untuk menge-nyahkan kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, kendati berupa stensilan dan disebarkan lewat bawah tanah, pers mahasiswa tidak luput menerjunkan diri untuk memperjuangkan tercapainya proklamasi.

Tak luput pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, pers mahasiswa terlibat persoalan sosial politik. Dan, fase awal Orde Baru, pers mahasiswa menjadi tulang punggung "arus bawah" yang mengantarkan Orde Baru memegang tampuk kekuasaan, yakni dengan berita-berita yang "menyerang" Soekarno. Namun periode 1970-1974, suatu masa yang selama ini dianggap zaman keemasan pers mahasiswa, visi dan misi pers mahasiswa berubah arah menjadi arus bawah yang mengkritisi atas berbagai kebijakan Orde Baru yang dianggap mulai keluar dari rel cita-cita proklamasi. Tragedi Malari 1974, mengantarkan sikap dan posisi yang jelas antara pers mahasiswa dan penguasa orde baru. Hal itu berlanjut dengan kecenderungan yang ditunjukkan pers mahasiswa dalam dekade berikutnya. Hanya saja, pers mahasiswa tetap dihadapkan pada kenyataan berupa kendala internal dan eksternal tersebut.

Usaha untuk itu, salah satunya, adalah dengan pendirian forum di tingkat kota. Tak heran bila di Yogyakarta dengan PPMY (Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Yogyakarta), Malang dengan FKPMM (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang), dan Jakarta dengan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta. Bandung, sebagai kota yang pernah mempunyai sejarah yang cukup panjang dengan pers mahasiswa, sejak 1993 lalu mulai menata diri dalam menjalin kerjasama dan mengembangkan komunikasi antar pers mahasiswa Bandung, yaitu dengan dicetuskannya FPMB (Forum Pers Mahasiswa Bandung) di ITB pada tanggal 30 Septemer 1993.

Ide dan cita-cita pers mahasiswa Bandung terus bergulir. Hampir sebagian besar kampus yang memiliki penerbitan pers mahasiswa telah menorehkan tinta sejarah pengguliran ide dasar pendirian FPMB. Dimulai dari IKIP Bandung ***(ISOLA POS)***, ITB ***(Boulevard)***, Unpar ***(Majalah ParaHyangan*** dan

Solidera), Unpad *(faktum Fikom dan Polar FISIP)*, STKS (*Altruis*), IAIN Gunung Jati *(Suara Kampus)*, STIE Bandung(*sEntra*), STIE Tridarma

Jambore FPMB: menunggu gebrakan berikut

(Tridarmater), Unisba *(Suara Mahasiswa)*, UKM Maranatha *(Synergi)*, dan lain lain telah menjadi "saksi" peneguhan jati diri pers mahasiswa Bandung.

Ada banyak tujuan yang diembankan pada FPMB. Hal yang paling mendasar, pers mahasiswa Bandung hendaknya memiliki kesamaan persepsi dan pandangan sebagaimana perjuangan dan cita-cita pers mahasiswa yang telah mengisi lembaran sejarah bangsa. Komunikasi melalui jalinan emosional antaraktivis pers mahasiswa Bandung diharapkan membawa dampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas penerbitan pers mahasiswa di masing-masing kampus. Sikap empati dan berbagi rasa atas segala persoalan baik internal maupun eksternal diharapkan menjadi bagian dari keterlibatan para aktivis pers mahasiswa Bandung. Yang paling diharapkan, perasaan senasib dan sepenanggungan akan semakin tumbuh di kalangan aktivis pers mahasiswa. Dan yang tak bisa dilupakan, kepekaan dan keterlibatan pers mahasiswa Bandung atas berbagai gejala sosial dan kemasyarakatan akan semakin tumbuh dan menemukan format tepat. Kondisi sosial politik dan sosial kultural bangsa hendaknya menjadi kepedulian pers mahasiswa dan melibatkan diri menata tatanan sosial politik dan sosial kultural melalui media dan idealisme penerbitan pers mahasiswa.

Harapan dan cita-cita dasar FPMB seperti disebutkan di atas, paling tidak akan lebih jelas jika kita mengamati Deklarasi Pendirian FPMB. Dalam salah satu bunyi deklarasi, tertulis sebagai berikut: *"Selama satu dekade terakhir pers mahasiswa di bandung tidak mampu mendinamisasikan kehidupan dunia kemahasiswaan, masyarakat dan apalagi menjalankan sekian banyak peran 'agung'-nya di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas jauh berbeda dengan kemampuan dan peran yang bisa dimainkan oleh pers mahasiswa Bandung pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Tidak salah jika dikatakan saat ini pers mahasiswa Bandung mengalami proses defungsionalisasi sampai titik terendahnya.*
Ini bukan persoalan romantisme. Pers mahasiswa di Bandung gagal menjadi media pengembangan dimensi dan dinamika intelektual mahasiswa karena bergerak sendiri-sendiri. Sedangkan pada saat yang sama harus berhadapan dengan rumit panjangnya birokrasi serta peraturan-peraturan yang represif. Akibatnya, di kemudian hari, mahasiswa yang diberi amanat untuk melanjutkan perjuangan republik ini menuju masyarakat yang dicita-citakan, kemampuan mahasiswa pantas dan harus diragukan.

Berjambore

Untuk mewujudkan semua itu, di daerah Lembang, tepatnya di Cokole, tanggal 11-12 September 1994 kurang lebih 80 pegiat pers mahasiswa berkumpul. Dinginnya pegunungan Tangkuban Perahu, kabut tebal, dan segarnya bau hutan pinus, seolah menjadi saksi bisu atas sederetan aktivitas pers mahasiswa Bandung. Di tempat itu, dialog, api unggun, bakar jagung, baca puisi, renungan, rembugan, dan olok-olok hadir mewarnai Jambore Pers Mahasiswa Bandung.

Dalam jambore itu, selain ingin menunjukan bahwa berkemah, bagi pers mahasiswa, memiliki arti penting dalam menjalin kerjasama dan mempererat komitmen perjuangan. Banyak niatan yang diharapkan dari penyelengga-raan Jambore FPMB. Paling tidak, ada tiga target yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan interaksi dan jalinan emosional aktivis pers mahasiswa se-Bandung. Dengan modal interaksi dan komunikasi sesama pers mahasiswa, diharapkan komitmen "perjuangan" betul-betul senasib sepenanggungan. Kedua, jambore diharapkan bisa dijadikan wahana sosialisasi dan internalisasi ide-ide dasar terbentuknya FPMB sebagai "basis" perjuangan pers mahasiswa Bandung. Dengan hadirnya banyak aktivis pers mahasiswa dari tingkatan yang paling tua sampai yang termuda, FPMB diharapkan menjadi milik bersama dan dapat diturunkan sampai lapis "generasi". Dan, ketiga, adalah terlengkapinya perangkat-perangkat FPMB baik lembaga dewan perwakilan maupun kelompok kerja.

Cukup banyak kesan dan pengalaman yang dapat dipetik dari Jambore. Keakraban, solidaritas, integritas, dan militansi aktivis pers mahasiswa betul-betul diuji.

Forum ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri yang bermakna bagi pers mahasiswa jika memperhatikan harapan-harapan dan cita-cita dasar kemunculannya. Dan, kemudian, sejarahlah yang akan membutkikan, apakah FPMB akan mampu mengisi lembaran kemahasiswaan di Indonesia?

Penulis adalah Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mahasiswa ISOLA POS IKIP Bandung.

Pers Mahasiswa sebagai Pers Alternatif

Yussac F. Ananda

Menjadi sebuah kenisacayaan, iklim dan situasi politik berpengaruh besar dalam dinamika pers di sebuah negara. Para *expert* dan aktivis politik umumnya mengakui, evolusi pembangunan politik dalam sebuah negara amat berpengaruh — kalau bukan sangat menentukan— dinamika dan karakteristik persnya. Bahkan, di kebanyakan Dunia Ketiga, lembaga negara tampil dominan sebagai kekuatan superior yang mengatasi seluruh lapisan kekuatan sosial yang ada. Untuk persnya, kemudian bisa ditandai dengan kecenderungan larutnya kinerja pers dalam logika dan dinamika hegemoni negara.

Implikasinya: obsesi dan cita-cita pers sebagai pilar keempat demokrasi —di mana gambaran imajinernya dikonstruksi dari pers negara liberal (*"advance capitalist countries"*)— relatif terhenti di tingkat slogan. Karena itu, bagaimanapun, diskursus tentang pemberdayaan pers berujung dan menuntut relevansi perbincangan tentang kekuasaan. Wacana macam demikian, akan membuat keterangbenderangan dalam melihat wajah, format, kinerja, dan karakteristik dikreasikan.

Mengapa?

Dennis Mc Quail dalam bukunya *Mass Communication Theory*, mengisyaratkan bahwa pada dasarnya media amat bergantung pada pendayagunaan kekuatan yang ditentukan oleh unsur kekuasaan lain. Dan, dari sini, media sekaligus berfungsi sebagai terompet yang meniupkan suara dan kepentingan berbagai kekuatan sosial.Dan salah satunya adaah negara sebagai lembaga formal pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, bila lantas negara terlalu superior dibanding kekuatan-kekuatan sosial lainnya dalam masyarakat, pers mustahil mampu difungsikan sebagai pendorong dan pengobar proses perubahan sosial. Sebaliknya, malah berpotensi besar menjadi alat "peredam" dan "pengendali".

Dari pokok gagasan Quail itu, nyatalah kemudian bangun keberpihakkan pers memang sangat ditentukan oleh dinamika "pertarungan" kekuatan-kekuatan sosial dalam sistem politik yang melingkupinya.

Pers Nasional

Relevansi untuk membangkitkan *discourse* tentang pers sesungguhnya bukanlah hal baru dan istimewa. Meskipun saat ini, kita sekurang-kurangnya tengah

menyaksikan di aras nasional terjadinya berbagai kemelut aktual melanda dunia pers. Seperti terpantul dari fenomena pembreidelan tiga media besar baru-baru ini di tanah air. Tetapi, yang jelas, tulisan ini tidak diberangkatkan, diinspirasii, pun tidak hanya dipacu dari fenomena aktual itu. Tetapi, juga dipacu dengan keinginan untuk terus menerus merefleksikan eksistensi, dan kinerja pers nasional. Terlebih lagi dalam bentangan waktu yang tengah menyediakan peluang amat besar untuk terus terjadinya banyak perubahan dan pergantian. Setidaknya agar pemahaman kita atasnya senantiasa kontekstual dan historis saat meresponi zaman.

Secara kultural, pers nasional, berbeda dengan pers kolonial dan pers komersial. Ia tumbuh dan berkembang di atas misi untuk mengemansipasi Indonesia menuju bangsa yang merdeka serta berperadaban. Maka, pers nasional memijakkan dirinya di titik yangberbeda dengan pers kolonial. Karena biar bagaimanapun, pers kolonial bercorak konservatif, mendukung sistem kekuasaan yang menindas dan menyengsarakan rakyat. Sebaliknya, pers nasional justru meniatkan diri untuk membebaskan dan mencerdaskan bangsa dari belukar kepentingan kekuasaan yang membelitnya (baca: penjajahan).

Pers nasional juga berbeda dengan pers komersial. Pers komersial lebih mengoperasikan diri sesuai dengan dinamika kapital secara liberal dengan menonjolkan orientasinya pada tampilan pesan yang sarat unsur *entertainment*. Pun,ini semua terlihat sebagai melulu demi kemajuan kumulatif industri hiburan tanpa tedeng aling-aling — hingga bahkan terasa kelewat getol menggetarkan dewa-dewi primitif seperti *sex, crime*, dan lain lain. Pers nasional diniatkan dengan sekian cita-cita luhur agar dirinya bisa berperan memandu masyarakatnya menjadi bangsa terpelajar, beradab, dan secara aktif serta kritis turut membentuk ekologi-sosial yang menjunjung harkat dan martabat manusia.

Persoalannya, pada pasca-kemerdekaan, sebutlah sesudah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan, kendala-kendala untuk membentuk masyarakat dan bangsa yang humanis itu tidak berakhir. Bahkan, dalam banyak hal, kembali bermetamorfosis. Pers nasional yang diobsesikan itu tidak hanya harus dihadapkan dengan kekuasaan yang berseberangan dengan cita-citanya. Bahkan, ironisnya, berbenturan satu sama lain. Misalnya, diatasnamakan ideologi dan aliran yang

melatarbelakanginya. Disamping itu, kendala internal yang memanifestasikan larutnya logika pers nasional dengan kapital bukan saja kian mempersukar aktualisasi nilai-nilai perjuangan. Malah memperburuk dan menyudutkannya ke dalam posisi yang tidak relevan.

Untuk itu diperlukan keberanian untuk merumuskan kembali strategi dan visi perjuangan, agar pers nasional saat ini bisa tetap konsisten memperjuangkan misi yang sempat diembannya pada awal kelahirannya.

Kendala Internal

Aktualisasi jurnalisme politik, kali pertama (dan terutama) dilakukan adalah keberanian untuk berjalan menerobos belitan struktur kapitalisme. Hal itu berarti para aktivis pers harus mampu dan berani *survive* dengan basis material yang terlepas dari jaringan kapitalisme. Di tingkat empiris, hal itu dinyatakan dengan meredusir dan (kemudian) mengeliminasikan petak-petak iklan —yang bertaburan di lembar-lembar media massa.

Sekedar ilustrasi, pada 1993, nilai iklan yang diserap majalah dan koran masing-masing sebesar 103 dan 381 milyar rupiah. Jumlah itu sama dengan 40,1% jumlah belanja iklan nasional. Ini menandaskan betapa masifnya media massa dalam struktur kapitalisme.

Artinya, pandangan yang hanya menilai ancaman eksternal sebagai kendala tampilnya jurnalisme politik, tidak memadai untuk menangkap logika pers yang dikerangkai sistem kapitalistik. Liberalisme, sebagai bangun ideologi politik yang me-"roh"-i kapitalisme, tidak memiliki komitmen yang permanen terhadap kebebasan dan demokrasi. Maka, kendati dunia pers, meminjam ungkapan Goenawan Mohammad, adalah dunia yang paling banyak regulasinya berhasil dientaskan dari struktur politik yang represif. Ini tidak lantas berarti, secara otomatis, pers akan konsisten dengan cita-cita kebebasan dan demokrasi. Restruk-turisasi menuju jurnalisme politik justru memposisikan eliminasi kendala internal sebagai kendala utama.

Bingkai berpikir macam ini belum terpantul dari balik kobaran gerakan anti-pembreidelan dewasa ini. Mungkin benar isyarat Goenawan Muhammad: telah terjadi sesuatu saat ini, ketika para wartawan dari media yang tidak dibreidel turut mengadvokasi media wartawan yang dibreidel. Sesuatu yang sebelumnya belum belum pernah terjadi dalam sejarah Orde Baru. *Dus* masyarakat yang mendukung aksi-aksi dan demonstrasi. Pun sukar dipungkiri, gerakan tersebut bercorak reaktif dan parsial belaka. Apabila gerakan anti-pembreidelan kemarin hendak dipandang sebagai upaya untuk merealisasi pers yang konsisten dengan perjuangan demokrasi.

Bukti keparsialan dan kereaktifan gejala perlawanan adalah kenyataan tidak berlanjutnya diskursus pers alternatif dalam paradigma yang tepat. Alhasil, pemaknaan atas pembreidelan tidak terjebak dalam sekedar isu menentang regulasi pers (yang dibakukan melalui pengaturan SIUPP dan belantara regulasi lainnya). Sesuatu yang sesungguhnya hanya satu sisi kendala tampilnya jurnalisme politik. Di sisi lain, kendala internal yang justru lebih menghambat munculnya jurnalisme untuk rakyat, hanya disinggung secara implisit, kalau bukan tidak sama sekali.

Dalam konteks yang lebih khusus, pers mahasiswa yang dalam sejarahnya sempat tampil mengisi tereduksinya kekuatan oposisi pers umum dari pentas politik nasional (saat beberapa media massa terkemuka dibreidel di tahun 1974 dan 1978) mungkin dapat dikembalikan sebagai alternatif di tengah penyeragaman informasi dalam arus hegemoni negara.

Basis Material

Meski represi dan opresi terhadap pers mahasiswa terus berjalan intensif dan ekstensif, cita-cita untuk membangkitkan peran alternatif pers tidak pernah memudar(?). Nyatanya, pemberdayaan pers mahasiswa, hingga kini, belum diformulasikan ke dalam paradigma yang tepat. Akibatnya, obsesi pers mahasiswa sebagai pers alternatif, cenderung bias: tidak dipadu dengan kerangka konsep gerakan yang sistemik. Dalam keadaan demikian, utopi untuk mereproduksi peran alternatif pers mahasiswa —yang sempat dilegendakan lewat ***Mahasiswa Indonesia*** milik Rahman Toleng dkk— terjebak dalam romantisme belaka.

Agaknya, untuk itu, dibutuhkan manajemen modern yang profesional dengan dukungan modal, teknologi, organisasi yang teratur agar pers mahasiswa hadir sebagai pers alternatif. Mengembangkan obsesi pers alternatif tanpa transformasi mendasar terhadap struktur manajemen pers mahasiswa malah mempertontonkan obsesi tanpa kematangan konseptual. Karenanya, perlu redefinisi pers mahasiswa: bukan melulu pers yang dikelola oleh para mahasiswa, melainkan pers yang bekerja dengan spirit dan idealisme mahasiswa. Dalam kalimat yang lebih ideologis, pers mahasiswa adalah pers yang bekerja konsisten dengan visi kerakyatan. Pers yang konsisten secara struktural dan kumulatif mengartikulasikan segenap agregasi kepentingan rakyat.

Di samping itu, pers mahasiswa juga semestinya mampu menjadi intelektual organik dengan membangun basis material bersama kepentingan-kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Di sini terdapat perbedaan mendasar antara pers mahasiswa dan pers umum. Seperti telah diungkapkan di bagian awal, perakitan organik pers umum ke dengan dinamika kapitalisme menyebabkan terhuyung-huyungnya dedikasi pers terhadap kepentingan masyarakat. Maka, kendala internal yang perlu segera dituntaskan adalah merakit hubungan yang organik antara pers mahasiswa dan kepentingan rakyat. ***Detik*** sebagai tabloid yang meminimalisir iklan dan mengoptimalisasikan pasarnya dengan komoditi pesan-pesan politik *an-sich*, mungkin bisa diajukan sebagai contoh empiris untuk menjelaskan hal itu.

Penulis adalah mantan pemimpin redaksi majalah Sintesa FISIP UGM

Selamat Datang Putra-Putri Terbaik?

Aku terhenyak begitu melihat sebuah spanduk besar di gerbang sebuah universitas yang bertuliskan: "SELAMAT DATANG PUTRA-PUTRI TERBAIK BANGSA'. Tulisan itu jelas ditujukan bagi para calon mahasiswa yang akan memasuki universitas tersebut. Betul-betul luar biasa bahasanya, namun aku tidak tahu apakah sang calon mahasiswa menjadi besar kepala begitu ia diterima di universitas yang memasang tulisan tersebut, ataukah ia menjadi minder lantaran tidak merasa menjadi putra-putri terbaik?

Adityas Annas Azhari

Merenungkan kembali tulisan itu, membuatku berpikir dan tidak bisa tidur nyenyak. Terbayangkan olehku berapa persenkah dari bangsa ini yang dapat dengan gembira masuk ke perguruan tinggi? Adakah sampai 20%, kurasa tidak karena menurut info statistik hanya 2% yang dapat mengenyam perguruan tinggi. Benar. Untuk dapat menembus suatu perguruan tinggi yang dicita-citakan, sejak SMA (maaf, sekarang jadi SMUN) para peminat sudah mengikuti bimbingan belajar sampai mati-matian. Belum lagi, pengorbanan orangtua yang kalau perlu menjual kambing kesayangan agar anaknya menembus perguruan tinggi yang dicita-citakan, bahkan cara haram pun terkadang ditempuh dengan membayar 'joki' untuk mengerjakan Ujian Masuk Perguruan Tinggi.

Ah, tapi aku tidak peduli dengan apa motivasi mereka masuk perguruan tinggi. Apakah memang cita-cita ataukah disuruh orang tua atau memang untuk gagah-gagahan. Yang ada di benakku adalah nasib si Doel yang setelah lulus SMA harus menarik becak; si Badrun yang harus menjadi kuli bangunan karena tidak mampu membeli formulir UMPT; atau si Ijah yang, alhamdulilah, dapat bekerja di sebuah *departemen store* sebagai pramuniaga, sementara cita-citanya menjadi dokter telah terbang disambar nasib yang tidak berpihak padanya.

Bung Karno pernah berkata kepada begini: "Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit". Menggapai bintang-bintang di langit memang tidak perlu melalui perguruan tinggi, tapi apakah mereka yang tidak duduk di perguruan tinggi tidak punya cita-cita? Lantas, patutkah mereka terdegradasi dari posisi "putra-putri terbaik"?

Astaga! Pikiran kotorku berkata, "Kalau begitu hanya mereka yang sanggup membayar uang kuliah sekian juta sajalah yang menjadi putra-putri terbaik bangsa?"

"*Hey*, janganlah berpikiran negatif dulu," kata pikiranku yang lain. "Sebab, bukankah kata yang punya jargon, *toh* kelak mereka yang telah masuk ke perguruan tinggi ini akan dibekali ilmu yang dapat mengentaskan kemiskinan, membangun negeri, berwatak sosial, dan bertakwa sesuai dengan amanat Pancasila dan Tridharma Perguruan Tinggi".

Cuma, yang menjadi soal berikutnya, betulkah itu?

Aku tanya seorang teman setelah lulus kamu akan bekerja dimana? "*Nggak* tahu *yah*", jawabnya. "Habis pekerjaan sekarang susah *sih*, yang penting *gua* bisa memenuhi kebutuhan hidup *gua* sendiri". *Nah lho*. Kutanya seorang lagi.Ia pun menjawab, "*Gua kepingin* kerja di tempat yang gajinya *gede* sesuai dengan keahlian *gua*, terus kawin dan seterusnya". Pertanyaan yang sama aku ajukan dan ini agak lumayan humanis (dalam tanda kutip. Red.). Jawabannya, "*Kalo* sudah lulus, *gua* cari kerja sesuai keahlian *gua*, terus *gua* bantu adik-adik *gua*, meringankan beban orangtua *gua*, dan memenuhi kebutuhan *gua* sendiri *dong*". Syukurlah.

Nah sekarang saatnya memikirkan diriku sendiri, kenapa gara-gara tulisan di gerbang aku harus mengigau sebanyak itu. *Toh*, yang melewati gerbang itu sudah menjadi mahasiswa yang manis-manis dan baik-baik tanpa memikirkan apakah mereka yang terbaik sebagai putra bangsa ini. Tulisan semacam itu jangan terlalu dipikirkan kata seorang sahabat, mungkin yang buatnya lagi kalap karena takut tidak ada yang mendaftar di perguruan tinggi ini. Maklum biar kata hanya 2% yang sanggup masuk perguruan tinggi, tapi persaingan antar perguruan tinggi kan cukup seru.

Sudahlah, *ngapain* aku berputar-putar memikirkan semua itu. *Mendingan* sekarang kuliah yang benar, jadi sarjana, cari kerja, dan bermimpi bahwa aku adalah putra terbaik bangsa ini.
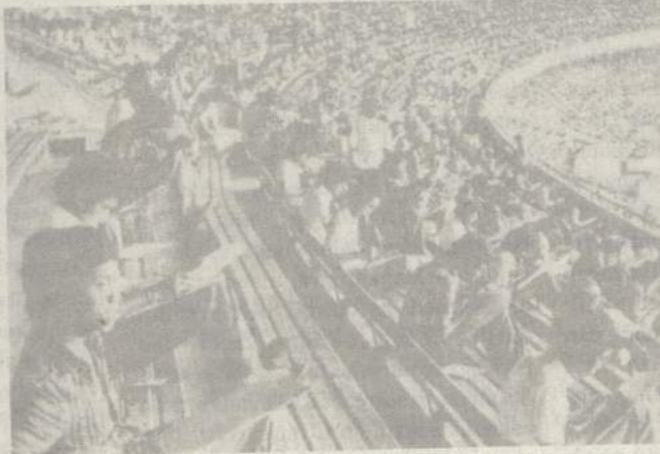
Mahitala Menyusuri Citarum

Budi Cahya M 01 ACH

Hari itu, Senin 4 April 1994, sekretariat Mahitala (Mahasiswa Parahyangan Pencinta Alam) Universitas Parahyangan sibuk. Ada apa gerangan? Ternyata, organisasi mahasiswa yang akrab dengan alam ini, sedang berlangsung kegiatan persiapan Dies Natalis Mahitala XX, yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 1994.

Waktu menunjukkan pukul 12 lewat 10, kami mendengar kabar penulis menerima berita dari salah seorang anggota Mahitala tentang musibah yang terjadi di sungai Citarum pada hari minggu kemarin. Yakni dengan hilangnya seorang anggota pencipta alam ITB ketika sedang melakukan latihan arung jeram di sungai tersebut. Mendengar berita ini, koordinator Divisi SAR Mahitala Unpar segera dihubungi. Lalu, kami pun memutuskan mengirim tim **SAR Arus Deras Mahitala**.

Divisi ini sendiri membawahi beberapa subdivisi SAR sesuai dengan kegiatan *outdoor* yang dilakukan. Subdivisi itu adalah SAR Gunung dan Rimba, SAR Arus Deras, dan SAR Tebing. Personalnya pun bukan orang-orang sembarangan, karena di sana berkumpul orang-orang yang telah berpengalaman di bidang-bidang tersebut dan telah mendapat pendidikan SAR.

Kesibukan baru pun terjadi di sekretariat Mahitala. Dua orang dikirim ke ITB untuk meminta keterangan lebih lanjut kejadian itu. Sementara itu, sejumlah kawan lainnya langsung menyiapkan peralatan SAR, dana, dan perijinan. Untuk sementara kegiatan lain di sekretariat, termasuk persiapan Dies Natalis, dihentikan. Bagaimanapun, kegiatan kemanusiaan ini lebih penting. Bahkan, untuk itu, para anggota yang hadir *kenclengan* untuk menambah dana team SAR, selain —tentu saja— dana dari Dewan Pengurus Mahitala sendiri.

Persiapan pun selesai. Tim SAR pun siap berangkat ke Citarum. Sembilan orang yang dikirim terdiri dari orang-orang yang telah melakukan ekspedisi besar arung jeram ke sungai-sungai di Kalimantan dan Sumatera. Artinya, mereka terlatih dalam melakukan SAR di sungai, mereka adalah orang-orang yang telah berpengalaman dalam hal arus deras. Untuk melengkapinya, alat-alat yang digunakan dalam operasi SAR ini terdiri dari 1 buah perahu karet dan perlengkapannya serta 1 set alat *rescue*. Selain itu, di sekretariat Mahitala sendiri telah disiapkan tim II yang rencananya akan berangkat 3 hari kemudian untuk menggantikan tim I.

Setibanya di *base camp* SAR, tepatnya di desa Bantar Caringin, kami menghubungi Ketua Operasional SAR. Ternyata di sana sudah ada pula team SAR lain yaitu dari Brigade Modil (Brimo) dan Wanadri. Kami pun segera bergabung. Dan direncanakan, mengingat hari itu waktu sudah larut malam, tim SAR gabungan akan melakukan pencarian pada esok harinya dengan menggunakan team darat dan air. Kami pun memutuskan beristirahat malam itu di base camp.

Esok paginya, kira-kira pukul 5 pagi, kami mulai mempersiapkan alat penyusuran. Perahu dipompa, dayung dan helm disiapkan, sedangkan alat-alat rescue disiagakan. Sementara team logistik menyiapkan makanan dan peralatan untuk pencarian hari itu, team operasional melakukan survey sungai lebih dahulu. Hal ini harus dilakukan mengingat kondisi suatu sungai dapat berubah dengan tidak terduga. Waktu itu sungai Citarum sendiri airnya sedang naik sekitar 70 cm dari kondisi biasa. Tepat pukul 9 pagi, setelah briefing sebentar, team SAR gabungan mulai melakukan pencarian. Routenya terbagi 3, yaitu dari Bantar Caringin ke Leuwi Karang, lalu dari Leuwi Karang ke Jembatan Lama, dan dari Jembatan lama ke Leuwi Karang. Penyusuran route I dan II dilaksanakan oleh tim dari Mahitala Unpar, di sisi sebelah kiri, dan team dari Wanadri di sisi kanan. Penyusuran ini dilakukan dengan menggunakan perahu karet dan mengikuti arus. Sedangkan route III, Jembatan lama ke Leuwi Karang, disusuri oleh tim dari Brimob dengan menggunakan perahu bermotor karena harus melawan arus. Sementara tim daratnya, terdiri dari gabungan antara GEA ITB dan KMPA ITB, melakukan penyusuran dengan berjalan kaki di pinggir sungai.

Penyusuran pun segera dilakukan. Naiknya permukaan air, menyebabkan arus sungai semakin deras serta berubahnya kondisi medan. Banyak jeram-jeram baru, yang biasanya tidak ada, bermunculan. Kami harus berhati-hati mengemudikan perahu karena bila lengah sedikit saja maka akibatnya bisa fatal. *Scouting* (pengintaian) harus sering kami lakukan. Sebab walaupun kami sudah sering sekali bermain arus deras di sungai ini, tapi berubahnya kondisi medan akibat naiknya permukaan air menyebabkan kami harus ekstra hati-hati. Di samping itu kami pun harus melakukan pencarian terhadap korban.

Sehingga kami harus bekerja lebih keras lagi supaya keselamatan kami tetap terjamin dalam melakukan pencarian ini.

Bahaya tetap mengintai kami dalam kegiatan SAR ini. Misalnya saja ketika sampai di dekat daerah Leuwi Karang. Ketika itu kami sedang melakukan pencarian di sebuah eddy (arus balik) yang berputar dan cukup besar. Perahu kami biarkan berputar-putar di sekitar eddy tersebut karena bila sudah masuk ke eddy maka perahu tidak akan terbawa hanyut. Ketika sedang asyik melakukan pencarian, tiba-tiba perahu kami terseret ke arah jeram yang ada di belakang kami. Kejadian ini sungguh tidak terduga akan terjadi begitu cepatnya. Perahu seolah-olah tersedot oleh jeram tersebut dan mengarah ke drop (aliran air seperti air terjun kecil) setinggi setengah meter. Akibatnya tidak bisa terhindarkan lagi. Perahu kami menabrak drop tersebut dan seolah-olah ditarik masuk ke dalam air. Rasanya seperti di sentakan oleh sebuah kekuatan yang besar. Awak perahu pun berjatuhan dari tempat duduk mereka, tetapi dengan cepat kami berusaha menormalkan keadaan. Dan pada saat itu pula kami mengetahui 2 orang teman kami, Sancos (panggilan akrab Sancoyo) dan Maman, terlempar keluar perahu serta dan belum muncul ke permukaan. Suasana tegang menyelimuti perahu. tapi kami tetap berusaha tenang. Dari sisi sebelah kiri terlihat ada tangan muncul dari air, ternyata tangan maman, dan secara refleks penulis, yang kebetulan duduk di bagian kiri langsung menangkap tangan tersebut dan berusaha membantunya naik ke perahu dengan cara menarik pelampungnya. Sementara itu Sancos sendiri belum terlihat muncul ke permukaan. Tapi tak lama kemudian dari sisi kanan perahu, Sancos akhirnya muncul juga. Rupanya ketika berusaha muncul ke permukaan dia terhalang oleh alas perahu dan seolah-olah tertindih perahu. Kejadian tadi terjadi begitu cepat dan tak terduga, membuat kami harus lebih berjaga-jaga lagi. Hal-hal tak terduga seperti inilah yang menunjukkan bahwa untuk melakukan operasi SAR di sungai diperlukan orang-orang yang mempunyai pengalaman dan kemampuan bermain arus deras. Kami pun kemudian melanjutkan pencarian kembali.

Pukul 1 siang kami sampai di desa Bantar Kalong, kira-kira 5 kilo dari base camp dan memutuskan untuk makan siang di tempat itu. Di sana kami pun bertemu dengan team Brimob yang melakukan penyusuran dari arah yang berlawanan. Di tempat ini kami berusaha untuk bersosialisasi dengan penduduk sekitar, karena peranan penduduk tersebut sangat besar dalam operasi SAR ini. Mereka memang terlibat dalam usaha pencarian ini dan memberikan bantuan yang tidak sedikit.

Setelah beristirahat kira-kira sejam lamanya, kami bermaksud melanjutkan pencarian, demikian pula dengan tim Brimob. Sesuai rencana kami tetap menyusuri sungai di sisi sebelah kiri dan Brimob di sebelah kanan. Tim Wanadri sendiri telah lebih dulu melanjutkan pencarian karena mereka tiba di tempat ini lebih cepat. Kira-kira 50 meter dari desa persinggahan kami, terdapat sebuah delta yang membentuk sebuah pulau kecil di tengah sungai. Sungai menjadi terbagi dua, kami memutuskan masuk ke sebelah kiri dan Brimob ke jalur kanan. Tak lama kemudian kami keluar dari wilayah delta tersebut. Tim Brimob sendiri sudah ada 20 meter di depan kami. Kemudian di depan kami menjumpai sebuah belokan, dan perahu tim Brimob pun tidak terlihat dari pandangan karena sudah memasuki belokan tersebut lebih dulu. Kami sendiri masih sibuk melihat-lihat ke arah pinggir sungai, karena diperkirakan korban kemungkinan besar terbawa ke daerah itu.

Tiba-tiba terdengar letusan pistol yang berasal dari perahu Brimob. Disusul oleh munculnya perahu penduduk yang memberitahukan ada mayat mengambang tak jauh di depan kami. Dan ketika kami melalui belokan tersebut, kami melihat team dari Brimob dengan dibantu sejumlah penduduk sedang berusaha menaikkan mayat seseorang. Ternyata tubuh tadi adalah tubuh si korban. Jam menunjukkan pukul 14.48 ketika korban ditemukan. Jadi kira-kira 48 jam dari saat dinyatakan hilang.

Aliran sungai di tempat itu sendiri berupa arus tenang, sehingga kami harus mendayung perahu menuju Rajamandala untuk membawa si korbam. Tapi walaupun harus mendayung perahu di bawah terik matahari, kami merasa lega karena si korban akhirnya ditemukan. Kemudian sesampainya di Rajamandala, korban dibawa dengan mobil ambulans ke Polsek Rajamandala untuk divisum. Kami sendiri setelah berpamitan dengan team yang lain memutuskan untuk pulang ke Bandung saat itu juga. Kira-kira pukul setengah enam akhirnya kami sampai di sekretariat dengan perasaan lega dan bersyukur kepada Tuhan karena telah menunaikan panggilan kemanusiaan ini serta kembali dengan selamat.

Olah Raga Dirgantara: Menuntaskan Mimpi Icarus?

Manusia mempunyai naluri untuk selalu meniru alam. Terbang misalnya. Kehendak untuk terbangseperti burung menjadi impian manusia sejak lama. Melayang-layang seperti burung. Lepas dan bebas, menikmati luasnya dunia ini. Adalah Icarus, sebagaimana yang dikisahkan dalam legenda Yunani kuno, yang kemudian berusaha mewujudkan impiannya: membuat sayap dari bulu-bulu burung agar ia dapat terbang. Sekarang impian itu tidak berhenti sekedar menjadi mimpi. Manusia dapat terbang menjadi kenyataan. Ilmu dan teknologi memungkinkan manusia terbang seperti burung melalui balon udara, pesawat terbang, helikopter, dan sebagainya.

Seiring bergulirnya waktu, ihwal terbang inipun berkembang, selain tentu saja dengan sejumlah manfaat yang dapat dipetik dari dunia penerbangan ini, misalnya untuk olahraga dan prestasi.

Perkembangan dunia penerbangan, tidak lepas dari dalil-dalil fisika seperti aerodinamika, gravitasi, konstruksi, dan sebagainya. Dalam dunia olahraga dirgantara, salah satu dasar ilmu penerbangan adalah *aeromodelling* atau model pesawat. Namun kemudian, *aeromodelling* ialah suatu kegiatan yang melibatkan unsur-unsur dari mulai perencanaan, pembuatan, pengetesan sampai pada penerbangan pesawat-pesawat model.

Pesawat-pesawat terbang yang digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan ini tidaklah dapat dinaiki oleh manusia dan tentunya akan juga berakibat bahwa pesawat itu tidak dikendalikan secara langsung oleh pengemudinya seperti halnya pesawat sesungguhnya. Meskipun demikian kita tidak boleh beranggapan bahwa pesawat model ini selalu berukuran kecil, sebab dalam dunia pesawat model ini ada pula yang dibuat dengan ukuran yang mendekati pesawat yang sesungguhnya. Dewasa ini aeromodelling berperan amat besar dalam industri pesawat terbang, selain sebagai hobby, rekreasi dan olahraga.
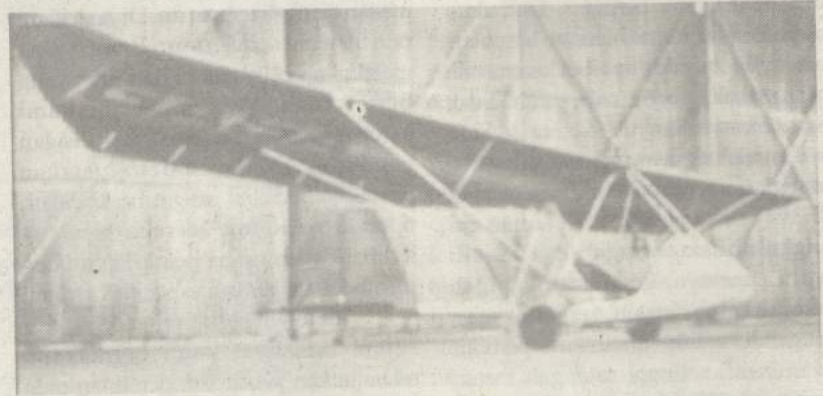
Dari model pesawat layang *(glider)*, pesawat bermesin, seperti pesawat terbang, dan helikopter, roket, bahkan sampai pada miniatur jet tempur dengan mesin jet mininya telah dapat dibuat menyerupai aslinya. Pun manuver-manuvernya yang amat menyerupai pesawat sesungguhnya dengan kecepatan yang mengagumkan.

Mereka yang gemar berhastakarya terutama di bidang mekanika dan sering membuat sendiri berbagai peralatan ataupun perakitan, umumnya lebih tertarik kepada kegiatan aeromodelling ini. Mereka biasanya akan bangga dan senang bila mereka berhasil membuat pesawat terbang model yang indah dan cantik. Terlebih bila mempunyai kemampuan terbang seperti yang diinginkan. Dengan teknologi pengendalian yang tersedia dewasa ini yang memungkinkan pesawat tersebut terbang sejauh 1 mil atau kurang lebih 1,5 kilometer dari sipengendali disertai dengan kemampuan beraerobatik atau terbang dalam formasi.

Cabang olahraga dirgantara lainnya adalah terbang layang. Olah raga ini dikenal pula dengan istilah *gliding* atau *soaring*. Terbang layang ini yang memungkinkan kita ikut terbang bersama pesawatnya, kendati pesawat yang dinaiki tidak mempunyai mesin. Olahraga ini benar-benar mengandalkan kemampuan atlet dalam mengendalikan pesawatnya yang digabungkan dengan penguasaan pengetahuan penerbangan. Terbang layang dapat dikatakan sebagai cabang olahraga dirgantara yang nyata.

Untuk menerbangkannya pun, sebelumnya pesawat terbang layang harus ditarik menggunakan katrol berkecepatan tinggi *(winch)* atau mobil, atau dengan menggunakan pesawat atau *aerotowing*. Pesawat dibawa sampai ketinggian 1500 feet atau 500 meter, lalu dilepaskan. Kemudian pilot harus mencari *thermal* atau udara naik yang dihasilkan oleh arus naik udara karena panas. Rekor terbang jelajah yang pernah dicapai saat ini adalah sekitar 800 mil atau lebih dari 1000 kilometer. Bila kita berada di dalamnya, maka kita akan merasa bagai burung, karena kita melayang-layang sendiri dan tidak terdapat suara-suara lain kecuali angin yang berhembus. Pemandangannya pun tidak kalah menariknya karena sejauh mata memandang terlihat hamparan bumi sampai ke batas-batas cakrawala. Bila kita mengikuti Diklat terbang layang, maka kita juga akan lebih mengenal hal-hal lain dalam dunia penerbangan, seperti teknik berkomunikasi, orientasi dan navigasi, pengenalan lapangan terbang, cuaca, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa terbang layang merupakan pengetahuan dasar dari pendidikan penerbangan. Jadi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang pernah menjadi penerbang pesawat ini melanjutkan ke terbang dengan pesawat bermotor.

Terjun payung merupakan salah satu cabang olahraga kedirgantaraan

yang tentunya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Ada dua jenis terjun yang selama ini banyak digunakan yaitu *free fall*, dan *static jump*. *Static jump* banyak digunakan oleh kalangan militer, yaitu payung langsung terkembang begitu keluar dari pesawat. Sedangkan *free fall*, penerjunnya mempunyai kesempatan jatuh bebas beberapa detik ketika keluar dari pesawat dan setelah pada ketinggian tertentu dia harus membuka payung dan mengarahkan pada sasaran pendaratannya. Dari sini lalu dikenallah adanya terjun formasi, yang berbentuk rangkaian panjang manusia dan payung, atau bentuk bentuk formasi lain. Atau terjun *boogie*, dimana penerjun beramai-ramai membuat formasi melingkar.

Bila Anda menyukai tantangan, atau Anda termasuk orang yang senang bila *hormon adrenalin* dalam tubuh terpacu, maka pilihlah olahraga ini. Anda akan mengalami hantaman angin langsung menerpa badan anda yang jatuh dengan kecepatan 60 meter perdetik.

Masih banyak cabang kedirgantaraan lain seperti *gantolle* atau *hang gliding*, yaitu terbang dengan menggunakan layangan raksasa, Terbang bermotor, dengan menggunakan pesawat *ultralight* atau pesawat ringan berbahan parasit dan diberi mesin. Bahkan, terbang dengan menggunakan pesawat swayasa yang dibuat/dirakit sendiri. Cabang-cabang olahraga kedirgantaraan ini di Indonesia bernaung di bawah *Federasi Aero Sport Indonesia* (FASI). Pembinaannya langsung di bawah TNI-AU dan menggunakan fasilitas mereka. Tentunya seluruh standar, ijasah dan brevet mengacu pada TNI-AU.

Unpar sendiri telah mempunyai unit kegiatan mahasiswa yang membidangi kedirgantaraan yang bernama PASCO (*Parahyangan Aerosport Corps*). Organisasi ini didirikan pada tanggal 2 Desember 1990 dan bernaung di bawah FASI dan Koordinator KUKM.

Dan, meminjam istilah kedirgantaraan ada yang berbunyi: "*The sky is very vast, but there is no place for make even a little mistake.*" Benar langit begitu luas, tetapi tidak ada tempat untuk berbuat sedikitpun kesalahan. Kalau tidak, entahlah,...

KOPMA-ku Terwujud

Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa Unpar yang berdiri pada tanggal 14 Mei 1991 dan berstatus Badan Hukum No. 9609 BH/KWK 10/21, tanggal 27 Mei 1991, kini mulai terealisasi. Terbukti dengan telah terbentuknya Badan Pengurus KKBM Unpar (sebut Kopma Unpar).

Proses pembentukan Badan Pengurus dan Pengawas Kopma Unpar dilaksanakan oleh Dewan formatur. Dewan Formatur itu sendiri terbentuk dari Rapat Umum Anggota (RUA) Kopma Unpar bulan Mei 1994, yang dihadiri oleh anggota-anggota Kopma Unpar angkatan '91 - '93. Seperti kita ketahui, bahwa mahasiswa mulai angkatan '91-'93 terkesan sebagai anggota Kopma yang dipaksakan dan tidak berasaskan kesukarelaan, karena mahasiswa diwajibkan sebagai anggota Kopma dengan membayar biaya pendaftaran anggota bersama uang pendaftaran sebagai mahasiswa baru yang ditangani oleh universitas. Hal ini tidak ditemukan lagi pada mahasiswa '94. Karena keanggotaan Kopma mahasiswa '94 berasaskan kesukarelaan dan pendaftaraannya langsung ditangani oleh badan pengurus dan pengawas.

Kembali pada proses pembentukan badan pengurus dan pengawas yang dilaksanakan oleh dewan formatur, maka dewan formatur dalam upaya tersebut mengadakan Diklatsar bagi anggota Kopma yang berminat menjabat sebagai anggota badan pengurus dan pengawas. Diklatsar yang diadakan di gedung Fakultas Ekonomi Unpar, Jalan Merdeka, dilaksanakan dengan bantuan dan kerjasama Dekopinda yang melakukan evaluasi dan wawancara serta menentukan para anggota Diklatsar yang terpilih untuk duduk di badan pengurus dan pengawas KKBM Unpar.

Kegiatan Kopma

Dengan terbentuknya badan pengurus dan pengawas Kopma, maka mereka memiliki tanggung jawab menjalankan program kegiatan perkoperasian Kopma Unpar.

Kegiatan pertama yang ditangani adalah pendaftaraan calon anggota Kopma Angkatan IV bagi mahasiswa baru '94, pada tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus '94 seiring pendaftaran mahasiswa baru. Di samping melakukan peneriman calon anggota Kopma secara sukarela. Kopma mulai menjalankan kegiatan di bidang usaha dengan menyediakan beberapa kebutuhan bagi anggota mahasiswa baru yang akan menjalani penataran P4 ; seperti kemeja putih, dasi hitam, kaos kaki puith, alat tulis dan *note block*.

Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1994 dilakukan pengangkatan staff pengurus oleh badan pengurus dan pengawas. Untuk menambah pengetahuan tentang

perkoperasian, maka pengurus dan pengawas beserta staf Kopma manjalani Dikmen dengan bantuan Balatkop bertempat di gendung Fakultas Ekonomi Unpar, pada tanggal 18-21 Agustus 1994. Kegiatan selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh bidang penelitian dan pengembangan KKBM Unpar selama dua hari pada tanggal 22-23 Agustus 1994, Kopma mengadakan studi banding ke Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB dan Koperasi Mahasiswa IKOPIN.

Pada tanggal 27 Agustus 1994 pengurus Kopma turut serta dalam acara pengenalan organisasi kampus di UNIKA Parahyangan, Bandung bagi mahasiswa baru. Tak ketinggalan, unit bidang usaha KKBM Unpar mengadakan penjualan minuman *Coca-Cola* dengan menggunakan *dispenser* pada tanggal 23-27 Agustus 1994. Bidang usaha Kopma juga bekerjasama dengan panitia Opspek Fakultas Ekonomi Unpar 1994. Kopma di beri kesempatan untuk memasang spanduk KKBM Unpar pada saat diadakan kegiatan Opspek oleh kedua panitia opspek fakultas tersebut.

Kegiatan Kopma yang paling utama di akhir Agustus adalah rapat kerja badan pengurus,pengawas, dan staf KKBM Unpar pada tanggal 28-31 Agustus 1994 bertempat di Balai Pertemuan Bumi Sangkuring. Yang sangat menggembirakan adalah pada hari terakhir rapat kerja, saat Kopma mengundang Bapak A.P Sugiharto, rektor Unpar yang baru dilantik awal September lalu. Kehadiran Bapak A.P Sugiharto dalam acara ramah tamah (minum teh bersama) pengurus, pengawas, dan staf Kopma Unpar memberi kesan yang tak terlupakan. Ia saat itu memberi restu, kesan serta pesan kepada para pengurus, pengawas, dan staf untuk terus merintis usaha yang mulai menampakkan titik cerah di KKBM Unpar.

Perlu diketahui bahwa sejak terbentuknya badan pengurus dan pengawas,hingga kini pengurus dan pengawas Kopma terus melakukan usaha guna proses pencairan dana dari yayasan ke Kopma, dengan mengadakan rapat ataupun pertemuan dengan pihak rektorat.

Dan pertemuan-pertemuan dengan pihak rektorat tersebut antara lain memberi hasil yaitu diberikannya tempat bagi Kopma untuk menjalankan usaha di ruang bekas rektorat (gedung rektorat lama). Disamping janji untuk proses kelanjutan pencairan dana dari pihak yayasan ke Kopma.

Hasil Raker Kopma

Selama empat hari pengurus, pengawas, dan staf Kopma mengadakan raker yang telah menghasilkan program kerja, baik dipihak pengawas dan di pihak pengurus.

Program kerja yang direncanakan oleh Pengawas Kopma meliputi:

- Tugas badan pengawas yaitu mengawasi sejauh mana pelaksanaan program kerja badan pengurus.
- Rencana kerja badan pengawas dengan melakukan penahapan setiap hari, setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap tahun terhadap badan pengurus.
- Hubungan badan pengawas dan badan pengurus adalah kerja dan badan pengawas berhak memberi saran.

Program kerja badan pengurus Kopma sendiri adalah sebagai berikut:

- Kepengurusan di pimipin oleh Ketua Umum.
- Sekretaris bertugas dan berwenang terhadap keamanan administrasi arsip, surat masuk dan keluar.
- Bendahara bertugas dan berwenang terhadap keuangan Kopma,
- Bidang organisasi bertugas dan berwenang atas keanggotaan Kopma dan masalah-masalah keanggotaan lainnya.
- Bidang penelitian dan pengembangan yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
- Bidang Usaha bertugas menyediakan kebutuhan materiil anggota dan mengembangkan keuntungan jasa koperasi.

Di bidang usaha, Kopma dalam usaha penyediaan kebutuhan materiil telah merencanakan akan dibukannya unit usaha foto, warung serba ada, dan toko buku. Serta dalam usaha jasa merencanakan usaha ivestasi dalam jangka pendek.

Dan di bidang organisasi telah merencanakan pembuatan anggota Kopma, baik bagi anggota baru (angkatan '94) dan anggota lama (angkatan '91 - '93). Khusus bagi anggota lama dibuka registrasi ulang untuk pendataan kembali dimana beruntuk untuk menjaring kembali anggota yang berminat untuk berstatus sebagai anggota atau mengembalikan uang pendaftaraan sebagai anggota (dengan suatu perhitungan tertentu). Bagi anggota yang ingin keluar, mengingat keanggotaan yang terdahulu yang secara terpaksa atau dengan tanpa kesukarelaan.

Simfoni Tiada Henti

Panduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Parahyangan , untuk sekian kalinya, mengelar konsernya yang ketujuh. Konser itu telah diberlangsungkan tanggal 18 hingga 21 Agustus 1994. Acara yang berlangsung di dua tempat itu, yaitu di Papandayan Hotel dan Erasmus Huis, merupakan hasil kerja sama dengan DPD WKKB (Wanita Katolik Keuskupan Bandung).

Selama dua hari pertunjukkan berlangsung di Erasmus Huis, Jakarta. Konser yang lebih banyak menampilkan *acapella* 25 lagu dari 8 komponis terkemuka. Sebut saja gubahan Johanes Brahms, Anton Bruckner, Francis Poulenc, Felix Mendelssohn Bartholdym C.V. Stanford, Frederick Delius, C.S. Saens dan Maurice Ravel.

Penampilan koor wanita dengan ramuan harmonis suara alto I, alto II, dan mezzosopran membuka pergelaran. Tiga komposisi karya Brahms yaitu O, Bone Jesu, Adoramus dan Regina Coeli mendapat kehormatan pertama. Giliran selanjutnya seperti biasa menjadi ciri khas PSM yaitu paduan lengkap, suara pria dan wanita.

Dalam pergelaran ini, ada yang patut dicatat sebagai warna baru adalah tampilnya koor-koor dengan sedikit penyanyi. Ini telah mencuatkan nama-nama seperti Vina Lusiani, Maya Miranda, Nuniek Ratnidyah, Teddy P dan Budi Santoso sebagai solis pada kelompok suara masing-masing. Kepiawaian mereka tercatat lewat lagu *The Blue Bird*-nya Stanford serta *Trois 2 Beaux Oiseaux Du Paradis* karya Ravel, khususnya. Dan, konser yang mendapat sambutan baik ini juga menampilkan lagu *To Be Sung of Summer Night* memberi kesan tersendiri karena menjadi lagu terunik dari untaian komposisi yang dibawakan malam itu.

Nuansa kerinduan memekati dan meliputi hati pemirsa saat itu. Setidaknya, keterpukauan itu tampak seusai sajian, yakni gemuruhnya tepuk tangan. Kendati, dalam beberapa bagian, konsentrasi penonton kerap terganggu oleh kerasnya detak sepatu para penyanyi saat keluar masuk panggung, dan bisik-bisik penonton.

Tak terasa dua jam lebih simponi mengalir tanpa henti. Ketika *Londonderry Air* dan *Bobby Shaftoe* —dua lagu yang tak tercantum dalam buklet— ditembangkan, saat perpisahan menjelang, tiba-tiba malam beranjak cepat.

Vedna dan Krit

Prof.Dr.Ir. Ign. Soeharto:

"Nilai Mutlak adalah Ilmu"

"Jangan berkata: mengapa dia dan bukan saya". Nasehat nan bijak ini meluncur dari mulut bukan sembarang orang. Ia adalah sedikit pakar bioteknologi dan teknik kimia di tanah air. Tepatnya dari Prof. Dr. Ir. Ign Soeharto.

Ayah dari tiga orang anak ini —yaitu Catharina Damajanti. F. Erwin Putranto, dan Priska S. Desiwati— dari perkawinannya dengan Christina. N. Sri Rasmuljani ini, berfilosofi tentang sikap seseorang untuk maju. Setidaknya filosofinya itu memang terbentuk dari raut mukanya yang semakin memancarkan warna bijak dan karismatik. Semangat dan pengabdiannya itu berbuah dari sebuah motto bahwa: "Raja dari kerajaan universitas adalah guru besar". Maka tak ayal lagi buahnya pun ia petik. Tanggal 12 Nopember 1994 lalu, Fakultas Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan telah mengukuhkannya sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknik kimia dan bioteknologi.

Setelah lulus tahun 1965 sebagai Insinyur Teknik kimia dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, laki-laki yang dipercaya untuk menjadi dekan pertama Fakultas Teknik Industri Unpar (1993), memulai karier pertamanya sebagai peneliti di Pusat Riset Nasional-LIPI.

Darah peneliti memang kental dalam dirinya, sehingga ia pun bergabung sebagai peneliti LIPI hingga kini. Kendati usianya lebih dari setengah abad, ia yang tetap berwajah *sumringah* ini, kini menjabat sebagai ahli peneliti utama. Semangatnya sebagai seorang peneliti utama memang merangsangnya untuk tetap menjadikanya seorang ilmuwan teknik kimia.

Laki-laki yang menamatkan program doktoralnya di *Biotechnology dan Biochemical Engineering* UGM itu ternyata mendapat dua tanda kehormatan dari Presiden RI yaitu bintang jasa *Nararya, Satyalancana Karya Satya* tingkat I dan satu tanda penghargaan menteri negara pengawasan dan lingkungan hidup.

"Kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara tetangga. Contohnya Thailand dan Malaysia. Apalagi, kita jangan terus bergantung kepada negara-negara maju", ungkap ilmuwan yang sering menjadi duta bangsa dalam berbagai pertemuan internasional.

Berangkat dari hal tersebut, ia berkehendak memajukan dan mengembangkan Fakultas Tehnik Industri Unpar.

Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pengajar menjadi prioritasnya. Ia percaya keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan yang membentuknya. Dosen memegang peran penting, sedangkan sarana dan prasarana bisa menyusul kemudian. "Kita harus bisa menentukan nilai mutlak dalam hidup" tuturnya. Kemudian ia pun menjelaskan lebih lanjut, bahwa bila seseorang menjadi dosen, maka nilai mutlak yang dipilih adalah ilmu. Baru kemudian materi. "Untuk itu, mental para dosen harus disiapkan sehingga ilmu pengetahuan tetap merupakan tujuan utama".

Kemantapan Soeharto memilih bidang yang ditekuninya, kental dengan keprihatinannya atas merosotnya mutu sumber daya manusia yang cakap teknologi. Baginya, bidang yang selama ini digelutinya itu sangat penting dalam memberikan arah bagi sumber daya manusia berkualitas yang mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan.

"Sektor industri masa kini dan mendatang perlu didukung oleh strategi penerapan teknik kimia pada bioteknologi dan non bioteknologi untuk memperoleh produk baru yang berdaya saing kuat dan berbasis keunggulan kompetitif," ungkapnya sungguh-sungguh. Industri kimia, induatri bioteknologi dan lingkungan merupakan industri yang menggunakan teknologi tinggi, padat modal guna mengolah sumber daya alam menjadi produk ungulan yang berbasis sadar lingkungan.

Dheasy Suzanti,Pasaribu Ari , Edward Panjaitan

Dheasy Suzanti

Cerita Tentang Sakitku

Menatap kapur-kapur yang berjuntai
harusnya datang kepada sel-sel otak
tapi huruf-huruf menjelma jadi:
"pernik yang menikam ulu hati"
lalu menyebar ke seluruh tubuh

Ah...
dayaku sekarang, sayang
tidur lagi dalam senyap tawa-tawa
lagi-lagi tertawa
namun kembali kepada bulan selagi
ia tak perawan
bukan plesir penyejuk

Adakah wadah bagi tempat peluhku
sebelum sindrom merajai pikiranku
(lalu aku menjadi pesakit
untuk seluruh harapanku)

Sudah. begini saja:
"Jangan berikan harapan bercinta lagi"

Pasir Layung, 1994

Rumah Kita

Pada jarimu aku pernah bersumpah: "mengalirkan sungai untuk rumah kita".
Ini adalah kesaksianku. sampai satu ketika pada pintunya yang sukar kubuka. aku pergi dengan panas dan kemarahan.
Pada jarimu yang jauh aku tetap bersumpah: "mengalirkan
sungai untuk rumah kita"

Pasir Layung, 1994

Subagio Sastrowardoyo

Nawangwulan

(yang melindungi bumi dan padi)

Jangan bicara denganku dengan bahasa dunia
Aku dari sorga
Jangan sentuh tubuhku dengan tubuh berdosa
Aku dari sorga

Sambut aku dengan bunga
Itu darah dari duka dan cinta
Bunga buat bayi yang baru lahir dari rahim ibu
Bunga buat kekasih yang manis merindu
Bunga buat maut yang diam termangu

Tapi juga anak yang menangis tengah malam
minta susu
Tapi jaga ladang yang baru sehari digaru
Anak minta ditimang
Ladang minta digenang
Lalu panggil aku turun di teratakmu

Dengan bunga.
Itu darah yang mengalir
Dari duka dan cinta.

("*Daerah Perbatasan*", Budaya Jaya, Jakarta, 1970)

Joko Tirtono

Empat Tahun Lagi

Kemarin masih kemarin,
boleh tercederai tatapan.
Debu jalan tersekai gerai rambutmu.
Tunas beringin di pot masih lagi hijau,
cuma waktu dan sesendok senyummu
tiap pagi jadi rabuk penyubur hari.
"Matahari..., esok kau tak sendiri."

Kampung Bulak, 1994

Aum Muharam

Rapat-rapat Gaib

pagi ini radar semesta kuncup,
pesan-pesannya melayang berserakan di langit hampa,
setelah semalaman lelah berbincang dengan petapa pengisap makna.
lelah jua sendiri di kesenyapan yang menderu-deru
petapa terdiam tegak lurus kepada matahari
(mungkinkah telegram ini salah alamat?)

Nopember 1994

Toleransi Sang Romo

Tidak banyak yang mengenal Romo Drs. F.H.C.H.

Vermeulen, OSC. Padahal ia adalah sedikit dari orang yang menduduki jabatan penting di Universitas Parahyangan. Keseharian laki-laki ini mengurusi masalah keuangan, sarana, dan prasarana universitas. Kesibukan di bidang itu memang tidak berkaitan langsung dengan publik, kendati apa yang dilakukannya memang vital bagi pengembangan perguruan tinggi yang sudah tua ini. Hal itu wajar saja karena ia adalah Pembantu Rektor II.

"Dalam waktu dekat, saya seharusnya ke Bangkok, Thailand, untuk mengikuti pertemuan *Associtian of Christian Universities and Colleges in Asia*," tutur Sekretaris Asiosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) ini kepada Dheasy Suzanti dari *ParaHyangan*. "Hanya saja", tambah staf pengajar fakultas filsafat ini, "ada salah seorang pengajar fakultas filsafat meninggal, sehingga saya harus menggantikannya. Jadi kepergian ke Bangkok, saya batalkan".

Apa yang dilakukan Romo Vermeulen ini memang bukan sebentuk toleransi belaka, sebab ia melihat kepentingan yang lebih besar. "Alasannya, ya, agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Selain itu, banyak sekali, paper dan sejumlah tugas mahasiswa yang harus diperiksanya membutuhkan bimbingan," ujar laki-laki yang tampak bersahaja serius.

Sebentar lagi, pria berdarah Belanda yang amat mencintai Indonesia mengakhirimasa jabatannya sebagai Pembantu Rektor II, dan akan mengisi jabatan Pembantu Dekan I Fakultas Filsafat. "Saya akan lebih banyak mengabdikan diri bagi pengembangan fakultas," ujar Romo yang setia dengan vespa tuanya itu.

Dheasy Suzanty, Yenny Itanaya

Top Secret Lydi

Senyumnya manisnya mengembang saat ditanya kesehariannya sebagai model. "Sebenarnya dunia itu bukan pilihan utama *kok*," ungkapnya kepada *ParaHyangan* "kuliah tetap penting dan dilakukan saat liburan semester". Nona yang dikenal *Lydia Hertadi* ini memang cantik. Tidak heran bila mahasiswi Fakultas Teknik Sipil Unpar angkatan 1992 raut mukanya kerap menghiasi beberapa majalah wanita. Terakhir, misalnya, ia menjadi finalis "Pemilihan Wajah Femina 1994".

Kendati demikian, gadis yang akrab dipanggil Lydi ini, menetapkan dunia teknik sipil sebagai pilihannya. Pun dengan segenap resiko berupa keseriusan berhadapan dengan angka-angka dan studio gambar. Malahan, di tengah aktivitasnya sebagai model dan kesuntukannya dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, anak bungsu dari lima bersaudara ini juga bergulat di dunia kemahasiswaan. sekarang, jabatan yang dipercayakan kepadanya adalah, bendahara umum senat mahasiswa di fakultasnya.

Pacar? "Belum punya. Dan, soal kriteria, itu *top secret*, rahasia", tuturnya penuh arti sembari tersipu-sipu.

Nah, apakah anda termasuk pria yang ingin menjadi rahasianya?

Ari Pasaribu

APEC dan Arswendo

Apa tautan APEC dan Arswendo Atmowiloto? Jelasnya tidak ada. Yang jelas, gema APEC memang luar biasa. Sehingga, tidak kurang Arswendo Atmowiloto, mantan pemimpin redaksi *Monitor*, turut berkomen-tar atas peristiwa yang mendapat pengamanan luar biasa itu. "Akhir-akhir ini," tutur penulis buku *Mengarang itu Gampang*, "banyak orang yang ngomong APEC. Masyarakat Jakarta, Bandung, dan berbagai kota-kota besar lainnya tersedot

perhatiannya ke sana. Berbagai media pun sibuk membahasnya. Namun, menurut *Time*, pertemuan para pemimpin negara-negara Asia-Pasifik di Jakarta itu bukanlah untuk mewakili negaranya, namun tak lebih dari pertemuan para penguasa ekonomi."

Lho kok begitu Mas? " *Iya*, soalnya, dalam kacamata *Time*, hasilnya hanya bersalam-salaman saja. Tidak lebih tidak kurang," urai penulis yang amat produktif dan hobi senyum ini di hadapan peserta pelatihan jurnalistik Universitas Parahyangan, November 1994. Dan, dapat diduga, para mahasiswa yang mendengarnya, tidak bisa tidak, tersenyum simpul mendengar semua itu. Sebenarnya, apa yang disampaikan Mas Wendo ini memang tidak ada kaitannya dengan kedudukan dirinya sebagai konsultan *Tabloid Bintang* dan *Fantasi*. Ia, saat mengilustrasikan APEC, sebenarnya tidak berkehendak menjadi seorang ekonom, melainkan demi kepentingan membahas ihwal penulisan opini di media. Penulisan opini memang menjadi salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan jurnalistik itu. Dengan *style* dan kebersahajaan Mas Wendo, para mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan jurnalistik memang terpukau. Dan tanya jawab soal penulisan opini pun gencar. Dan, tentu saja, riuh penuh canda dan ger-ger-an. Pun, komentar-komentarnya, yang terkadang, nakal.

V. Hanni Sulistyaningtas

Hunter: Saya Nggak Komentar

Tidak kenal nama, namun kenal wajah? Oh, itu soal biasa. Datang saja ke kantin di samping Fakultas Teknik, dan Anda pasti mengenalnya: Iwan Masna Supriatna.

Siapa-kah dia? Per-ta-nyaan itu akan pu-pus bila disodor-kan, soalnya nama itu tak populer benar. Tapi, Anda akan kenal julukan populernya: *Hunter*. Hunter kita ini memang bukan pintar membersihkan sampah masyarakat, tapi pintar membersihkan sampah di kampus dengan sapunya.

"*Abdi mah* sekolah cuma sampai kelas SD. Saya sempat menganggur satu tahun sesudah lulus. Kemudian, saya coba-coba cari kerja di bangunan. *Eh*, tiba-tiba adik saya menawari untuk kerja di sini. Ya, saya coba deh! Akhirnya, saya diterima," tuturnya ihwal menjadi karyawan Unpar. "Soalnya, saya tak mungkin sekolah lagi. Orang tua tidak mampu membiayai lagi. Bapak cuma seorang sopir taksi".

Disinggung suka duka, Hunter, ...eh Iwan mengaku lebih banyak suka dukanya selama 7 tahun mengabdi di Unpar. Menurutnya, ia bisa kenal dengan mahasiswa-mahasiswa. Kalau dukanya? "Pas saya dimarahi bos. Atau, kalau pekerjaan yang satu belum beres, saya sudah disuruh mengerjakan tugas yang lain. Kalau saya lagi kesal, saya makin tambah kesal bila diganggu".

"Kalau tentang mahasiswa Unpar, saya *nggak* komentar banyak. Setelah setahun bekerja, saya baru bisa mengenal banyak mahasiswa. Saya kira, rata-rata mahasiswa Unpar baik-baik *kok*," ujar Iwan berpendapat tentang mahasiswa. "Saya sering bantu mereka, misalnya, ya, seperti bantu-bantu angkat barang-barang mereka. Misalnya, saya suka bantu anak-anak arsitek membawa maket gedung dari mobil ke gedung arsitek. *Ya*, pernah dimintai bantuan untuk membakar kambing guling waktu ulang tahun angkatan mahasiswa arsitek. Mereka kadang-kadang memberi hadiah, bisa berupa barang atau uang".

Soal pacar, sembari tersipu-sipu, Iwan mengaku telah punya *doi*. "Waktu itu saya ketemu dia pertama kali pas saya main ke Sukajadi. Rencananya, kalau tidak ada halangan, saya akan menikah bulan Desember ini".

Ari Pasaribu

Kritik Lewat Pintu Samping

Siapa Cucu Wisnusarman? Benar Cucu Wisnusarman adalah rekaan, tokoh fiktif. Namun, ada yang lebih penting lagi, ia dapat menjadi 'siapa saja' dengan 'peran apapun'. Tokoh ini dapat merepresentasikan penulisnya sendiri, kita selaku pembaca, dan --bahkan-- dapat menjadi wakil dari masyarakat yang hendak berkata-kata tentang sesuatu.

Cucu Wisnusarman adalah tokoh rekaan Parakitri, wartawan KOMPAS, menjadi nama kolom yang hadir tiap minggu di harian umum tempat penulis buku tersebut bekerja antara tahun 1979-1984. Kemudian, kolom demi kolom tersebut dikumpulkan dalam sebentuk buku.

Judul Buku: Cucu Wisnusarman 1979-1984
Penulis: Parakitri
Kata Pengantar: Ali Sadikin
Penerbit : Grafindo Mukti, Jakarta, 1993
Tebal : xx + 251 Halaman

Sebagaimana umumnya tulisan yang memilih *style* berupa esai demi sebuah kolom, ***Cucu Wisnusarman*** ditulis demikian longgar kendati masih kental dengan 'olok-olok'. Kritik dilakukan melalui analogi, andaian, ataupun perumpamaan. Agaknya, boleh dikata, penulis buku paham situasi Indonesia yang menghendaki pengucapan yang sangat Jawa: *'ngono yo ngono, ning yo ojo ngono'* (begitu ya begitu, tapi ya jangan begitu), sehingga rangkaian tulisan yang dihadirkan lebih banyak 'menggelitik' tinimbang 'menohok'.

Dengan nada yang jauh dari berteriak, dan (bahkan) cenderung mencibir, tokoh Cucu Wisnusarman 'menghadirkan' dirinya dalam berbagai persoalan. Kritikan terhadap berbagai hal itu —mulai dari masalah pemerintahan yang bersih, korupsi, manipulasi, arogansi kekuasaan, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan banyak hal lainnya— menjadi lebih berwarna dan bernuansa.

Dengan pengucapan macam demikian, masalah yang diungkap ***Cucu Wisnusarman***, jika direnungi lebih jauh, mampu menjadi sindiran sarkastis. Meskipun, di balik semua itu, ada semacam kehati-hatian dalam pengungkapannya.

Kritik itu terhadap dunia pendidikan misalnya ditunjukkan lewat *Isak Tangis di Kampus Biru* (hal.41) iklim akademis yang belum tumbuh di perguruan-perguruan tinggi kita. Universitas yang seha-rusnya menjunjung dialektika demi sebuah kebenaran ternyata dikorbankan. Atau, dalam *Spesialis Kuping Kiri Perempuan* (hal.46) misalnya, masalah spesialisasi dalam bidang kedokteran ternyata membuat kerepotan tersendiri. Mengapa? Dokter-dokter sudah dikotak-kotak keahliannya, sedangkan pada saat yang sama situasi sosial kemasyakatan kita masih terlalu jauh mencapai semua itu. Masyarakat kita masih membutuhkan banyak pertolongan untuk lepas dari dari penyakitnya yang berkepanjangan: kehidupan yang susah. Olok-olok yang lain dapat ditemui dalam tulisan yang lain macam *Cucu Wisnusarman Mau Jadi Koruptor* (hal.127), *Cucu Wisnusarman: Indonesia Bangsa Hebat* (161), *Sekolah Tinggi Tokcer dan Etika Kejahatan* (hal.224), dan masih banyak lagi lainnya.

Tetapi bukan berarti keseluruhan kritik tersebut selamanya lembut. Malahan, dalam beberapa tulisan, terasa benar 'kemarahan' penulis buku ini atas realitas yang menimpa bangsanya. Setidaknya, hal tersebut dapat kita lihat dalam tulisan yang dijuduli *Cucu Wisnusarman dan HAP* (hal.17) tentang penyusunan produk yuridis yang disusun serba kilat. Atau juga keprihatinan atas sejumlah kecil perilaku kekuasaan (dan, tentu saja, pengendalinya) dalam *Cucu Wisnusarman dan Susan George* (2-Habis) (hal.70).

Dari 58 tulisan yang disajikan buku ini, ada goresan keprihatinan, kecemasan, serta kewas-wasan yang amat kental dari penulisnya. Tidak heran, bila kemudian, Ali Sadikin, dalam kata pengantarnya memuji: "Kumpulan tulisan Saudara Parakitri yang dimuat dalam Harian KOMPAS pada kurun waktu 1979-198, telah mengangkat dan menggambarkan secara baik realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan bangsa, masyarakat, dan negara ...". Pujian tersebut memang tidak berlebihan. Mengapa? Sebab, dalam banyak sisi, kekentalan pengung-kapan 'kritik lewat pintu samping' yang disoal ***Cucu Wisnuwarman*** ini, bisa jadi 'pengritiknya' mengajak 'yang dikritik' tertawa bersama-sama.

Hanya saja, di bagian mula, persembahan yang ditujukan buat generasi muda Indonesia 1993, menjadikan semiotis tersendiri. Anak-anak muda sekarang (pada saat itu masih kanak-kanak) tidak secara langsung mengalami banyak peristiwa yang terjadi tahun-tahun penulisan kolom-kolom itu. Bagaimanapun, di pihak lain, esai demi esai yang ditulis Parakitri yang dituangkan dalam kolom yang disediakan untuknya, mempunyai kedekatan peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Hal itu dengan sendirinya membuat buku ini menjadi penting, sebab ia memperlihatkan sisi lain yang, barangkali, tidak terpotret (dipotretkan?) dari realitas kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan kita. Gegap gempita pembangunan ternyata tidak selamanya enak disenandungkan. Sebab, dibaliknya, menyimpan sekian kedukaan yang juga patut disikapi.

Ada sebuah sisi yang pantas untuk direnungi selalu.

Puspita Hadi

Resensi